



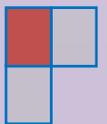
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



TUGU DODOL

PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 21076/21526 Kandangan 71211





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dan diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi “**Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif**”. Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 merupakan tahun Ke Lima atau tahun terakhir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2018.

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada periode tahun Ke empat. Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh jajaran organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, yaitu: menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terakhir evaluasi AKIP tahun 2017 dengan nilai 75,18 (Predikat BB) atau meningkat 3,15 poin tahun 2016 dengan nilai 70,03 (Predikat BB) atau meningkat 4,6 poin dari tahun 2015 dengan nilai 65,43 (Predikat B) atau meningkat 5,11 poin dari tahun 2014 dengan nilai 60,32 (Predikat B).





Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 9 (sembilan) Tujuan, 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dan 72 (tujuh puluh dua) indikator kinerja, yang dapat dirincikan bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis, 18 (delapan belas) sasaran strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (sembilan) sasaran strategis tidak tercapai dengan pencapaian $\leq 100\%$.

Dan dari 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja kinerja, sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang pencapaian kinerjanya $\leq 100\%$, sedangkan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$.

Sedangkan dari Hasil capaian pengukuran terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang pencapaian kinerjanya $\leq 100\%$ dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$.

Dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurangberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sebesar 121,70% atau tercapai $\geq 100\%$. Tercapainya capaian kinerja ini karena adanya komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja akan menjadi prioritas dan perhatian dalam perencanaan kinerja ke depan.

Kandangan, Maret 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018. Shalawat dan Salam kita Sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, Kerabat, Pengikut Beliau dari dahulu, sekarang dan sampai akhir nanti.

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan : yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan daerah yang dijabarkan melalui program-program Pembangunan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kandangan, Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. ISU STRAEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	I-2
C. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	I-6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJMD)	II-1
1. Visi	II-1
2. Misi	II-5
3. Tujuan dan Sasaran.....	II-7
B. PERENCANAAN KINERJA	II-12
Sasaran dan Indikator Sasaran	II-12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	II-14
Sasaran dan Indikator Sasaran	II-14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-3
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013-2018	III-3
1). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	III-7
2). Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	III-10
3). Evaluasi Dan Analisis Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	III-16
1. Misi I : Meningkatkan Kehidupan Beragama	III-16
1). Tujuan 1. Mewujudkan Nilai- Nilai Agamis Sebagai Sumber Dalam Kehidupan Sehari- Hari	III-16
2. Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.	III-20
1). Tujuan 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	III-20
2). Tujuan 2. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan	III-35
3). Tujuan 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .	III-66
4). Tujuan 4. Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.....	III-87



3. Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.	III-116
1). Tujuan 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.	III-116
2). Tujuan 2. Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja.....	III-126
3). Tujuan 3. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat	III-135
4. Misi IV : Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika.....	III-138
1). Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.....	III-138
B. REALISASI ANGGARAN	III-159
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. SIMPULAN	IV-1
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	IV-3
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta



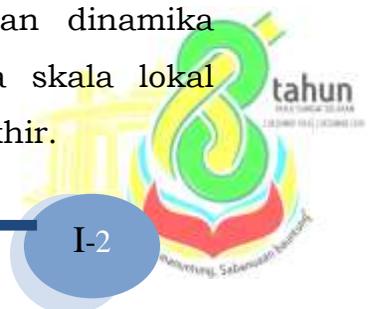


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018.

B. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal daerah, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.





Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 terdapat 3 (tiga) isu strategis dalam pembangunan daerah, yaitu aspek kondisi infrastruktur dan tata ruang, sosial budaya serta ekonomi.

1. Aspek infrastruktur dan tata ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Rendahnya pelayanan infrastruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- b. Terbatasnya penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka memenuhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air bersih.
- c. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap penyediaan air bersih. Cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini baru mencapai 12.635 buah dengan distribusi 2.611.703 M³ (Kabupaten HSS Dalam Angka 2012)
- d. Masih rendahnya akses pelayanan sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- e. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum untuk mendukung kebutuhan akan pelayanan transportasi darat yang mampu menjangkau seluruh wilayah.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan RTRW dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
- g. Berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau atau vegetasi sebagai korban pembangunan atau pengembangan wilayah, padahal fungsi dari vegetasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan.





2. Aspek Sosial Budaya

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sosial budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Tingkat perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pada tahun 2008 sebesar 70,11 kemudian naik menjadi 70,50 (2009), menjadi 70,84 (2010), menjadi 71,18 (2011), 71,64 (2012) dan sedangkan pada tahun 2013 IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di urutan kelima dari 13 kabupaten/kota Prov. Kalsel dengan IPM sebesar 72,00. Yang terdiri dari : Angka Harapan Hidup; Angka Melek Huruf sebesar 96,83; dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan sebesar 656,68 dan Rata-Rata Lama Sekolah hanya sampai sebesar 7,40. Artinya kuantitas dan kualitas SDM itu perlu ditingkatkan melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan serta kesehatan.
- b. Angka harapan hidup pada tahun 2013 sebesar 64,87 tahun, sedangkan rata-rata angka harapan hidup provinsi Kalsel hanya sebesar 64,82 tahun. Artinya angka harapan hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di atas rata-rata prov. kalsel.
- c. Angka kematian bayi (AKB) tahun 2013 yaitu sebesar 11,8 per seribu kelahiran dan angka kematian ibu tahun 2013 sebesar 262 per seratus ribu kelahiran sehingga untuk kedepannya diperlukan perhatian dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai (bidan desa, dokter spesialis, dan lain lain), peningkatan pelayanan murah dan terjangkau kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dan pemenuhan infrastruktur kesehatan.
- d. Rata-rata lama sekolah 7,4 tahun (2013) sedangkan Provinsi Kalsel 8,01 tahun, artinya rata-rata penduduk kita hanya bersekolah sampai kelas 1 SLTP/ sederajat dan angka tersebut masih dibawah rata-rata Provinsi Kalsel, sehingga perlu ditingkatkan keterjangkauan akses pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.





3. Aspek Ekonomi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sosial budaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Struktur Perekonomian Daerah belum kuat. Membangun struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, dimana sektor pertanian dan perdagangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas dan berkembangnya industri kecil menengah yang berdaya saing, sehingga sektor perdagangan dan jasa perannya meningkat dengan pesat sebagai mesin penggerak perekonomian Hulu Sungai Selatan.
- b. Masih rendahnya produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan relatif masih rendah.
- c. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, mutu kemasan produk yang rendah dan belum adanya standarisasi produk.
- d. Daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah masih belum optimal dikarenakan ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, sumber daya alam yang masih belum terangkat dan kualitas pelayanan serta SDM yang masih rendah.





C. KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai merupakan Kabupaten yang ada di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai sebagai daerah otonom, secara nyata terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950 yakni saat dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama dan dibentuknya DPRDS, maka pada tanggal 2 Desember 1950 inilah menjadi pancangan tonggak sejarah Berdiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06/KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan mengacu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan reorganisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan, tugas pokok dan fungsi .

Adapun Organisasi yang Telah terbentuk adalah sebagai berikut :

No	Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kecamatan/Kelurahan
A	<p>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p> <p>1. Asisten Administrasi Pemerintahan</p> <p>a. Bagian Tata Pemerintahan</p> <p>b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan</p> <p>c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah</p> <p>d. Bagian Umum</p>





No	Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kecamatan/Kelurahan
	2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha b. Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Bagian Protokol dan Humas d. Bagian Pengadaan Barang Jasa 3. Staf Ahli 4. Jabatan Fungsional
B	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN <ul style="list-style-type: none"> a. Bagian Umum dan Keuangan b. Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan d. Kelompok Jabatan Fungsional
C	LEMBAGA TEKNIS DAERAH <ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan d. Badan Keuangan Daerah e. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik f. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
D	DINAS-DINAS <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Pertanian f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang g. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian h. Dinas Sosial i. Dinas Ketahanan Pangan j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





No	Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kecamatan/Kelurahan
	<p>k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>m. Dinas Perhubungan</p> <p>n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>o. Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>p. Dinas Perikanan</p> <p>q. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata</p> <p>r. Dinas Perdagangan</p>
E	<p>KECAMATAN</p> <p>a. Padang Batung</p> <p>b. Loksado</p> <p>c. Telaga Langsat</p> <p>d. Angkinang</p> <p>e. Kandangan</p> <p>f. Sungai Raya</p> <p>g. Simpur</p> <p>h. Kalumpang</p> <p>i. Daha Selatan</p> <p>j. Daha Barat</p> <p>k. Daha Utara</p>
F	<p>KELURAHAN</p> <p>a. Kandangan Kota</p> <p>b. Kandangan Barat</p> <p>c. Kandangan Utara</p> <p>d. Jambu Hulu</p>





D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian dari program, sasaran dan kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menyajikan secara ringkas visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;





3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

1. VISI



Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan kata lain pandangan jauh ke depan menyangkut kemana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 merupakan dokumen yang menjabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah terpilih yaitu 2014-2018 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan secara ilmiah terhadap berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi daerah, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2013, maka pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada VISI:





“ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”

Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu:

“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.

“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis” yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

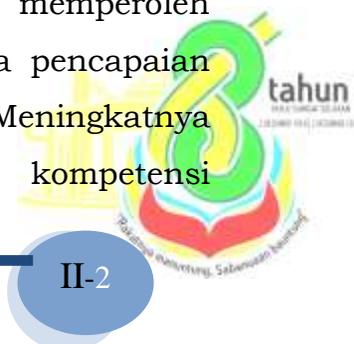
“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator, yakni:

1. Pada aspek sumber daya manusia (SDM)

Ada 3 (tiga) hal pokok dalam pembangunan SDM, yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan kehidupan sosial budaya masyarakat.

- 1.1. Bidang pendidikan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya pendidikan yang dilandasi nilai- nilai dan moral agama, (b) meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, (c) meningkatnya pencapaian indikator keberhasilan bidang pendidikan, (d) Meningkatnya angka melek huruf, dan meningkatnya kompetensi





profesional bagi tenaga pendidik. Pada tahapan pembangunan ketiga (2014-2018) pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025 sasaran yang ingin dicapai adalah: rata-rata lama sekolah 9,84 tahun, angka melek huruf 98,99%, APK SD 116,43%, APK SMP 105,14%, APK SMA 45,76%, APM SD 100%, APM SMP 78,18% dan APM SMA 41,76%.

- 1.2. Bidang Kesehatan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya masyarakat yang sehat dan berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, (b) meningkatnya pencapaian indikator kesehatan dan (c) menurunnya angka kematian bayi (AKB), meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Pada tahapan ketiga (2014- 2018) pada RPJP sasaran yang ingin dicapai adalah AHH 68,28 tahun, angka kematian ibu/ 100.000 KH sebesar 90 dan AKB/1.000 KH sebesar 5.
- 1.3. Bidang sosial budaya, yang ditunjukkan oleh: (a) semakin menguatnya wawasan kebangsaan, (b) semakin terwujudnya jati diri berdasarkan nilai-nilai agama, taat nilai dan adat istiadat serta budaya masyarakat, (c) menguatnya kepekaan sosial masyarakat, (d) terpelihara dan berkembangnya semua potensi sosial dan budaya masyarakat, dan (e) semakin meningkatnya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.

2. Pada tata kelola pemerintahan.

- 2.1. Politik dan hukum, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya ketertiban dan keamanan, (b) meningkatnya kepastian hukum, (c) meningkatnya budaya politik yang sehat dan (d) meningkatnya fungsi dan peran masyarakat dari lembaga politik yang efektif.
- 2.2. Pemerintahan, yang ditunjukkan oleh; (a) meningkatnya etos kerja, produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, (c) terwujudnya good governance dan (d) meningkatnya pendapatan daerah yang disertai peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.





- 2.3. Pada aspek perekonomian daerah yang berbasis agribisnis dan agroindustri, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB riil 6,6% per tahun, penduduk miskin 4,5% dan pengangguran terbuka 3,60% .
- 2.4. Sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas, (b) meningkatnya nilai tambah produk pertanian, (c) makin rendahnya alih fungsi lahan pertanian, (d) berkembangnya kawasan agropolitan, (e) optimalnya pemanfaatan waduk Amandit, (f) meningkatnya pendapatan petani dan peternak serta UMKM pelaku produk olahan berbasis pertanian.
- 2.5. Sektor industri dan perdagangan yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya nilai tambah produk- produk unggulan, (b) berkembangnya agroindustri, (c) meningkatnya daya saing UMKM, dan (d) meningkatnya peran Kota Kandungan sebagai pusat perdagangan wilayah Banua Anam.
- 2.6. Bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang ditunjukkan (a) semakin banyaknya pengusaha daerah sebagai pelaku utama ekonomi, (b) semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM, dan (c) berkembangnya pembiayaan berbasis Syariah.
- 2.7. Infrastruktur, yang ditunjukkan oleh : (a) terwujudnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur, (b) bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih, (c) meningkatnya jumlah dan kualitas penyediaan prasarana pemukiman, (d) meningkatnya kemampuan penyediaan energi dan (e) meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian.
- 2.8 Tata ruang yang ditunjukkan oleh: (a) konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan (b) adanya sinergi dan kerjasama antar wilayah.

3. Pada Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA)

- yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara SDA dan lingkungan, (b) rehabilitasi lahan-lahan kritis, (c) terpeliharanya DAS Amandit





- 4. Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan** yang ditunjukkan oleh semakin berfungsinya perkembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan oleh daerah.
- 5. Pada kehidupan beragama,** yang ditunjukkan oleh (a) meningkatnya masyarakat yang berakhlak mulia dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sehingga terbentuk sikap religius, (b) meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata melalui kesalehan dan kepedulian sosial ummat, (c) meningkatnya kerukunan intern dan antar ummat beragama, (d) meningkatnya jumlah dan fungsi sarana peribadatan serta kualitas pelayanannya dan (e) menurunnya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan penurunan angka indeks korupsi.

Indikator- indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun ke tahun hingga akhir 2018 yang akan datang, dan secara berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator RPJPD Tahun 2005-2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

2. MISI

Misi merupakan suatu tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penjabaran dan terjemahan dari visi.

Berlandaskan visi diatas maka misi yang diemban Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Memantapkan Gerbang Perkotaan Banua Lima Plus Center Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Mandiri, Unggul, Dan Religius.

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama

1.1. Melaksanakan nilai- nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- Meningkatkan dukungan fasilitas pelaksanaan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari.





- Meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama yang berkualitas dan lebih religius.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam kehidupan beragama.

2. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

Dalam misi ini dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:

- Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang hukum
- Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan,
- Pemasarakatan dan peningkatan prestasi pada bidang olah raga, seni dan budaya.

2.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:

- Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- Sektor Pariwisata dan Industri Pariwisata
- Sektor Industri Kecil dan Menengah

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

3.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, meliputi:

- Peningkatan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan Penerimaan Sah lainnya)





- Perekonomian Masyarakat (Sektor Industri, Sektor Perdagangan dan Jasa, Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi Koperasi)

3.2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Pembangunan

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur
- Meningkatkan kualitas kawasan Permukiman, ketersediaan Fasilitas Transportasi dan Fasilitas Umum lainnya
- Pengembangan Kawasan Pembangunan agropolitan
- Penataan Tata Ruang dan Lingkungan
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ramah lingkungan

4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika.

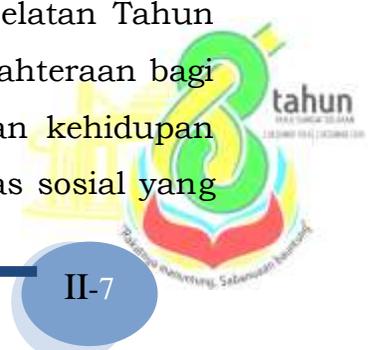
Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika

- Meningkatkan Pengembangan dan pemanfaatan Iptek dalam upaya menumbuhkembangkan kapasitas produksi.
- Meningkatkan penyebaran informasi dan pemanfaatannya guna mendukung pembangunan daerah.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahunan, yang mengacu pada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai, serta didasarkan pada issue-isue dan analisis strategik yang mampu mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang diinginkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 pada dasarnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di masa 5 (lima) tahun mendatang dengan kehidupan keagamaan dan produktivitas yang tinggi serta stabilitas sosial yang





kondusif. Selanjutnya adalah komitmen terhadap kepatuhan hukum oleh aparatur pemerintah dan masyarakat. Perbaikan kualitas kehidupan masyarakat (SDM) merupakan tujuan mendasar yang dilakukan secara bertahap terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal ditujukan untuk mendorong pengembangan potensi masyarakat dengan didukung oleh peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

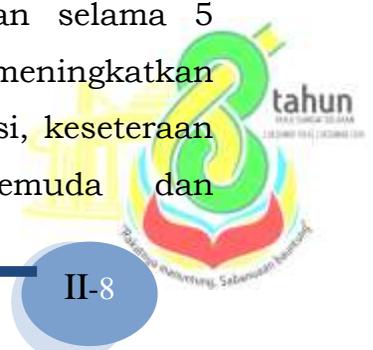
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Reformasi birokrasi saat ini ditujukan untuk perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia merupakan prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada.

Pendidikan merupakan bagian dari investasi jangka panjang yang ditujukan untuk pembentukan kualitas dan karakter manusia. Pendidikan yang diharapkan dalam pembangunan selama 5 tahun perencanaan yang akan datang dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan keterjaminan, peningkatan kualitas pemuda dan





meningkatkan wawasan, pemasyarakatan dan prestasi olah raga dalam mewujudkan layanan pendidikan untuk menuju pendidikan yang berkarakter, cerdas dan berkompetensi.

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap individu dan menjadi layanan dasar wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, sehingga mampu lebih berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Sehat dengan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan jangkauan dan pemerataan pelayanan, terciptanya lingkungan yang sehat.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing diwujudkan dengan mendorong pemberdayaannya. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat ditempuh dengan intervensi Pemerintah Daerah melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih meningkat.

5. Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.

Potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dalam hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Daerah yang lebih serius dalam menyediakan sarana dan prasarana terkait, termasuk penggunaan teknologi dan pembinaan terhadap masyarakat sehingga nilai tambah produk pertanian dapat ditingkatkan dan ketahanan pangan daerah dapat diwujudkan.



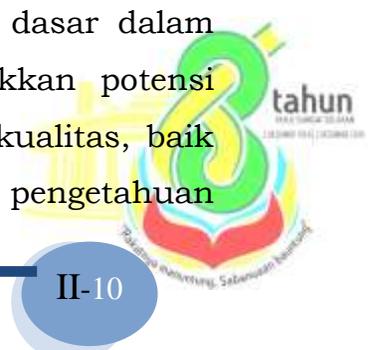


6. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat

Sumber keuangan daerah untuk mendanai belanja wajib dan belanja investasi, sumber pendapatan yang utama adalah dari Pemerintah melalui pendapatan dana perimbangan dan pemerintah Provinsi melalui bagi hasil pajak dan non pajak. Setelah itu pendapatan yang berasal dari PAD. PAD ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, mereview beberapa Perda yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah, tetapi tetap diupayakan jangan menimbulkan biaya tinggi. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau pelayanan. Pendapatan daerah ini digunakan untuk membangun barang publik dan jasa publik masyarakat yang selanjutnya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat ditandai dengan membaiknya perekonomian masyarakat. Struktur ekonomi yang kuat dan terus meningkat serta merata pada segenap masyarakat merupakan tujuan pembangunan ekonomi, yang ditandai dengan pendapatan perkapita masyarakat yang terus meningkat dan menurunnya angka kemiskinan. Untuk itu potensi ekonomi masyarakat harus terus diberdayakan dan peran industri mikro, kecil dan menengah terus dikembangkan. Selanjutnya juga diperhatikan pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi rakyat.

7. Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja

Salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja. Tujuan ini menjadi komitmen daerah sebab tenaga kerja merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, yang diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi masyarakat. Tanpa tenaga kerja yang berkualitas, baik dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengetahuan





maupun keterampilan yang didukung oleh kemudahan informasi untuk mengaksesnya maka akan sangat sulit untuk bersaing di dunia kerja.

8. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah

Penyediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana wilayah yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan. Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Secara tidak langsung infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat, membuka daerah-daerah yang terisolir, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga dari sini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan pembangunan ini meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma keagamaan. Kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan katalis bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersendi ketuhanan di satu sisi dan di sisi lain juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi menjadi hal yang memang seharusnya diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini perlu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap melindungi sumberdaya hayati maupun sumberdaya alam yang ada. Pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan kaidah kelestariannya menjadi hal yang harus diwujudkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tujuan pembangunan berkelanjutan





dapat tercapai. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang tertata dan pembangunan yang ramah lingkungan.

B. PERENCANAAN KINERJA

1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan disertai rencana tingkat capaiannya (target). Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	1	Opini Audit Eksternal
		2	Predikat Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		1	Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
		5	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
6	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Angka Kematian Ibu
		2	Angka Kematian Bayi
		3	Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta
		4	Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)
		5	Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB
		6	Persentase desa dengan kategori siaga aktif
Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pariwisata	Menurunnya persentase kemiskinan	1	persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	persentase ketersediaan pangan utama (beras)
	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: a. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Publik (5,185 Ha); b. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Private (2,593 Ha)
		2	Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)
Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya	1	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1	Persentase ketersediaan air irigasi
		2	persentase penanganan daya rusak air





C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diperjanjikan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
Mewujudkan nilai-nilai agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari.	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.	1	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	tidak terjadi	
	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	1	Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani.	1	Opini Audit Eksternal	WTP	
		2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A	
		3	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	Ada peningkatan	
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	
		2	Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari	
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan		1	Prosentase penerbitan KTP	100,00%
			2	Prosentase penerbitan akta kelahiran	90,00%
Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	1	Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00%	
		2	APK PAUD	75,30%	
		3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00%	
		4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,00%	
		5	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	
		6	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	
		7	Angka Partisipasi Murni SD/MI	100,00%	
		8	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,29%	
	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku		1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	100% (609 RT)
			2	Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		3	Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100,00%
		4	Tidak terjadi konflik sosial	Tidak terjadi
		5	Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas
		6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	71,05%
	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	1	Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%
		2	Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%
		3	Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Angka Kematian Ibu	54,54
		2	Angka Kematian Bayi	10
		3	Angka kematian neonatal	30
		4	Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,030%
		5	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%
		6	Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%
		7	Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	16,95%
		8	Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	28,57%
		9	Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100%
		10	Persentase puskesmas yang terakreditasi	19,05%
		11	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		12	Persentase desa dengan kategori siaga aktif	72,00%
		13	Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	80,00%
		14	Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	77,00%
Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	1	persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,00%
	Menjadikan Kota Kandungan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga	1	Persentase Pelestarian Budaya Lokal	80,00%
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,69%
		3	Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	50,00%
	Menurunnya persentase kemiskinan	1	persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	4,50%
	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	70,00%
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70,00%
		3	Prosentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70,00%
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	312,82%
	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB:	30,00%
			a. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Publik (5,185 Ha) b. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Private (2,593 Ha)	
			2	Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/ piatu dan penyandang cacat	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50% (3630 orang)
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.	Meningkatnya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	1	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6,60%
	Meningkatnya pendapatan per kapita	1	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	17.052
	Meningkatnya produksi hasil pertanian	1	Peningkatan produksi padi pertahun	284.117 ton
		2	Peningkatan produksi karet	728,17 ton
		3	Peningkatan Produksi Kayu Manis	9,43 ton
Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%
		2	Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,10%
		3	Tingkat partisipasi angkatan kerja.	66,72%
	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	1	Persentase peningkatan koperasi aktif	100% (153 KA)
		2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,68%
	Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif	1	Pembinaan UMKM (Jumlah Wirausaha Baru (Orang))	(45.096 orang)
	Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	1	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2			Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3,00%
Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1	Persentase kinerja sistem irigasi	85,00%
		2	Persentase penanganan daya rusak air	30,00%
	Meningkatnya jangkauan penggunaan teknologi informasi	1	Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	100,00%





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	1	persentase jalan dalam kondisi baik	75,00%
		2	Persentase konektivitas wilayah	100,00%
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81%
		2	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	62,00%
		3	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00%
		4	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	16,46%





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan Laporan Kinerja Tahun Terakhir dari RPJMD 2014-2018 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Pengukuran Kinerja 2018.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :





1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Target tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Target tingkat capaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab- sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indicator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

➤ Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

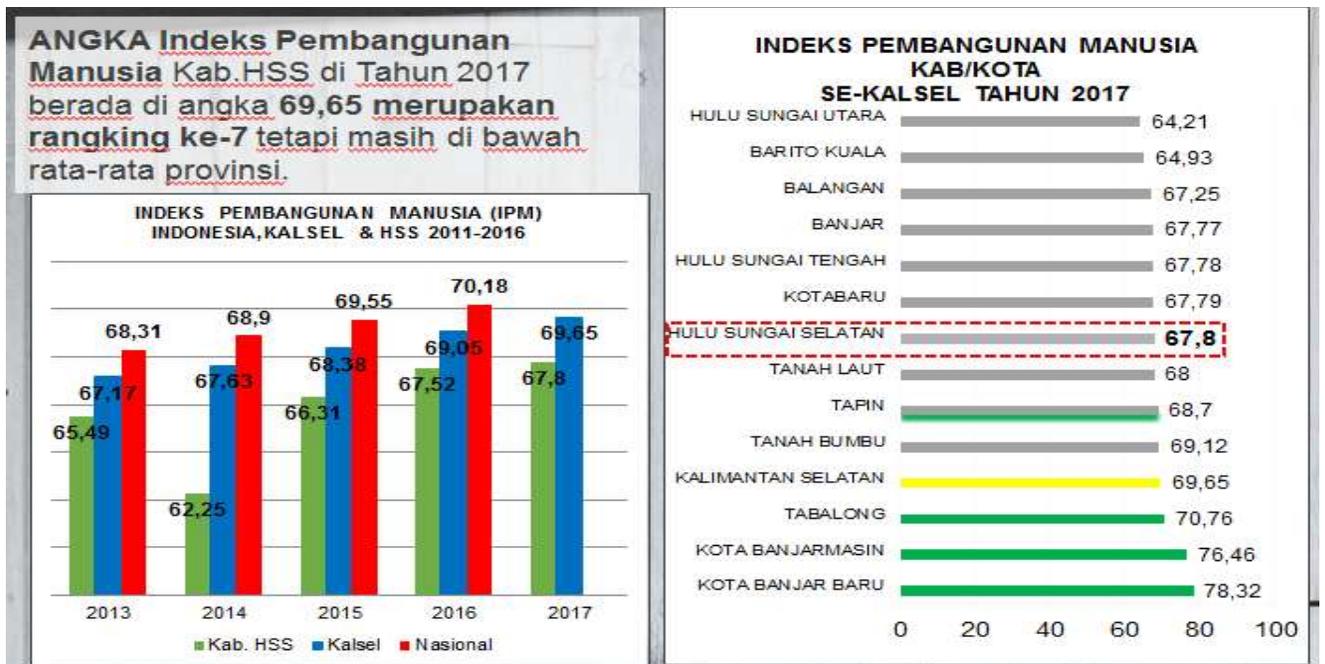
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2013-2018



CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN 2018

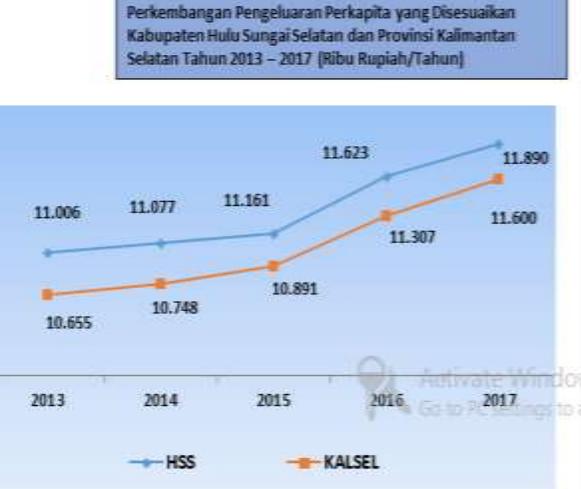
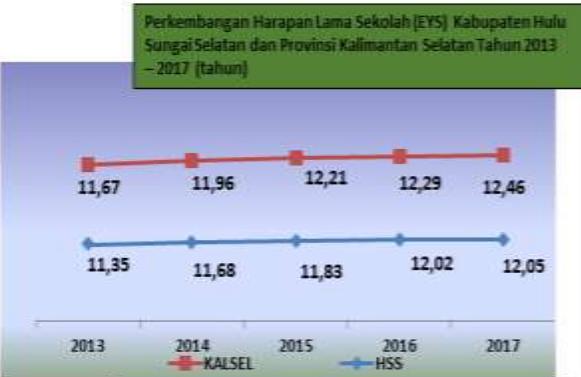
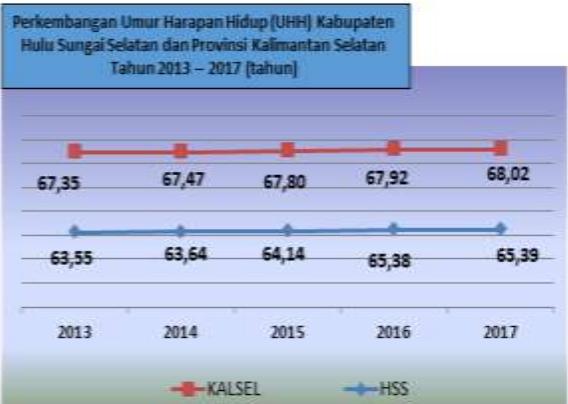


➤ **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**





UNSUR PEMBENTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)



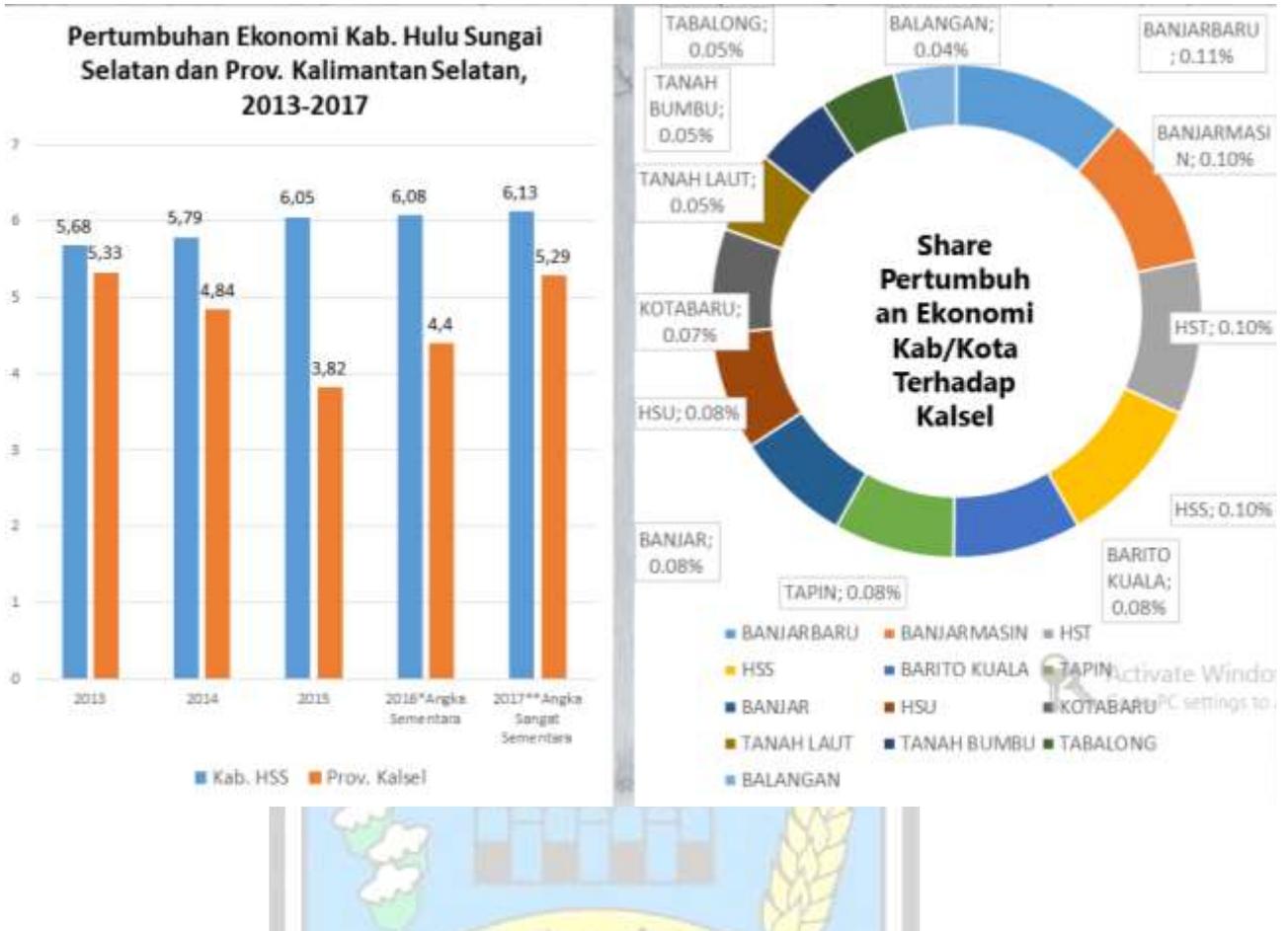
➤ **PENGELUARAN PERKAPITA**

Dari 13 Kab/Kota di Kalsel, Kab. HSS berada pada urutan Ke-4 untuk pengeluaran perkapita yaitu 11.890 Ribu Rupiah/ Org/Tahun. Hal ini dipengaruhi oleh pola daya beli dan tingkat ketenagakerjaan.

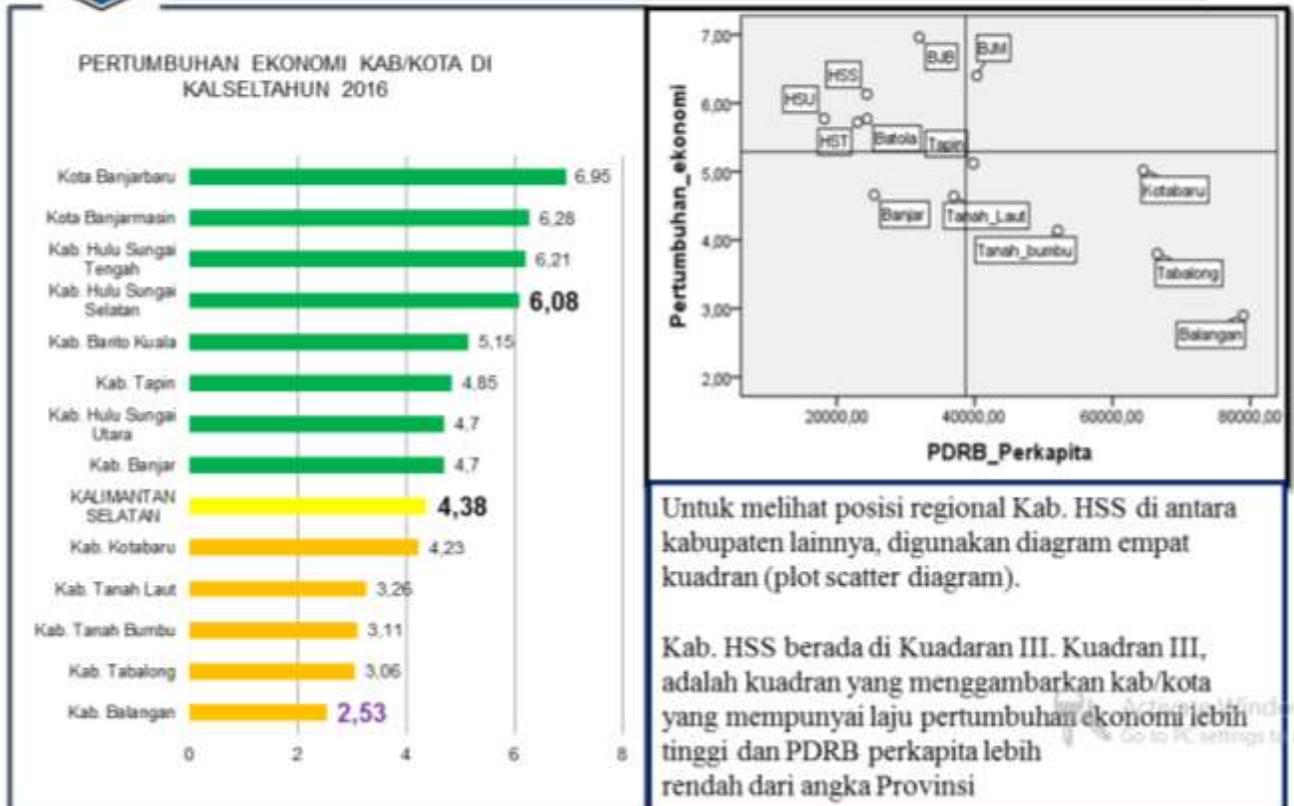


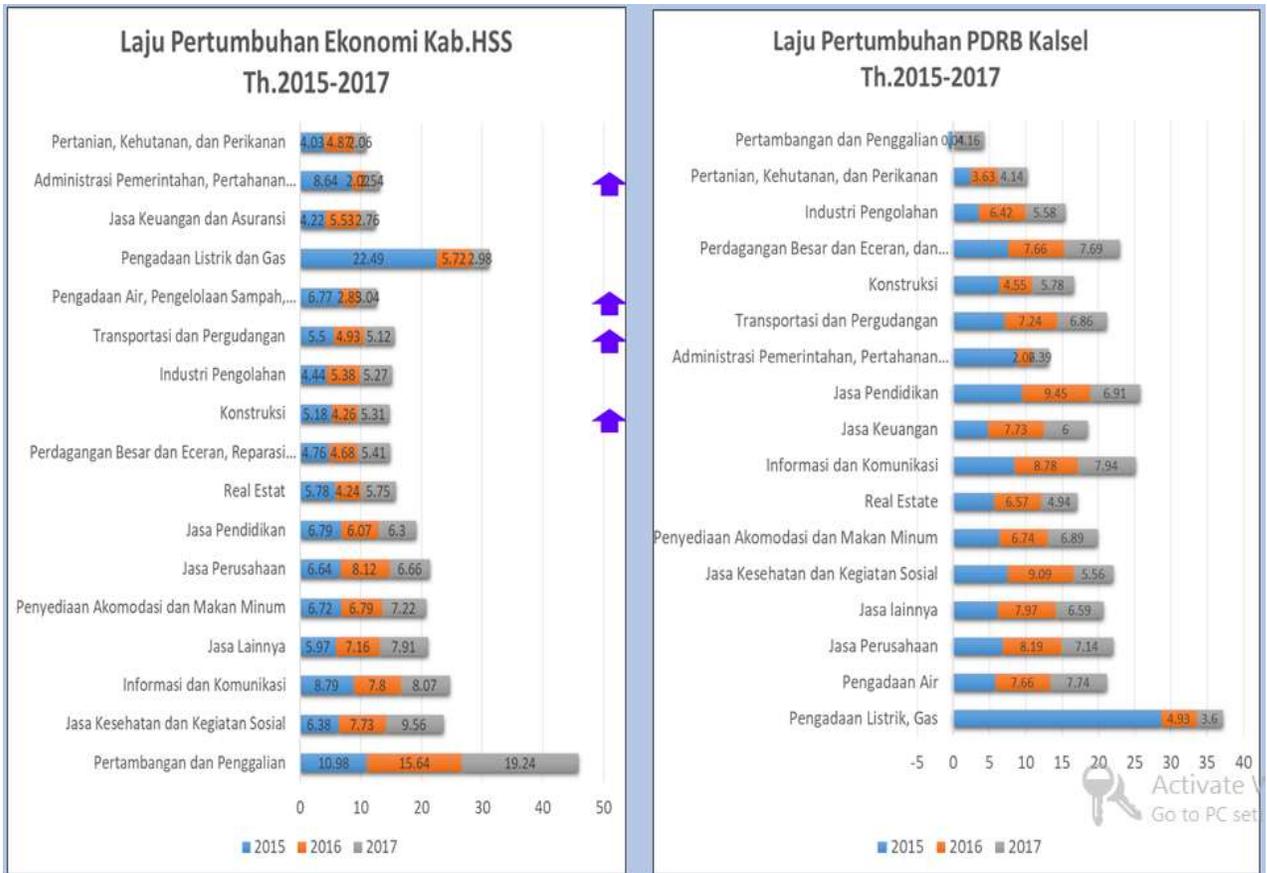


➤ LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



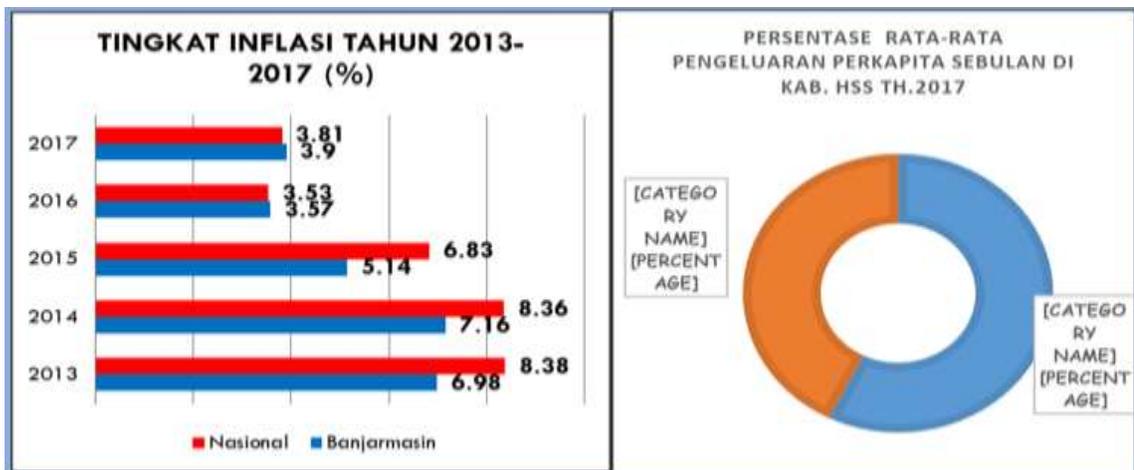
Laju Pertumbuhan dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017





➤ **TINGKAT KEMISKINAN**

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan turun sebesar 0,49% dari 6,29 tahun 2016 menjadi 5,80 tahun 2017 lebih tinggi dari rata-rata Kalsel 4,73, namun masih lebih baik dibandingkan Nasional sebesar 10,64%. Angka Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat bergantung pada naik turunnya Inflasi. Tahun 2017 Inflasi naik sedikit namun terkendali, di angka 3,90 dibanding tahun 2016 sebesar 3,57. Pencapaian pengendalian inflasi diatas target dalam perencanaan tahun 2017. Walaupun PDRB per kapita penduduk semakin meningkat buka berarti bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga meningkat, karena dalam penghitungan PDRB per kapita masih terdapat pengaruh inflasi, sehingga untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk maka kemampuan daya beli juga perlu dilihat atau dibandingkan perkembangannya.





PDRB Total dan PDRB Perkapita Kab. HSS Tahun 2013-2017			
Uraian	2015	2016 ¹⁾	2017 ²⁾
Nilai PDRB (Juta Rp)			
-ADHB	4.782.062,67	5.210.032,20	5.671.876,13
-ADHK	3.740.951,26	3.968.468,58	4.211.711,57
PDRB Perkapita (Rp)			
-ADHB	21.052.166	22.663.251	24.386.041
-ADHK	16.468.861	17.262.542	18.108.133
Pertumbuhan PDRB Perkapita			
ADHK 2010	4,80	4,82	4,90
Jumlah Penduduk (Orang)	227.153	229.889	232.587
Pertumbuhan	1,19	1,20	1,17



1) CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

Dari Hasil capaian pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang pencapaiannya ≤100% dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang pencapaiannya ≥100%.

Hasil capaian pengukuran terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	% Capaian Kinerja Tahun 2017	% Capaian Kinerja Tahun 2018
1	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	- Opini Audit Eksternal	Hasil Audit BPK	WTP	WTP
		- Predikat Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian KemenPAN RB terhadap Akuntabilitas Kinerja pemerintah	86,46% (Predikat BB Nilai 70,03)	93,96% (Predikat BB Nilai 75,18)





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	% Capaian Kinerja Tahun 2017	% Capaian Kinerja Tahun 2018
2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari rerata IKM unit pelayanan yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	101,41	100,80
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Jumlah Peserta belajar yang duduk di PAUD dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 Th dikali 100	99,55%	96,92%
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SD/MI sederajat dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 Th dikali 100	101,04%	100,91%
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SMP/MTs dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 Th dikali 100	100,21%	95,03%
		- Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia 15 th keatas yang melek huruf dibanding dengan Jumlah usia 15 th keatas dikali 100	98,78%	98,83%
		- Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah peserta yang lulus SD/MI sederajat dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SD/MI sederajat dikali 100	100%	100%
		- Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah peserta yang lulus SMP/MTs sederajat dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SMP/MTs dikali 100	100%	100%
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	- Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000	57,23%	-53,03%
		- Angka Kematian Bayi	Jumlah Kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 1.000	42,66%	48,14%
		- Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	Jumlah balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta dibagi dengan Jumlah seluruh balita dikali 100	100%	100%
		- Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	Jumlah pasien miskin yang mendapat pelayanan di PPK II sesuai standar dibagi jumlah miskin di Kab. HSS dikali 100	100%	100% tahun





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	% Capaian Kinerja Tahun 2017	% Capaian Kinerja Tahun 2018
		- Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	Selisih antara desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n-1 dikurangi desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n dibagi jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n-1 dikalikan 100%. Target peningkatan tercapai jika realisasi pada tahun n berkurang 25% atau lebih dari tahun n-1	0%	350,02%
		- Persentase desa dengan kategori siaga aktif	jumlah desa berkategori siaga aktif dibagi jumlah seluruh desa siaga di Kab. HSS dikali 100	147,06%	138,89%
5	Menurunnya persentase kemiskinan	- persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100	168,18%	299,44%
6	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	- persentase ketersediaan pangan utama (beras)	Produksi pangan utama (ton) selama tahun N dibagi total Angka kebutuhan (ton) selama tahun N dikali 100	133,27%	173,13%
7	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	- Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB :	(Luas RTH Publik dibagi dengan Luas Wilayah HPL/HGB Publik) x 100	134,93%	130,43%
		a. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Publik (5,185 Ha)			
		b. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Private (2,593 Ha)	(Luas RTH Privat dibagi dengan Luas Wilayah HPL/HGB Privat) x 100	125,30%	113,91%
		- Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu (%) di bagi dengan jumlah titik kualitas udara yang dipantau (buah) dikali 100	133,33%	107,14%





No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	% Capaian Kinerja Tahun 2017	% Capaian Kinerja Tahun 2018
8	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	- Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$= \frac{K_n - (K_n - 1)}{(K_n - 1)} \times 100\%$ $K_n = \frac{\text{Realisasi PAD tahun berkenaan}}{\text{Realisasi PD tahun berkenaan}}$ $K_{n-1} = \frac{\text{Realisasi PAD tahun 2013}}{\text{Realisasi PD tahun 2013}}$ $K_n = \frac{\text{Kontribusi PAD pendapatan daerah Anggaran 2015}}{\text{Kontribusi PAD pendapatan daerah Anggaran 2013 (sebagai dasar)}}$ $K_{n-1} = \frac{\text{Kontribusi PAD pendapatan daerah Anggaran 2013 (sebagai dasar)}}{\text{Kontribusi PAD pendapatan daerah Anggaran 2013 (sebagai dasar)}}$ <p>PAD = Pendapatan Asli Daerah PD = Pendapatan Daerah (APBI)</p>	502,58%	449,89%
9	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	- Persentase kinerja sistem irigasi	Jumlah total ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam dibagi dengan Jumlah total kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam dikali 100	100%	95,05%
		- persentase penanganan daya rusak air	Jumlah kumulatif panjang DAS yang aman dibagi dengan Jumlah panjang DAS se Kab. HSS dikali 100	100%	100%

2) PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

Hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 9 (sembilan) Tujuan, 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dan 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja kinerja, yang dapat dirincikan bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis, 18 (delapan belas) sasaran strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (delapan) sasaran strategis tidak tercapai dengan pencapaian $\leq 100\%$.

Dan dari 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja sasaran, sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang pencapaian kinerjanya $\leq 100\%$, sedangkan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$.

Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengungkapan capaian kinerja sasaran





dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulaidari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Rincian capaian misi, tujuan, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Kehidupan Beragama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA		
1	Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari.	1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.	1	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	tidak terjadi	tidak terjadi	Tercapai (100%)
		2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	1	Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	100%	100%

Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA				
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.	1	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani.	1	Opini Audit Eksternal	WTP	WTP	Tercapai (100%)		
			2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A	BB (75,18)	93,96			
			3	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	Ada peningkatan	Ada peningkatan	100			
		2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81,65	100,80		
				2	Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari	0,2 hari	465,12		
		3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	Prosentase penerbitan KTP	100,00%	98,75%	98,75		
				2	Prosentase penerbitan akta kelahiran	90,00%	95,02%	105,58		
		2	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	1	Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00%	98,83%	98,83
					2	APK PAUD	75,30%	72,98%	96,92	
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI				100,00%	100,91%	100,91			
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs				99,00%	94,08%	95,03			
5	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI				100,00%	100,00%	100,00			
6	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				100,00%	100,00%	100,00			
7	Angka Partisipasi Murni SD/MI				100,00%	94,29%	94,29			





Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA	
			8	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,29%	76,28%	95,01
		2	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				
			1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	100% (609 RT)	100	100,00
			2	Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%	100	100,00
			3	Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100,00%	100,00%	100,00%
			4	Tidak terjadi konflik social	Tidak terjadi	Tidak terjadi	100,00
			5	Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	52 ormas	130,00
			6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	71,05%	68,89%	96,96
		3	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah				
			1	Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	57,78%	57,78
			2	Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	82,73%	82,73
			3	Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	91,14%	91,14
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan				
			1	Angka Kematian Ibu	54,54	138	-53,03
			2	Angka Kematian Bayi	10	20,77	48,14
			3	Angka kematian neonatal	30	59	50,85
			4	Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,03%	0,00%	100,00
			5	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	21,06%	21,06
			6	Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%	100,00%	100
			7	Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	16,95%	-488%	-2.879,06
			8	Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	28,57%	100,00%	350,02





Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA		
			9	Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100%	100%	100	
			10	Persentase puskesmas yang terakreditasi	19,05%	61,90%	324,93	
			11	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%	100,00%	100	
			12	Persentase desa dengan kategori siaga aktif	72,00%	100,00%	138,89	
			13	Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	80,00%	84,31%	105,39	
			14	Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	77,00%	100%	129,87	
4	Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.	1	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	1	persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,00%	1,40%	140,00
		2	Menjadikan Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga	1	Persentase Pelestarian Budaya Lokal	80,00%	105%	131,25
				2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,69%	16,70%	131,60
				3	Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	50,00%	51,43%	102,86
		3	Menurunnya persentase kemiskinan	1	persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	4,50%	1,50%	299,44
		4	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	70,00%	100,00%	142,86
				2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70,00%	71,91%	102,73
				3	Prosentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70,00%	100,00%	142,86
		5	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Persentase ketersediaan pangan utama (beras)	312,82%	541,59%	173,13
		6	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB:	30,00%	39,00%	130,00
					a. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Publik (5,185 Ha)			
					b. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Private (2,593 Ha)	11,00%	12,53%	113,91





Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
			2 Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	80,00%	85,71%	107,14
		7 Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/ piatu dan penyandang cacat	1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50% (3630 orang)	85,80%	171,59

Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA	
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.	1	Meningkatnya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	1 Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6,60%	6,13%	92,88
			2 Meningkatnya pendapatan per kapita	1 PDRB perkapita (harga konstan)	17.052	18.108	106,19
		3	Meningkatnya produksi hasil pertanian	1 Peningkatan produksi padi pertahun	16.998 ton (produksi padi 284.117 ton)	14.873 ton (produksi padi 268.526 ton)	87,50
				2 Peningkatan produksi karet	728,17 ton	860 ton	118,10
				3 Peningkatan Produksi Kayu Manis	9,43 ton	15 ton	62,87
2	Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	1	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	1 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%	41,61%	100,00
			2 Tingkat pengangguran terbuka	3,10%	2,97%	95,81	
			3 Tingkat partisipasi angkatan kerja.	66,72%	66,72%	100,00	
		2	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	1 Persentase peningkatan koperasi aktif	100% (153 KA)	100% (153 KA)	100,00
				2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,68%	10,50%	66,96
		3	Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif	1 Pembinaan UMKM (Wirausaha Baru)	(45.096 orang)	(47.353 orang)	105,00
3	Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat	1	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	1 Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,21%	140,41%	449,89





Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
			2 Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3,00%	2,78%	92,67

Misi IV : Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.	1 Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1 Persentase kinerja sistem irigasi	85,00%	80,79%	95,05
			2 Persentase penanganan daya rusak air	30,00%	30%	100,00
		2 Meningkatnya jangkauan penggunaan teknologi informasi	1 Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	100,00%	104%	104,17
		3 Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	1 persentase jalan dalam kondisi baik	75,00%	76,82%	102,43
			2 Persentase konektivitas wilayah	100,00%	100,00%	100
		4 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81%	76,94%	100,17
			2 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	62,00%	79,68%	128,52
			3 Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00%	59,62%	101,05
			4 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	16,46%	22,25%	73,97





3) EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

Berikut adalah analisis atas Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 9 (sembilan) Tujuan, 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dan 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja kinerja, yang dapat dirincikan bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis, 18 (delapan belas) sasaran strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (delapan) sasaran strategis tidak tercapai dengan pencapaian $\leq 100\%$.

Dan dari 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja sasaran, sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang pencapaian kinerjanya $\leq 100\%$, sedangkan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$.

MISI 1	MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA
-------------------	--

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai sasaran-sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut;

TUJUAN 1	MEWUJUDKAN NILAI- NILAI AGAMIS SEBAGAI SUMBER DALAM KEHIDUPAN SEHARI- HARI.
---------------------	--

Capaian tujuan pertama yakni **“Mewujudkan nilai-nilai agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari- hari.”** dari realisasi capaian 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 1 (satu) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; KEHIDUPAN YANG KONDUSIF BAGI UMAT BERAGAMA.

Keberhasilan Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada **Tujuan I :Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber dalam kehidupan**





sehari-hari.pada **Misi I : Meningkatkan Kehidupan Beragama** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
1. Tidak terjadi konflik antar umat beragama	Tidak terjadi	Tidak terjadi (0 kejadian)	Tercapai (100%)
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama" adalah Tercapai.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tidak terjadi konflik antar umat beragama	Terjadi (1 kejadian)	Tidak terjadi (0 kejadian)				

Bila dilihat pada tabel diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terjadi konflik antar umat beragama, apabila dibanding dengan tahun 2013 yang pernah terjadi konflik antar umat beragama sebanyak 1 kejadian. Ini menunjukkan bahwa kinerja terhadap capaian indikator sasaran Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama dapat dikatakan tercapai. Hal ini disebabkan antara lain adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran antar pemeluk agama yang disebabkan antara lain adanya kegiatan-kegiatan rutin dari Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), pertemuan Tokoh-tokoh Lintas Agama serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran antar pemeluk agama.
- b. Meningkatnya Solidaritas antar pemeluk agama, seiring dengan meningkatnya Teknologi Informasi yang menyebabkan perubahan pola pikir Kemasyarakatan dalam hubungan antar umat beragama.
- c. Meningkatnya kesadaran dan kesabaran penduduk yang disebabkan antara lain adanya kegiatan-kegiatan Penyuluhan Rutin kepada Kemasyarakatan terkait dengan peningkatan rasa Solidaritas, Sosialisasi/penyuluhan tentang Kamtramtibmas, serta upaya Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Islam.





- d. Penggalangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam upaya menciptakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap adanya Potensi Konflik Sosial.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Tidak terjadi konflik antar umat beragama	Terjadi (1 kejadian)	Tidak terjadi						

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018 dengan SKPD yang selaku *leading sector* adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol Kab. Hulu Sungai Selatan:

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal:

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Tidak terjadi konflik antar umat beragama.

Kegiatan untuk mendukung program tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Terhadap Terjadi Konflik
 - Adapun untuk alokasi anggaran pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 119.447.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 112.759.000,-
- b. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama
 - Adapun untuk alokasi anggaran pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 154.420.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp. 153.820.000,-

SASARAN 2; MEWUJUDKAN TATANAN SOSIAL KEAGAMAAN.

Keberhasilan Pencapaian target kinerja sasaran 2 pada **Tujuan I :Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari- hari.** pada **Misi I : Meningkatkan Kehidupan Beragama** adalah sebagai berikut:





INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Persentase kelulusan Khatam Al-quran" adalah sebesar 100% atau Tercapai.

Adapun penjelasan ataupun formulasi atas realisasi pencapaian indikator Persentase kelulusan Khatam Al-quran sebagaimana tabel-tabel dibawah :

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase kelulusan Khatam Al-quransiswa SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang khatam Qur'an dibagi dengan jumlah siswa SD/MI dikali 100	$\frac{(3.356)}{(3.356)} \times 100 = 100\%$

Perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja sasaran Persentase kelulusan Khatam Al-quran ini didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2005 tentang ketentuan Khatam Al Qur'an pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perda ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Nuansa Keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Khatam Al Qur'an adalah berhasilnya seseorang menyelesaikan membaca Al Qur'an dengan Ilmu Tajwid dan dari Juz pertama sampai dengan Juz tiga puluh dan mampu menulis huruf Al Qur'an dengan baik





dan benar pada semua jenjang pendidikan formal yang di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khatam Al Qur'an sebagai muatan lokal dan ekstra kurikuler bagi pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Khatam Al Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik dapat membaca dengan fasih, menulis, memahami dan menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an. Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang pendidikan diwajibkan Khatam Al Qur'an. Bagi peserta didik yang Khatam Al Qur'an diberikan sertifikat sebagai tanda pengakuan dan bukti terhadap prestasi baca Al Qur'an.

MISI 2	MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH
-------------------------	--

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai sasaran-sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut;

TUJUAN 1	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI.
---------------------------	--

Capaian **Tujuan I** yakni "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani.**" Pada **Misi II : Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah** dari realisasi capaian 14 sasaran dengan 48 indikator kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 14 (empat belas) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 ; PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA MELAYANI.

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada Tujuan II : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani** pada **Misi II :**





Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
1. Opini Audit Eksternal	WTP	WTP	100
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja	A (80,01)	BB (75,18)	93,96
3. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	A (80,01)	BB (75,18)	93,96
Rata-rata			97,99

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Opini Audit Eksternal	WTP	WTP	100% (Tercapai)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Opini Audit Eksternal dari BPK pada tahun 2018 telah tercapai, dari target penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana realisasi di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan penilaian dari hasil audit BPK RI dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Opini Audit Eksternal	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Opini Audit Eksternal di tahun 2018 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana capaian Tahun 2018 ini adalah dalam mempertahankan opini yang sudah diraih pada tahun 2014. Capaian opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang kelima ditetapkan oleh audit BPK dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini tak lepas dari faktor pendukung seperti halnya :

- a. Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD.
- b. Pembinaan dan pengawasan dari inspektorat kabupaten hulu sungai selatan yang lebih optimal, serta





- c. Terlaksananya SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) yang lebih baik.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Opini Audit Eksternal	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018 seperti pada tabel dibawah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu melalui :

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	595.550.000	468.325.760	78,64
	Reviu atas Laporan Keuangan	148.175.000	107.925.000	72,84
	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	99.620.000	97.436.480	97,81

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Predikat Akuntabilitas Kinerja	A (80,01)	BB (75,18)	93,96

Pada indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari target Berpredikat A (80,01), terealisasi Berpredikat BB dengan nilai hasil evaluasi sebesar 75,18, yang berarti Tidak Tercapai atau sebesar 93,96%.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 oleh Kementerian





Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai		Bobot	2018
			Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,36
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,15
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,43
d.	Evaluasi Kinerja	10	7,08
e.	Capaian Kinerja	20	12,16
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,18
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)

Sumber data. Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 KemenPAN RB Nomor B/1181/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan dalam rangka lebih mengefektifkan manajemen kinerja, rekomendasi KemenPAN RB yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta mekanisme monev kinerja secara berkelanjutan.
2. Memastikan bahwa aplikasi manajemen kinerja (e-sakip) /e-SEPAKAT (Sistem Elektronik Perencanaan, Anggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi) yang telah direncanakan di akhir tahun 2018 dapat di implementasikan di tahun 2019 dan pelaporannya di update secara berkala untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi percepatan pencapaian target kinerja.
3. Mendorong percepatan pengimplementasian aplikasi yang sudah ada, dengan mengintegrasikan e_planning, e-budgeting dan e-performance sehingga dapat menciptakan performance based budgeting (e-SEPAKAT). Dengan pengintegrasian aplikasi tersebut nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu, dan akan dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment. Hal ini diharapkan akan dapat semakin menumbuhkan budaya kinerja di kabupaten HSS sampai ke level individu.
4. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan meningkatkan kompetensi evaluator. Peningkatan kompetensi evaluator dilakukan





secara berkelanjutan sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran.

5. Meningkatkan kualitas dan cakupan evaluasi program/kegiatan, dengan lebih memfokuskan kepada hasil (outcome), sehingga dapat meningkatkan capaian hasil program prioritas pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Kab. HSS.

Adapun perbandingan capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 s.d 2018 adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Bobot	2014	2015	2016	2017	2018
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	19,42	19,42	22,96	24,36	25,36
b. Pengukuran Kinerja	25	10,39	12,35	17,23	18,89	19,15
c. Pelaporan Kinerja	15	7,87	8,77	9,90	10,66	11,43
d. Evaluasi Kinerja	10	3,98	5,29	5,51	6,04	7,08
e. Capaian Kinerja	20	11,73	14,49	9,83	10,08	12,16
Nilai Hasil Evaluasi	100	52,98	60,32	65,43	70,03	75,18
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC (Cukup)	B (Baik)	B (Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Capaian kinerja indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2012 s.d 2018 adalah sebagai berikut :

Ket	Nilai SAKIP 2012	Nilai SAKIP 2013	Nilai SAKIP 2014	Nilai SAKIP 2015	Nilai SAKIP 2016	Nilai SAKIP 2017	Nilai SAKIP 2018	Capaian Kinerja
Nilai Hasil Evaluasi	51,43	50,14	52,98	60,32	65,43	70,03	75,18	Naik
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	Naik

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
								2017	2018
Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A





Apabila dilihat pada tabel diatas, capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2012 s.d tahun 2018 terus naik, dan pencapaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 naik 5,15 dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi di tahun 2017.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
- Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	95.010.000	87.370.000
- Penilaian mandiri program reformasi birokrasi(PMPRB)	28.455.000	27.160.000
- Penerapan sistem pengendalian interm pemerintah (SPIP)	18.270.000	17.856.250
- Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemkab.	28.560.000	28.517.200
Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah		
- Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	277.024.860	239.077.700

SASARAN 2; MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Pencapaian target kinerja sasaran 2 pada Tujuan 2 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani** pada Misi II : **Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81,65	100,80
Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari	0,2 hari	500,00
Rata-rata			300,40





Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan publik yang prima mencapai 300,40%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	79,30	79,32	81,06	81,13	81,65	80	81
Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	> 2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	0,43 hari	0,2 hari	2 hari	2 hari

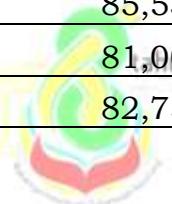
Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81,65	100,80

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 telah tercapai, hal ini dilihat dari capaian kinerja sebesar 100,80% dimana terealisasi 81,65 dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 81.

Tabel inventarisasi Unit Pelayanan/ SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 Semester II

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM TH. 2018
1	Badan Kepegawaian Daerah	84,50
2	Badan Keuangan Daerah	85,25
3	Bagian Ekobang dan TU Setda	80,39
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	75,83
5	Bagian Umum Setda	79,94
6	Bagian Organisasi dan PAD Setda	83,36
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,53
8	Dinas Ketahanan Pangan	81,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,75





NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM TH. 2018
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85,11
11	Dinas Perdagangan	72,25
12	Dinas Perhubungan	81,58
13	Dinas Perikanan	86,57
14	Dinas Pertanian	83,11
15	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	84,28
16	Dinas PPKBP3A	81,22
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86,44
18	Dinas Sosial	83,50
19	Dinas Kesehatan	95,50
20	Kecamatan Daha Barat	80,39
21	Kecamatan Daha Utara	81,19
22	Kecamatan Padang Batung	81,33
23	Kecamatan Sungai Raya	80,94
24	Kecamatan Telaga Langsung	81,17
25	Kecamatan Daha Selatan	80,89
26	Kecamatan Kandangan	80,22
27	Kecamatan Simpur	79,06
28	Kecamatan Kalumpang	80,61
29	Kecamatan Loksado	79,89
30	Kecamatan Angkinang	79,61
31	Kelurahan Jambu Hilir	84,69
32	Kelurahan Kandangan Barat	80,64
33	Kelurahan Kandangan Utara	81,75
34	Kelurahan Kandangan Kota	78,81
35	Puskesmas Bajayau	78,72
36	Puskesmas Baruh Jaya	81,25
37	Puskesmas Batang Kulur	80,92
38	Puskesmas Bayanan	77,39
39	Puskesmas Jambu Hilir	81,00
40	Puskesmas Kaliring	81,25
41	Puskesmas Loksado	81,03
42	Puskesmas Malinau	83,67
43	Puskesmas Negara	82,97
44	Puskesmas Padang Batung	80,03
45	Puskesmas Pasungkan	81,00
46	Puskesmas Sungai Raya	81,19
47	Puskesmas Telaga Langsung	81,08
48	Puskesmas Wasah	81,19
49	Puskesmas Angkinang	81,22





NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM TH. 2018
50	Puskesmas Gambah	81,14
51	Puskesmas Bamban	81,14
52	Puskesmas Kalumpang	80,25
53	Puskesmas Kandangan	81,03
54	Puskesmas Simpur	80,56
55	Puskesmas Sungai Pinang	81,39
56	RSUD Brigjend H. Hasan Basry	83,42
JUMLAH		4572,14
NILAI IKM KAB (RATA-RATA)		81,65

Tabel : Nilai Persepsi, Interval DPP, Interval Konversi DPP, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval DPP	Nilai Interval Konversi DPP	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 terealisasi 81,65 dari yang ditargetkan sebesar 81 pada target RPJMD HSS tahun 2018. Capaian ini didapatkan dengan cara mengambil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 56 (lima puluh enam) unit kerja yang melaksanakan pengukuran survey kepuasan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 semester II.

Apabila dilihat dari tabel nilai persepsi mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, dari 56 (lima puluh enam) Unit pelayanan/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang termasuk dalam kategori baik/ “B” dengan nilai interval konversi DPP 62,51 - 81,25 sebanyak 36 (tiga puluh enam) Unit pelayanan/ SKPD dan 20 (dua puluh) kinerja Unit pelayanan/ SKPD berkategori sangat baik/ “A”. Sedangkan 0 (nol) Unit pelayanan/ SKPD yang kinerja unit pelayanannya kurang baik/ tidak baik.

Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 ini didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) yang telah dilaksanakan serta telah dipedomani oleh unit pelayanan/ SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/ user.





Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	79,30	79,32	81,06	81,13	81,65	Naik	80	81

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu berupa :

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah			
	Kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	55.711.120	44.866.800	80,53

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari	0,2 hari	500,00

Persentase capaian indikator Rata-rata Lama proses perijinan (hari) pada tahun 2018 Tercapai.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
					2017	2018
Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari	2 hari	0,43 hari	0,2 hari	2 hari	2 hari

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu:





<i>Program/ Kegiatan</i>	<i>Pagu (Rp.)</i>	<i>Realisasi (Rp.)</i>
<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>		
Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	220.522.500,-	214.370.000

SASARAN 3; MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencapaian target kinerja sasaran 3 pada Tujuan 1 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani** pada Misi II : **Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Prosentase penerbitan KTP	100,00%	98,75%	98,75
Prosentase penerbitan akta kelahiran	90,00%	95,02%	105,58
Rata-rata			102,16

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan mencapai 102,16%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Prosentase penerbitan KTP	92,86	95,56	99,49	99,44	107,21	98,75	95,78	100
Prosentase penerbitan akta kelahiran	93,60	96,41	96,99	98,09	97,95	95,02	90	90

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Prosentase penerbitan KTP	100,00%	98,75%	98,75

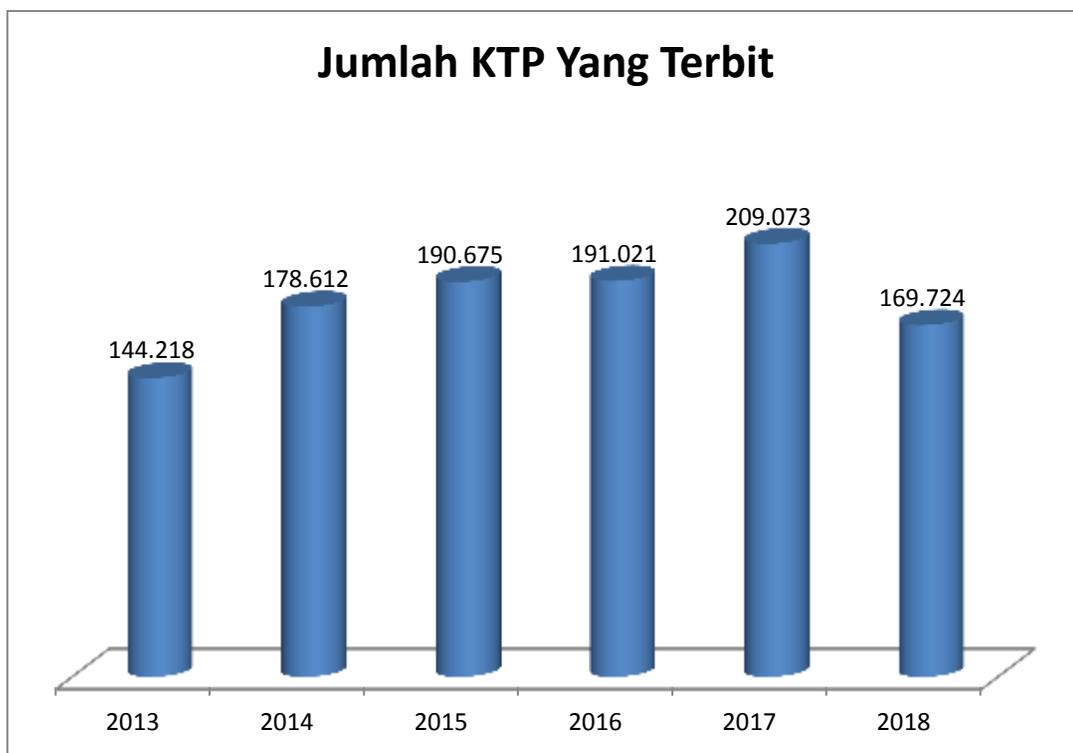
Persentase capaian indikator Prosentase penerbitan KTP pada tahun 2018 tercapai 98,75%, dari 100% yang ditargetkan pada tahun 2018 terealisasi 98,75% atau tercapai.





Adapun cara perhitungan realiasi pada tahun 2018 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Prosentase penerbitan KTP	Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP (17 tahun ke atas) dikali 100	$\frac{169.724}{171.868} \times 100\%$ = 98,75%



Sumber Data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

Tabel realisasi Persentase Penduduk yang memiliki (KTP) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Prosentase penerbitan KTP	92,86	95,56	99,49	99,44	107,21	98,75	95,78	100

Sumber Data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

Dalam pencapaian indikator Persentase Penduduk yang memiliki (KTP) didukung oleh program sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dlm bid.kependudukan	334.322.800	322.394.800	96,43





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Prosentase penerbitan akta kelahiran	90,00%	95,02%	105,58

Persentase capaian indikator Prosentase penerbitan akta kelahiran pada tahun 2018 tercapai 105,58%, dari 90% yang ditargetkan pada tahun 2018 terealisasi 95,02%.

Formulasi Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Persentase kepemilikan akta kelahiran sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Prosentase penerbitan akta kelahiran	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh kutipan akta kelahiran yg diterbitkan pada tahun x dibagi Jumlah kelahiran yg terjadi pada tahun x dikali 100	$\frac{1.549 \text{ lbr} \times 100}{1.627 \text{ orang}}$ $= 95,02\%$

Jumlah Akta Lahir yang terbit sebanyak 1.549 lembar, sedangkan Jumlah kelahiran yg terjadi pada tahun 2018 adalah 1.627 orang, Sehingga Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 95,02%.

Realisasi pada tahun ini masih belum mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan :

- Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Memiliki Akta Kelahiran contohnya ketika anak mau memasuki usia sekolah ataupun ketika ingin mengurus BPJS anak.
- Kondisi wilayah atau daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cukup luas dan masih banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal dipelosok atau daerah terpencil sehingga mereka memerlukan biaya lebih untuk transportasi membuat Akta Kelahiran.
- Kurangnya sosialisasi, selain hal tersebut, bagi masyarakat lebih senang menyerahkan pengurusannya pada pihak ke 3 yang tentu saja memungut upah atau biaya lebih.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Penyampaian informasi kepada masyarakat, bahwa Akta Kelahiran sangat diperlukan karena adanya kebijakan pemerintah seperti pengurusan BPJS, pengurusan jaminan





- kesehatan bagi warga miskin, bantuan perumahan, bantuan kompor gas, masuk sekolah, dll.
- b. Meningkatkan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran salah satunya dengan melaksanakan pola pelayanan keliling jemput bola.

Sesuai amanat Undang-undang dalam waktu 60 hari setelah bayi lahir seharusnya telah dicatatkan kelahirannya. Untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diprioritaskan pada penduduk kelompok umur 0-19 tahun sebagai target penduduk yang wajib memiliki kutipan akta kelahiran, mengingat pada kelompok usia ini kepentingan penduduk cukup produktif dalam menggunakan kutipan akta kelahiran untuk urusan administrasi Kependudukan.

Walaupun telah dilakukan pembesasan biaya pencatatan namun masyarakat tidak begitu terpengaruh. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencari upaya agar masyarakat berkenan untuk menyiapkan berkas sehingga pencatatan sipil dapat segera dilakukan.

Salah satu upaya dimaksud adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, kemudian dilanjutkan dengan pola pelayanan jemput bola, dan hambatan yang terjadi sering masyarakat tidak siap dengan kelengkapan berkas ketika dijemput kelapangan.



Gambar diatas merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, dalam rangka merespon permintaan masyarakat dengan pola pelayanan jemput bola dengan mobil keliling.





Data Perbandingan Akta Kelahiran Yang Terbit

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh kutipan akta kelahiran yg diterbitkan	3.524	3.465	3.154	2.818	1.844	1.549

Grafik Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh kutipan akta kelahiran yang diterbitkan



Perbandingan persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun – tahun sebelumnya.

Tabel Perbandingan dengan realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Prosentase penerbitan akta kelahiran	93,60	96,41	96,99	98,09	97,95	95,20	90%	90%

Dalam pencapaian indikator Prosentase penerbitan akta kelahiran didukung oleh program sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dlm bid.kependudukan	54.583.000	52.833.000	96,79




**TUJUAN
2**
**MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN MUTU
PENDIDIKAN**

Capaian **tujuan kedua** yakni **“Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan”** pada **Misi II “Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”**, dari realisasi capaian 3 sasaran dengan 17 indikator sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 3 (tiga) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada **Tujuan II : Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan** di **Misi II “Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00%	98,83%	98,83
APK PAUD	75,30%	72,98%	96,92
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00%	100,91%	100,91
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,00%	94,08%	95,03
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00
Angka Partisipasi Murni SD/MI	100,00%	94,29%	94,29
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	80,29%	76,28%	95,01
Rata-rata			97,62 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Pendidikan telah mencapai kinerja 97,62%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA	REALISASI						TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,47%	98,08%	98,12%	98,78%	98,83%	98,83%	100%	100%
APK PAUD	47,61%	60,83%	62,24%	62,85%	72,98%	72,98%	70,80%	100%
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	107,87%	102,90%	103,18%	102,4%	101,04%	100,91%	100%	100%
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	100%	93,62%	94,49%	95,69%	97,29%	94,08%	100%	100%
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,20%	99,8%	94,6%	100%	100%	100,00%	100%	100%
Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,6%	88,58%	94,8%	94,08%	95,03%	94,29%	98,91%	100%
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	69,21%	71,46%	75,64%	77,36%	80,44%	76,28%	78,78%	80,29%

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara).

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018, melek huruf merupakan salah satu indikator sasaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun realisasi dari indikator Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2018 sebesar 98,98% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca 176.236 dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 178.047) dikali 100% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,98%. Walaupun realisasi tidak tercapai namun jika





dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 98,83% maka angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,15%.

**PERSENTASE PENDUDUK YANG BERUSIA > 15 TAHUN
MELEK HURUF (TIDAK BUTA AKSARA)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2018	Capaian
1	2	3	4
Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00%	98,98	98,98
Capaian Kinerja			98,98%

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) tercapai 98,98% terealisasi 98,98% dari 100% yang ditargetkan.

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di kali 100%	$\frac{175.236}{178.047} \times 100 = 98,98\%$

Angka ini diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator sebesar 98,98% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca sebanyak 176.236 orang dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas sebanyak 178.047 orang) dari 100% yang ditargetkan. Realisasi tersebut masih dibawah dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

Belum tercapainya realisasi terhadap target tersebut dan capaian realisasi tahun sebelumnya disebabkan karena penduduk usia 15 tahun plus yang di intervensi pada tahun sebelumnya kembali lagi seperti keadaan awalnya yaitu dalam posisi buta aksara kembali. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan penjaminan kualitas pembelajaran yang terus menerus melalui program yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.





Berikut tabel pencapaian Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 :

**Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Dari Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018**

NO	TAHUN	Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1	2013	98,47%
2	2014	98,08%
3	2015	98,12%
4	2016	98,77%
5	2017	98,83%
6	2018	98,98%

TARGET DAN REALISASI PERSENTASE PENDUDUK YANG BERUSIA > 15 TAHUN MELEK HURUF (TIDAK BUTA AKSARA)

Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target RPJMD	
					2017	2018
PERSENTASE PENDUDUK YANG BERUSIA > 15 TAHUN MELEK HURUF (TIDAK BUTA AKSARA)	98,12 %	98,78 %	98,83 %	98,83 %	100 %	100 %

Dari tabel diatas terlihat pencapaian Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) meningkat setiap tahunnya. Realisasi tahun 2013 98,47%, tahun 2014 98,08%, tahun 2015 98,12%, tahun 2016 98,77%, tahun 2017 sebesar 98,83% dan tahun 2018 sebesar 98,98%. Walaupun meningkat setiap tahunnya tetapi angka tersebut berada dibawah dari yang ditargetkan yaitu sebesar 100%.

Keberhasilan peningkatan Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun didukung dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah daerah yang cukup memadai untuk bidang pendidikan serta meningkatnya aksesibilitas pendidikan non formal





Peningkatan angka melek huruf juga terkait dengan perluasan dan peningkatan pendidikan non formal. Beberapa data terkait dengan pendidikan non formal antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah PKBM aktif sebanyak 15 lembaga;
2. Jumlah lembaga yang terakreditasi B sebanyak 1 (satu) lembaga dan yang terakreditasi C sebanyak 2 (dua) lembaga, sedangkan lembaga yang belum terakreditasi sebanyak 12 lembaga;
3. Jumlah lembaga menurut kepemilikan bangunan sebanyak 3 bangunan dengan status milik sendiri dan 12 bangunan statusnya pinjam pakai.

Dalam pencapaian indikator ini didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pendidikan Non Formal			
Kegiatan Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	192.942.500	180.483.000	93,54
Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	987.799.600	965.669.600	97,76
Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU	589.938.720	579.658.720	98,26

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI.

PERSENTASE ANGKA KELULUSAN (AL) SD/MI

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%
Capaian Kinerja			100%

Apabila dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja angka kelulusan (AL) SD/MI 100% terealisasi 100% dari target 100%.

Pendidikan yang ditamatkan/angka lulusan dengan menggunakan perhitungan :





INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah peserta yang lulus SD/MI sederajat dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SD/MI sederajat dikali 100%	$\frac{3.877}{3.877} \times 100\% = 100\%$

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa formulasi indikator kinerja Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI didapatkan dari pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI (3.877) dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya (3.877) dikali 100.

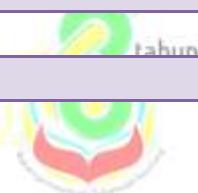
Realisasi Persentase Angka Kelulusan(AL) SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI tahun 2018 sebesar 100%. Tahun 2018 sebesar 100% sesuai dengan target RPJMD tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Untuk tahun 2018 persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI target RPJMD sebesar 100%.

Angka Kelulusan SD/MI/Paket A Per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
1	PADANG BATUNG	348	348
2	LOKSADO	156	156
3	TELAGA LANGSAT	181	181
4	ANGKINANG	334	334
5	KANDANGAN	795	795
6	SUNGAI RAYA	236	236
7	SIMPUR	257	257
8	KALUMPANG	102	102
9	DAHA SELATAN	727	727





No	Kecamatan	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
10	DAHA UTARA	554	554
11	DAHA BARAT	187	187
	J U M L A H	3.877	3.877

Pencapaian persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI tersebut diperoleh melalui program/kegiatan sebagai berikut :

TABEL
PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung PERSENTASE ANGKA KELULUSAN (AL) SD/MI

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
	Pelaksanaan ujian sekolah (US) SD	694.312.500	672.819.500

Melalui kegiatan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan diatas sebagai upaya untuk meningkatkan angka kelulusan (AL) SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upaya-upaya lain juga terus dilakukan dalam peningkatan mutu dan kualitas lulusan SD/MI seperti peningkatan mutu pembelajaran di sekolah karenanya kepemimpinan Kepala Sekolah dan kreatifitas guru yang professional, inovatif, kreatif, merupakan salah satu tolok ukur dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs.

PERSENTASE ANGKA KELULUSAN (AL) SMP/MTs

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%
		Capaian Kinerja	100%

Apabila dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja angka kelulusan (AL) SMP/MTs 100% terealisasi 100% dari 100% yang ditargetkan. Realisasi angka kelulusan SMP/MTs ini diperoleh dari angka





pendidikan yang ditamatkan/angka lulusan dengan menggunakan perhitungan jumlah lulusan dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu dikali 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah lulusan 2.852 dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu 2.852 dikali 100%.

Pendidikan yang ditamatkan/angka lulusan dengan menggunakan perhitungan :

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah peserta yang lulus SMP/MTs sederajat dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SMP/MTs dikali 100 %	$\frac{2.852}{2.852} \times 100\% = 100\%$

Realisasi angka kelulusan SMP/MTs ini diperoleh dari angka pendidikan yang ditamatkan/angka lulusan dengan menggunakan perhitungan jumlah lulusan dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu dikali 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah lulusan 2.852 dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu 2.852 dikali 100%.

Realisasi Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,20 %	99,79%	94,6%	100%	100%	100%	Tetap	100%	100%

Pencapaian persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs tersebut diperoleh melalui program/kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
	Pelaksanaan ujian sekolah (US) SMP	1.184.941.000	1.167.904.000





Melalui kegiatan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan diatas sebagai upaya untuk meningkatkan angka kelulusan (AL) SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upaya-upaya lain juga terus dilakukan dalam peningkatan mutu dan kualitas lulusan SMP/MTs seperti peningkatan mutu pembelajaran di sekolah karenanya kepemimpinan kepala sekolah dan kreatifitas guru yang professional, inovatif, kreatif, merupakan salah satu tolok ukur dalam Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (PAUD,SD,SLTP) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat peserta didik yang berasal dari kabupaten tetangga atau sekolah-sekolah yang terletak di daerah perbatasan.

1. APK Pendidikan Anak Usia Dini.

APK PAUD TAHUN 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2018	% Capaian
APK PAUD	75,30%	73,56	97,69
Capaian Kinerja			97,69%

Apabila dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja APK PAUD tercapai 97,69% terealisasi 73,56% dari 75,30% yang ditargetkan. Pencapaian Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di PAUD dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4 – 6 Tahun dikali 100%. Realisasi APK PAUD tahun 2018 sebesar 73,56% (Jumlah siswa PAUD usia 4 – 6 tahun 17.480 siswa dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun 23.762).

Angka Partisipasi Kasar PAUD dicapai melalui peningkatan persentase jumlah penduduk jenjang PAUD yang mendapatkan pelayanan pendidikan di jenjang PAUD.





formulasi realisasi indikator kinerja Persentase APK PAUD

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Jumlah Peserta belajar yang duduk di PAUD usia 4 - 6 tahun dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 Th dikali 100 %	$\frac{17.480}{23.762} \times 100\% = 73,56\%$

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD dapat dicapai karena terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk jenjang PAUD yang mendapatkan pelayanan pendidikan di jenjang PAUD.

Pencapaian realisasi terhadap target indikator kinerja APK PAUD sebesar 75,30% dilakukan melalui dukungan Program/Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG APK PAUD

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pembangunan gedung sekolah	402.850.000	401.131.500
	Pengadaan mebeluer sekolah	82.985.000	79.025.000
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	216.100.000	194.345.000
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	676.060.000	675.050.000
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	22.159.000	22.159.000

Kegiatan diatas dimaksudkan untuk mendukung peningkatan APK PAUD. Walaupun upaya dalam peningkatan APK dan mutu layanan PAUD telah banyak dilakukan namun masih ditemukan sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi. Ke depan Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan APK PAUD akan memprogramkan kegiatan pembangunan 1 (satu) TK Pembina di setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.





**Pencapaian APK PAUD
Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
APK PAUD	47,61	60,83	62,24	62,85	72,98	73,56	Naik	70,80 %	75,30 %

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2013 APK PAUD 47,61%, tahun 2014 APK PAUD mengalami kenaikan sebesar 60,83%, tahun 2015 sebesar 62,24% dan tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 62,85%, dan tahun 2017 terealisasi 72,98% dan tahun 2018 terealisasi 73,56% dari target 75,30%.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.

**TABEL
APK SD/MI TAHUN 2018**

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian
APK SD/MI	100,00%	100,91%	100,91
		Capaian Kinerja	100,91%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja APK SD/MI 100,91% terealisasi 100,91% dari 100% yang ditargetkan.

Hasil capaian APK SD/MI ini dihitung dari jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya dikali 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah siswa 25.290 orang dibagi jumlah penduduk 7 - 12 tahun 25.062 orang dikali 100%. Meningkatnya APK SD/MI tersebut disebabkan meningkatnya jumlah siswa jenjang SD/MI.





Tabel
formulasi realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SD/MI sederajat dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 Th dikali 100 %	$\frac{25.290}{25.062} \times 100\% = 100,91\%$

Pencapaian APK SD/MI/Paket A didukung melalui program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dengan kegiatan penambahan ruang kelas sekolah. Berikut tabel program dan kegiatan yang mendukung APK SD/MI :

TABEL
PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung APK SD/MI

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
	Penambahan ruang kelas sekolah	658.400.000	631.522.000

Realisasi Persentase APK SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
APK SD/MI	107,87 %	102,90	103,18	102,4	101,04	100,91	Turun	100%	100%



4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.

TABEL
APK SMP/MTs TAHUN 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2018	Capaian
APK SMP/MTs	99,00%	94,08%	95,03%
		Capaian Kinerja	95,03%

Apabila dilihat dari tabel diatas capaian kinerja APK SMP/MTs tahun 2017 sebesar 95,03% terealisasi 94,08% dari 99,00% yang ditargetkan. Hasil capaian ini dihitung dari jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya dikali 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah siswa 11.255 orang dibagi jumlah penduduk 12.084 dikali 100%.

Tabel
formulasi realisasi indikator kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SMP/MTs dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 Th dikali 100 %	$\frac{11.255}{12.084} \times 100\% = 94,08\%$

Pencapaian APK SMP/MTs tersebut didukung oleh program/kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL
PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG APK SMP/MTs

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
Penambahan ruang kelas sekolah	658.400.000	631.522.000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP	117.950.000	112.560.000





TABEL
PENCAPAIAN APK SMP/MTs
DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
APK SMP/MTs	92,88	93,62	94,49	95,69	97,29	94,08	Turun	97,49	99%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi APK SMP/MTs dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2013 realisasi 92,88%, tahun 2014 realisasi 93,62%, tahun 2015 naik menjadi 94,49%, tahun 2016 naik kembali menjadi 95,69% dan tahun 2017 terealisasi 97,29%, pencapaian tahun 2018 terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya 94,08%. Apabila dibandingkan target APK SMP/MTs tahun 2018 sebesar 99% maka realisasi APK SMP/MTs dibawah dari target yang ditetapkan.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM=100% karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah, kota atau daerah perbatasan.

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.

TABEL
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI TAHUN2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2018	Capaian
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	100,00%	94,29%	94,29
Capaian Kinerja			94,29%





Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja APM SD/MI 94,29% terealisasi 94,29% dari 100% yang ditargetkan. Pencapaian APM SD/MI ini diperoleh dari jumlah siswa usia 7-12 sebanyak 23.630 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 sebanyak 25.062 di kali 100%.

Belum tercapainya realisasi kinerja terhadap target kinerja ini disebabkan masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 7 -12 tahun menyebabkan pencapaian APM SD/MI masih belum terpenuhi. Hal tersebut juga karena adanya peningkatan jumlah peserta didik yang duduk di SD sederajat dengan umur masih dibawah 7 tahun. Peserta didik yang baru berumur 5-6 tahun sudah duduk di kelas 1 SD sederajat, kedepan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu membuat regulasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan ketentuan bahwa peserta didik yang duduk dikelas 1 SD/sederajat sudah berumur minimal 7 tahun, selain itu juga perlu diperbaiki mutu belajar, agar peserta didik yang belajar di sekolah dasar sederajat diharapkan sudah lulus sekolah dasar ketika mereka berumur 12-13 tahun.

Tabel
formulasi realisasi indikator kinerja Persentase Angka Partisipasi Murni
SD/MI

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Angka Partisipasi Murni SD/MI	jumlah siswa usia 7-12 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 di kali 100%.	$\frac{23.630}{25.062} \times 100\% = 94,29\%$

Berikut tabel pencapaian APM SD/MI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL
REALISASI APM SD/MI DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
APM SD/MI	94,6	88,58	94,8	94,08	95,03	94,29	Turun	100%	100%





Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tersebut didukung oleh program/kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL
PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
Penyediaan beasiswa siswa berprestasi/kurang mampu SD	180.432.000	175.548.000

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.

TABEL
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTs

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2018	Capaian
1	2	3	4
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	80,29%	76,28%	95,01
		Capaian Kinerja	95,01%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi APM SMP/MTs tahun 2018 sebesar 76,28% dari 80,29% yang ditargetkan dengan capaian 95,01%. Pencapaian APM SMP/MTs ini diperoleh dari jumlah siswa usia 13 - 15 tahun sebanyak 9.218 dibagi jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 12.084 di kali 100%.

Dalam rangka meningkatkan capaian pada indikator-indikator yang masih belum mencapai target tersebut tentu diperlukan segala upaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan secara bertahap mulai berbenah melalui program-program yang dicanangkan dalam setiap tahun anggaran, hingga dari data dapat dilihat tingkat capaian Dinas Pendidikan dari bertambahnya sarana prasarana sekolah, jumlah ruang kelas dan bangunan sekolah dimana upaya tersebut untuk memenuhi keterbatasan daya tampung sekolah, faktor dominan dalam meninggikan nilai APK adalah dengan terjangkaunya dan ketersediaan layanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah. Selain itu juga pemberian beasiswa miskin





yang digalakkan pemerintah daerah merupakan instrumen yang baik untuk menghambat banyaknya peserta didik yang putus sekolah, karena ketidakmampuan masyarakat/orang tua untuk menyekolahkan anaknya, yang pada akhirnya nilai APK akan berkurang.

Tabel
formulasi realisasi indikator kinerja Persentase Angka Partisipasi Murni
SMP/MTs

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	jumlah siswa usia 13-15 dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	$\frac{9.218}{12.084} \times 100\% = 76,28\%$

Berikut tabel pencapaian APM SMP/MTS dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 :

TABEL
REALISASI APM SMP/MTSDARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
APM SMP/MTs	69,21	71,46	75,64	77,36	80,44	76,28	Turun	78,78%	80,29%

Dari tabel di atas terlihat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2013 realisasi APM SMP/MTs sebesar 69,21% kemudian tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 71,46%, tahun 2015 realisasi APM SD/MI naik lagi sebesar 75,64%. Sedangkan tahun 2017 APM SMP/MTs sebesar 80,44% naik dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 78,78%. Namun pada tahun 2018 realisasinya turun sebesar 4,15% menjadi 76,28%.

Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tersebut didukung oleh program/kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :





TABEL
Program/Kegiatan yang mendukung
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
Penyediaan beasiswa siswa berprestasi/kurang mampu SD	74.828.000	74.828.000
Program Pendidikan Non Formal		
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	987.799.600	965.669.600

SASARAN 2; MENINGKATNYA KESADARAN HUKUM DAN KETAATAN TERHADAP NORMA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pencapaian target kinerja sasaran 2 pada **Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan di Misi II “Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	100% (609 RT)	100% (609 RT)	100
Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%	100%	100
Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100,00%	100%	100
Tidak terjadi konflik sosial	Tidak terjadi	tidak terjadi	Tercapai (100%)
Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	52 ormas	130
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	71,05%	68,89%	96,96
Rata-rata			104,49 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa rata-rata capaian sasaran Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Ketaatan terhadap Norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah mencapai kinerja 104,49%.





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100% (1:609 /RT)	100% (1:609 /RT)	100

Dilihat dari tabel di atas realisasi indikator kinerja sasaran Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota sebesar 100% atau target telah tercapai.

Pencapaian realisasi tersebut didapat dari Jumlah Anggota Linmas sebanyak 609 orang dibagi Jumlah RT sebanyak 609 RT dikali 100%.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase Anggota Linmas per RT	Jumlah Anggota Linmas dibagi Jumlah RT dikali 100	$\frac{609}{609} \times 100 = 100\%$

Pada tahun 2018 jumlah anggota Linmas se Kabupaten HSS adalah 609, sedangkan jumlah RT se Kabupaten HSS 609. Sehingga Persentase anggota Linmas per RT pada Tahun 2018 adalah sebesar 100 %.

Tabel perbandingan realisasi Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	48,6% (1:296 /RT)	48,6% (1:296 /RT)	100% (1:609 RT)	100% (1:609 RT)	100% (1:609 RT)	100% (1:609 RT)	100% (609 RT)	100% (609 RT)

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018 melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP. Kab. HSS yaitu dalam Program





peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan.

Hambatan dan permasalahan yang dialami dalam memenuhi indikator ini adalah :

- Belum semua Anggota Linmas terlatih.
- Belum adanya insentif bulanan bagi Anggota Linmas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Berupaya membuat rencana kegiatan Pelatihan Linmas.
- Berupaya menjalin kerjasama dengan Desa/kelurahan untuk memberikan dana insentif.

Pencapaian indikator kinerja Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota tersebut didukung oleh program/kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL
PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAKUPAN RASIO PETUGAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN/KOTA

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>		
Pengendalian keamanan lingkungan	57.425.000	31.604.500

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%	100	100,00

Pada indikator Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah capaian kinerja tahun 2018 tercapai 100%.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kab/kota

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
cakupan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah	jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi jumlah pelanggaran perda dan/ atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan x 100	$\frac{114}{114} \times 100 = 100\%$

Pada tahun 2018 jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan sebanyak 114 kasus, dari jumlah pelanggaran perda dan/ atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun 2018 sebanyak 114 kasus. Sehingga capaian kinerja indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sebesar 100%.

Tabel perbandingan realisasi cakupan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
cakupan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam usaha pencapaian target indikator tersebut di dukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada Kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi keg. Polisi Pamong Praja, telah berhasil memberikan fasilitasi Penertiban dan penegakan Peraturan Perundang-undang Daerah. Persentase pencapaian adalah sebesar 100% disebabkan semua laporan dan temuan pelanggaran dapat diselesaikan. Selain penyelesaian secara administrasi ada yang dilakukan eksekusi seperti pencabutan ijin, pemusnahan barang bukti dan pembongkaran paksa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah:

- Respon atas laporan





- Pengecekan atau validitas Laporan
- Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan / PPNS
- Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar
- Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan

Yang dimaksud dengan pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang Berasal dari:

- Laporan masyarakat yang masuk melalui Lapor, Telepon, Surat datang langsung, media massa/sosial media
- Rekomendasi dari SOPD Pengawas dan pengendalian terkait
- Perintah atasan dan / atau temuan petugas Sat Pol PP langsung dilapangan tentang adanya pelanggaran Peraturan daerah

Hambatan dan permasalahan yang dialami dalam memenuhi indikator ini adalah:

- Tidak adanya PPNS di Satpol PP. Kab. HSS.
- Sarana dan prasarana yang terbatas.
- Tidak ada dana untuk pemberkasan pelanggaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Berupaya terus koordinasi dan kerjasama dengan pihak penyidik Polri dalam pelanggaran Tipiring.
- Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
- Diupayakan penyelesaian secara administrasi saja.
- Menjalin kerjasama yang harmonis dengan SKPD terkait.

Pencapaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah tersebut didukung oleh program/kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL
PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
Patroli dan Pengawasan Penegakan Perda	42.000.000	42.000.000
Penindakan Dan Penyelesaian Pelanggaran PERDA		





Dokumentasi Kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal



Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100,00%	100,00%	100,00%

Dilihat dari tabel di atas realisasi indikator kinerja sasaran Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib sebesar 100% atau tidak tercapai.

Tabel formulasi realisasi indikator kinerja Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	Jumlah kawasan bebas reklame yg tertib dibagi Jumlah kawasan bebas reklame dikali 100	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$

Kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/ atau halaman Urusan pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit.





Lokasi larangan penyelenggaraan Reklame di Kabupaten HSS pada tempat-tempat sebagai berikut:

1. Bundaran Tugu Hari Jadi dan sekitarnya dengan radius 150 m dari sisi terluar bundaran
2. Taman Palangan
3. Taman Darmansyah Jauhidi
4. Taman muara sangkuang
5. Media Jalan Achmad Yani Kandangan
6. Media jalan Pangeran Antasari di depan Kantor
7. Sekretariat Daerah Kab. HSS

Lokasi Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap penyelenggaraan reklame untuk kepentingan Pemerintahan, Pemerintahan daerah, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel perbandingan realisasi Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100%	100%	81,8%	100%	100%	100%	100%

Hambatan dan permasalahan yang dialami dalam memenuhi indikator ini adalah:

- Jumlah personil yang masih kurang.
- Sarana dan prasarana yang terbatas.
- Kemauan, kemampuan dan semangat kerja SDM yang masih rendah.
- Masih kurangnya dana insentif dibanding resiko tugas yang dilaksanakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Berupaya merekrut tenaga bantu pengamanan.
- Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
- Memberikan pendampingan dan arahan yang terus menerus.
- Menjalin kerjasama yang harmonis dengan SKPD terkait.

Capaian indikator sasaran ini didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Ketertiban Umum SatpoP PP. Kab. HSS





yaitu dalam Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal pada Kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi keg. Polisi Pamong Praja.

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
Patroli dan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	363.740.000	363.730.000

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

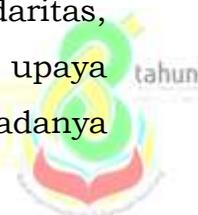
Tidak terjadinya Konflik Sosial

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Tidak terjadinya Konflik Sosial	Tidak terjadi	Tidak terjadi	100

Capaian kinerja Indikator tidak terjadinya Konflik Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 tercapai 100%, Dimana hal ini menunjukkan bahwa suasana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2018 sangat kondusif dan meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini terlihat dari 0 (nol) kejadian selama tahun 2018.

Hal ini disebabkan antara lain adalah :

- Meningkatnya kesadaran antar pemeluk agama yang disebabkan antara lain adanya kegiatan-kegiatan rutin dari Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), pertemuan Tokoh-tokoh Lintas Agama serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran antar pemeluk agama.
- Meningkatnya Solidaritas antar pemeluk agama, seiring dengan meningkatnya Teknologi Informasi yang menyebabkan perubahan pola pikir Kemasyarakatan dalam hubungan antar umat beragama.
- Meningkatnya kesadaran dan kesabaran penduduk yang disebabkan antara lain adanya kegiatan-kegiatan Penyuluhan Rutin kepada Kemasyarakatan terkait dengan peningkatan rasa Solidaritas, Sosialisasi/penyuluhan tentang Kamtramtibmas, serta upaya Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Islam dan juga adanya





- Penggalangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam upaya menciptakan kegiatan Pencegahan Dini terhadap adanya Potensi Konflik Sosial.
- d. Penggalangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam upaya menciptakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap adanya Potensi Konflik Sosial.

Tabel perbandingan realisasi Tidak terjadinya Konflik Sosial dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Tidak terjadinya Konflik Sosial	(5 Kejadian) terjadi	Tidak terjadi					

Pencapaian indikator Tidak terjadinya Konflik Sosial tersebut didukung oleh program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol Kab. HSS seperti pada tabel di bawah ini :

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
Peningkatan kerjasama komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	171.000.000	166.250.000

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Forum Komunikasi Pembauran Antar Umat Beragama dan Organisasi Masyarakat yang Aktif

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	52 ormas	130,00

Capaian indikator Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif pada tahun 2018 tercapai 130%, capaian ini didapat dari perbandingan realisasi Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif sebanyak 52 ormas dibanding dengan target sebanyak 40 ormas. Capaian





kinerja ini di dukung oleh faktor seperti halnya, yang pertama, dengan meningkatnya kesadaran penduduk dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Organisasi Masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan Penyuluhan serta adanya persyaratan yang diharuskan dalam hal permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melibatkan diri dalam berorganisasi, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang organisasi yang sedang berkembang.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	jumlah Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif dibanding dengan target sebanyak 40 ormas x 100	$\frac{52}{40} \times 100 = 130\%$

Tabel perbandingan realisasi Forum Komunikasi Pembauran Antar Umat Beragama dan Organisasi Masyarakat yang Aktif dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	40 ormas	40 ormas	51 ormas	52 ormas	52 ormas	40 ormas	40 ormas

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berpolitik (Pemilu)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	71,05%	68,89%	96,96

Capaian kinerja indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu) tercapai 96,96%. Dari target 71,05% partisipasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017, terealisasi sebesar 68,89%.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berpolitik (Pemilu)

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih tetap dikali 100	$\frac{118.359}{171.808} \times 100 = 68,89\%$

Faktor-faktor penghambat tidak tercapainya indikator tersebut tahun 2018 dikarenakan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu) meskipun upaya dari pemerintah sudah maksimal dengan mengadakan penyuluhan, penyebaran brosur, siaran keliling, pemasangan baliho/spanduk.
- Pertemuan antara pasangan calon dengan masyarakat pemilih kurang intens.
- Tingkat kesadaran politik masyarakat baik itu pemilih pemula maupun pemilih lanjut kurang memahami pentingnya partisipasi dalam hal mensukseskan pemilu sesuai tahapan.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat pemilih masih rendah sehingga mereka mementingkan bekerja untuk menambah penghasilan daripada hadir di tempat pemilihan.

Tabel perbandingan realisasi Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	73,10%	68,75%	68,75%	68,89%	68,89%	71%	71,05%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pendidikan politik masyarakat		
Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat	164.990.000	163.115.000





SASARAN 3; MENINGKATNYA FASILITASI SUMBER DAYA TENAGA KEPENDIDIKAN DI KEMENTERIAN AGAMA DAN PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada **Tujuan II : Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan** dan **Misi II : Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	57,78%	57,78
Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	82,73%	82,73
Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	91,14%	91,14
Rata-rata			77,22 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Fasilitas Sumber Daya Tenaga Kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah telah mencapai kinerja sebesar 77,22 %.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	57,78%	57,78

Capaian kinerja indikator Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV tercapai 57,78%. Dari target 100% pada tahun 2018, terealisasi sebesar 57,78%.

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV sebanyak 52 orang dibagi jumlah guru yang ada sebanyak 90 orang dikali 100%. Realisasi indikator kinerja sebesar 57,78% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 57,78%.





Formula Realisasi Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru PAUD yang sudah S 1/ D IV dibagi dengan jumlah Jumlah Guru PAUD dikali 100	$\frac{52}{90} \times 100 = 57,78\%$

Salah satu penyebabnya belum tercapainya indikator ini adalah adanya guru yang sudah memasuki usia pensiun sehingga mereka tidak bersedia lagi untuk melanjutkan ke S1. Berikut pencapaian persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

PENCAPAIAN GURU PAUD YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI						KINERJA NAIK/ TURUN	TARGET RPJMD	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2017	2018
Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	NA	43,13	56,13	63	78,79	57,78	Turun	100	100

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	82,73%	82,73

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV sebesar 82,73%, terealisasi 82,73% dari target 100%.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	jumlah Guru SD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dibanding dengan jumlah PNS Guru SD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikali dengan 100 %	$\frac{2.376}{2.872} \times 100\% = 82,73\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel perbandingan realisasi Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase Guru SD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	65,43%	76,35%	76,24%	86,40%	82,73%	89,40%	100%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	91,14%	91,14

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV sebesar 91,14%, terealisasi 91,14% dari target 100,00%.

Dalam hal peningkatan kualifikasi guru, Dinas Pendidikan bersama pihak Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin telah melakukan kerjasama. Terkait kualifikasi guru masih ada yang belum berkualifikasi S1/DIV, maka perlu dilakukan deregulasi untuk mengikuti ijin belajar/tugas belajar yang lebih memudahkan guru.

Pencapaian realisasi tersebut didapat dari jumlah Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (946 guru) dibanding dengan jumlah





PNS Guru SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1.038 guru) dikali dengan 100 %.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	jumlah Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dibanding dengan jumlah PNS Guru SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikali dengan 100 %	$\frac{946}{1.038} \times 100\% = 91,14\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel
perbandingan realisasi Persentase Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Persentase Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	81,77%	83,52%	86,75%	88,13%	89,84%	91,14%	95,60%	100%

TUJUAN 3	MENINGKATKAN DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT
---------------------	--

Capaian **tujuan ketiga** yakni **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”** pada **Misi II** yakni **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”**

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 1 sasaran dengan 13 indikator sasaran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :




SASARAN 1; MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada **Tujuan 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat** di **Misi II : Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Angka Kematian Ibu	54,54	138	-53,03
Angka Kematian Bayi	10	21	48,14
Angka kematian neonatal	30	59	50,85
Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,03%	0,00%	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	21,06%	21,06
Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%	100,00%	100
Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	16,95%	-488%	-2.879,06
Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	28,57%	100,00%	350,02
Persentase puskesmas yang terakreditasi	19,05%	61,90%	324,93
Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%	100,00%	100
Persentase desa dengan kategori siaga aktif	72,00%	100,00%	138,89
Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	80,00%	84,31%	105,39
Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	77,00%	100%	129,87
Rata-rata			-112,53%

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran "Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan" adalah sebesar -112,53% .





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Angka Kematian Ibu

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Angka Kematian Ibu	54,54	138	-53,03

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Angka Kematian Ibu melahirkan sebesar -53,03%, terealisasi 138 dari target 54,54.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100 000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Cara perhitungan/rumus cakupan ini adalah:

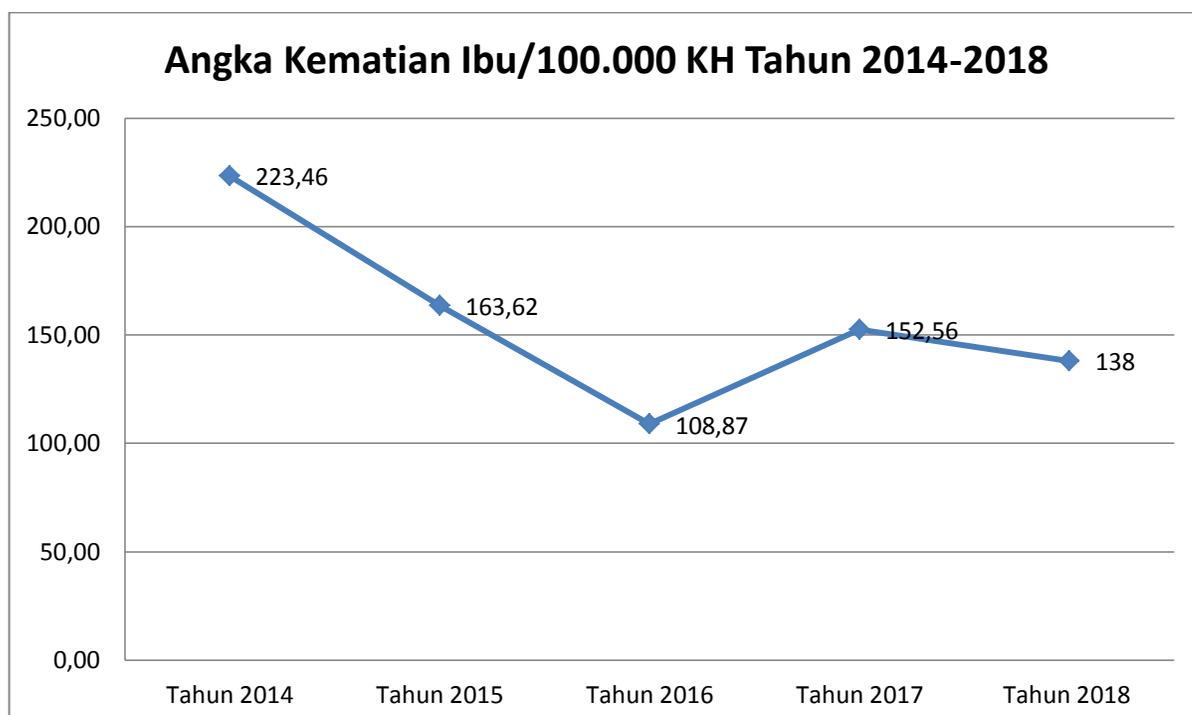
$$\begin{aligned}
 \text{AKI} &= \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000 \text{ KH} = \\
 &= \frac{5 \text{ orang}}{3.628 \text{ jiwa}} \times 100.000 \text{ KH} = 138
 \end{aligned}$$

Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, serta tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan *prenatal* dan *obstetric*. AKI pada tahun 2018 mencapai angka 138 per 100.000 KH diperoleh dari data jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun sebesar 5 orang dan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sebesar 3.628 yang diperoleh dari data di bidang Kesga dan Promokes. Jika dibandingkan dengan target maka indikator ini belum tercapai. Belum tercapainya target ini disebabkan karena pada tahun 2018 ada peningkatan kasus kematian.





Berikut *trend* AKI dari tahun 2014 sampai dengan 2018.



Dari grafik diatas terlihat bahwa *trend* AKI jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama lima tahun mengalami fluktuasi ditahun 2018 masih lebih rendah dibanding tahun 2014, hal ini disebabkan karena:

1. Hampir semua desa sudah ada bidan desa
2. Kemitraan bidan dengan dukun kampung
3. Pelatihan Peningkatan kompetensi kebidanan
4. Tersedianya Dokter spesialis kebidanan dan kandungan selama 24 jam
5. Penambahan jumlah kematian diiringi dengan peningkatan jumlah kelahiran

Kematian ibu penyebabnya adalah penyakit degeneratif yakni penyakit jantung yang diderita sebelum masa kehamilan, hypothyroid, aspirasi postSC, dan perdarahan post partum. Berdasarkan tempat kejadian, dari 5 kematian tersebut 3 kasus berada pada tingkat fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, satu kasus pada saat perjalanan menuju rumah sakit, dan 1 kasus di rumah setelah post SC. Sehingga kedepan perlu dilakukan pembinaan dan koordinasi lebih intensif dengan rumah sakit.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :





Tabel
perbandingan realisasi Angka Kematian Ibu melahirkan dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Angka Kematian Ibu	223,46	163,62	108,87	152,56	138	110	54,54

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran **Angka Kematian Ibu melahirkan** adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Reproduksi	57,804,000	56,694,000	98.08%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Angka Kematian Bayi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Angka Kematian Bayi	10	21	48,14

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Angka Kematian Bayi sebesar 48,14% (Tidak Tercapai), terealisasi 21 dari target 10.

Angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Cara perhitungan/rumus cakupan ini adalah:

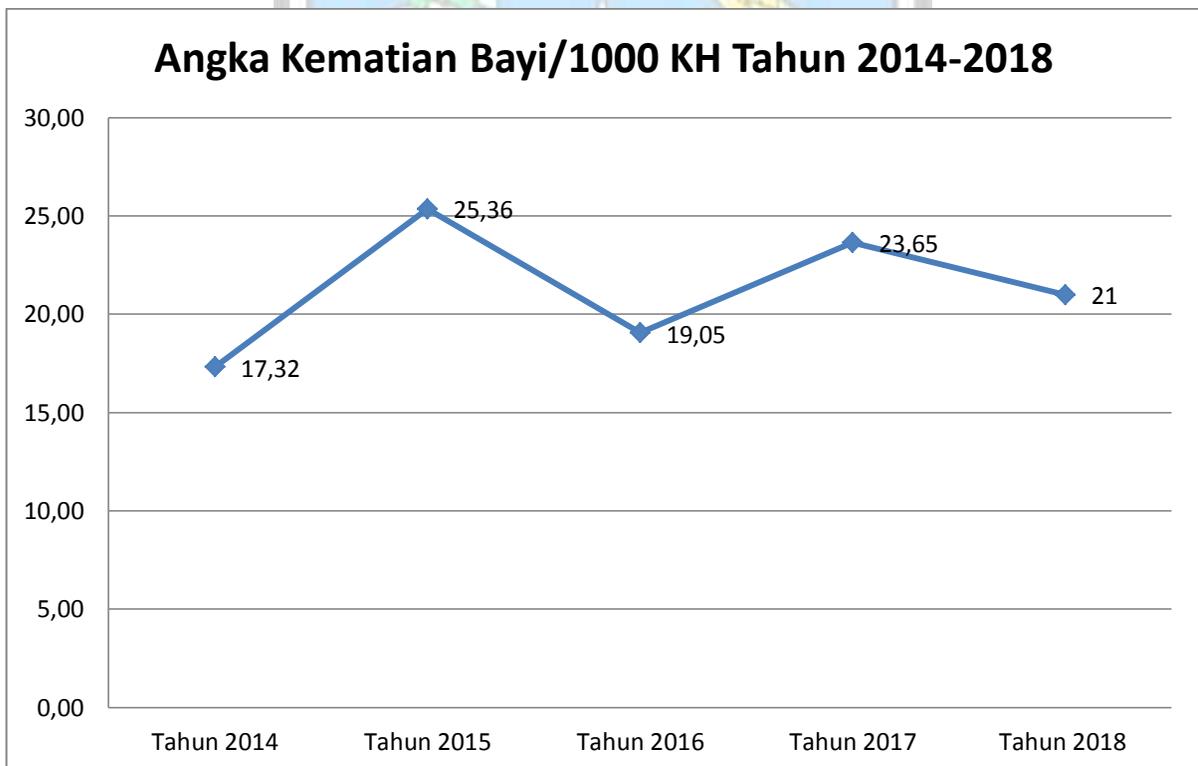
Formula Realisasi Capaian Kinerja Angka Kematian Bayi

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Angka Kematian Bayi	$= \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000 \text{ KH}$	$= \frac{77}{3.628} \times 1.000 = 21$





Indikator ini mencerminkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan proram KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. AKB pada tahun 2018 sebesar 21 per 1.000 KH diperoleh dari data Jumlah kematian bayi sebesar 77 kasus dan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sebesar 3.628 yang diperoleh dari data di bidang Kesga dan Promokes. Jika dibandingkan dengan target indikator ini belum tercapai. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 terjadi 77 kasus kematian dimana jumlah kelahiran hanya sebanyak 3.628. Berikut trend AKB dari tahun 2014 sampai dengan 2018.



Adanya peningkatan AKB disebabkan karena penambahan jumlah kelahiran diiringi dengan penambahan jumlah kematian. Penyebab AKB masih didominasi oleh BBLR, asfiksia, dan kelainan kongenital. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan edukasi kepada ibu hamil agar gizi pada saat hamil adekuat dan kompetensi atau kualitas sumber daya kesehatan dalam hal ini bidan untuk penatalaksanaan bayi baru lahir yang bermasalah sehingga dapat menekan angka kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR dan asfiksia. Ibu hamil yang kurang gizi beresiko melahirkan bayi baru lahir dengan berat badan rendah. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan dapat dilakukan dengan pelatihan.

Hingga laporan ini disusun, data di tingkat propinsi, nasional maupun kabupaten terdekat belum disusun, sehingga belum dapat





membandingkan dengan capaian propinsi maupun nasional juga belum dapat dilihat. Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel
perbandingan realisasi Angka Kematian bayi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Angka Kematian bayi	17,32	25,36	19,05	23,65	21	10	10

Penyebab AKB masih didominasi oleh BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, dan sepsis.

Pencapaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018, yaitu :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jaminan Persalinan (DAK)	2,929,701,850	1,365,349,147	46.60%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Angka Kematian Neonatal

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Angka kematian neonatal	30	59	50,85

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penurunan kematian neonatal sebesar 50,85% (Tidak Tercapai), terealisasi - 59 dari target 30.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Angkakematian neonatal

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Angka kematian neonatal	= Jumlah Kematian Neonatal	= 59

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel
perbandingan realisasi Persentase penurunan kematian neonatal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Angka kematian neonatal	43	65	53	59	59	31	30

Pencapaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2018, yaitu :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penyuluhan kesehatan anak balita (29.01)	72.708.000	44.140.000	60.71%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,03%	0%	100,00

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penurunan balita gizi kurang sebesar 100% (Tercapai), terealisasi 0% dari target 0,03%.





Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta adalah jumlah balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta tahun n dibagi jumlah balita gizi buruk tahun n dikalikan 100%. Balita gizi kurang adalah balita yang memiliki indeks BB/U $\geq -3SD$ sampai dengan $\leq -2SD$.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	$= \frac{\text{Jumlah balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta}}{\text{Jumlah balita gizi buruk}} \times 100\%$	$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel
perbandingan realisasi Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,035%	0,03%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian makanan tambahan, vitamin, dan peningkatan program penimbangan balita	242.950.000	158.775.000	65.35%





Analisa Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran :

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100,00%	21,06%	21,06

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 21,06% (Tidak Tercapai), terealisasi 21,06% dari target 100%.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah maskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dibagi dengan Jumlah seluruh maskin di HSS di kali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	$= \frac{\sum Px \text{ Maskin (Pd)}}{\sum \text{seluruh penduduk miskin Kab. HSS}} \times 100\%$ <p>Px Maskin (P) adalah pasien maskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasarbaik yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh petugas kesehatan</p>	$= \frac{(20.899)}{99.238} \times 100 \% = 21,06\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel
perbandingan realisasi Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	75,21%	75,83%	55,53%	NA	21,06%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hal-hak dasar masyarakat miskin di bidang kesehatan. Pelayanan yang dimaksud dapat berupa pelayanan di





dalam maupun diluar gedung baik yang berupa promotif maupun kuratif, penyakit menular maupun tidak menular, juga termasuk pelayanan kepada masyarakat miskin. Karena tren penyakit tidak menular terus merangkak naik beriringan dengan penyakit menular yang masih ada.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	7.818.647.750	7.379.987.169	94,39%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)

Indikator ini menggambarkan pelayanan rujukan bagi pasien miskin. Jadi diharapkan pasien miskin yang memerlukan rujukan dapat dirujuk dan dilayani sesuai standar di PPK II.

Capaian kinerja indikator ini sudah mencapai target. Hal ini disebabkan karena semua pasien miskin yang perlu dirujuk secara medis telah dilakukan rujukan dan dilayani oleh PPK II, tidak terlepas dari adanya Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%	100%	100,00

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II) sebesar 100% (Tercapai), terealisasi 100% dari target 100%.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	Jumlah pasien miskin yang mendapat pelayanan di PPK II sesuai standar dibagi jumlah pasien miskin yang dirujuk x 100%	$= \frac{3.339}{3.339} \times 100 \% = 100\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	16,95%	-488%	-2.879,06

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk sebesar -2.879,06% (Tidak Tercapai), terealisasi -488% dari target 16,95%.

Persentase penurunan angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue adalah selisih antara angka kesakitan akibat DBD tahun n-1 dikurangi angka kesakitan akibat DBD tahun n dibagi angka kesakitan akibat DBD tahun n-1 dikalikan 100%. Kesakitan DBD adalah kesakitan yang disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes Aegypti.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	$= \frac{mbDBD(n-1) - mbDBD(n)}{mbDBD(n-1)} \times 100\%$ <p>mDBD adalah angka kesakitan akibat DBD</p> <p>n-1 = tahun sebelumnya n = tahun berjalan</p>	$= \frac{29 - 150}{29} \times 100 = -488\%$

Persentase Penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah dengue (DBD). Kesakitan DBD adalah kesakitan yang disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Indikator ini tercapai bahkan melebihi target karena masyarakat sudah mulai sadar melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Sehingga tidak ada pengembakbiakan nyamuk aedes aegypti. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk juga didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan di puskesmas. Diharapkan hingga sampai dengan akhir tahun 2018 tidak ada penambahan jumlah penderita DBD.

Tabel
perbandingan realisasi Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk dari tahun 2014 - 2018

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	68,54	-540,30	16,78	81,51	-488	13,24	16,95

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 dan 2018 terjadi peningkatan penderita DBD yang cukup tajam sehingga capaian kinerja negatif. Hal ini berarti bahwa penderita DBD diharapkan turun namun pada realisasinya mengalami peningkatan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk adalah sebagai berikut :





Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD	244.317.500	186.804.200	76,46%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	28,57%	100,00%	350,02

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB sebesar 350,02% (Tercapai), terealisasi 100,00% dari target 28,57%.

Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB adalah Selisih antara desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n-1 dikurangi desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n dibagi jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n-1 dikalikan 100%. Target peningkatan tercapai jika realisasi pada tahun n berkurang 25% atau lebih dari tahun n-1. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB adalah desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu.

Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan jangkauan penyelidikan epidemiologi pada desa yang mengalami KLB.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB

Indikator Kinerja	Formula Realisasi
Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	$= \frac{\sum \text{desa KLB } (n - 1) - \sum \text{desa KLB } (n)}{\sum \text{desa KLB } (n - 1)} \times 100\%$ <p>Desa/ kelurahan mengalami KLB (desa KLB) bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan</p> <p>n-1 = tahun sebelumnya n = tahun berjalan</p>





Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
					2017	2018
Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	44,44%	30%	85,71	100	22,22%	28,57%

Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan jangkauan penyelidikan epidemiologi pada desa yang mengalami KLB. Berikut trend desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Grafik realisasi kinerja dari tahun ke tahun



Dari grafik diatas terlihat bahwa trend jumlah desa/kelurahan yang terjadi kasus KLB selama lima tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 semakin menurun. Angka terkecil terjadi pada tahun 2012. Hal ini disebabkan semakin aktifnya kegiatan surveilans epidemiologi terhadap desa yang berpotensi KLB.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Penanganan Penyakit Berpotensi KLB	8.375.000	6.850.000	81,79%





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase puskesmas yang terakreditasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase puskesmas yang terakreditasi	19,05%	61,90%	324,93

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase puskesmas yang terakreditasi sebesar 324,93% (Tercapai), terealisasi 61,90% dari target 19,05%.

Puskesmas yang dinyatakan melaksanakan sesuai dengan standar adalah puskesmas yang terakreditasi. Sampai dengan Tahun 2018 puskesmas yang terakreditasi berjumlah 13 puskesmas yakni Puskesmas Kandangan, Negara, Sungai Raya, Batang Kulur, Gambah, Padang Batung, Kaliring, Angkinang, Simpur, Wasah, Sei Pinang, Bayanan, Pasungkan Sehingga indikator yang terkait dengan pelayanan standar di puskesmas hanya tercapai 13 puskesmas dari 21 puskesmas. Dengan demikian masih ada 8 buah Puskesmas yang terkait dengan pelayanan standar yang belum di akreditasi.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase puskesmas yang terakreditasi

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase puskesmas yang terakreditasi	$= \frac{\sum \text{Puskesmas yg terakreditasi}}{\sum \text{Puskesmas di Kab. HSS}} \times 100\%$	$= \frac{13}{21} \times 100 \% = 61,90\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase puskesmas yang terakreditasi	0%	0%	9,52%	23,81	61,90	9,52%	19,05%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase puskesmas yang terakreditasi adalah sebagai berikut :





Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	308.310.000	259.064.758	84.03%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%	100,00%	100

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 100% (Tercapai), terealisasi 100% dari target 100%.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	$= \frac{\sum \text{penduduk miskin yang memiliki jamkes}}{\sum \text{seluruh penduduk miskin}} \times 100\%$	$= \frac{99.238}{99.238} \times 100\%$ $= 100\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	7.818.647.750	7.379.987.169	94,39%

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase desa dengan kategori siaga aktif

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase desa dengan kategori siaga aktif	72,00%	100,00%	138,89

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase desa dengan kategori siaga aktif sebesar 138,89% (Tercapai), terealisasi 100% dari target 72%.

Persentase desa dengan kategori siaga aktif adalah Persentase dari jumlah desa Siaga yang aktif dibandingkan dengan jumlah desa Siaga yang dibentuk x 100 %.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase dari jumlah desa Siaga yang aktif

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase desa dengan kategori siaga aktif	Persentase dari jumlah desa Siaga yang aktif dibandingkan dengan jumlah desa Siaga yang dibentuk x 100 %	$= \frac{148}{148} \times 100 \% = 100\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2015	2016
Persentase desa dengan kategori siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Desa siaga aktif adalah Desa dan Kelurahan Siaga mencapai kondisi Siaga Aktif yang sesungguhnya, apabila suatu desa atau sebutan lain yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Merupakan Urusan Wajib dan Kunci Keberhasilan Pembangunan di Daerah. Ada delapan kriteria atau unsur yang harus dipenuhi oleh desa atau kelurahan sehingga bisa ditetapkan sebagai desa/kelurahan aktif.

Desa Siaga Aktif adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari
- 2) Memiliki Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dapat melaksanakan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan medis.
- 3) Masyarakat (rumah tangga) nya mempraktekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Adapun perhitungan realiasi tersebut didapatkan dari formulasi jumlah desa berkategori siaga aktif pratama (sebanyak 148 desa siaga aktif pratama) dibagi jumlah seluruh desa di Kab. Hulu Sungai Selatan (sebanyak 148 desa siaga aktif pratama) dikali 100%.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase desa dengan kategori siaga aktif adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat	260.252.200	86.202.765	33.12%





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	80,00%	84,31%	105,39

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat sebesar 105,39% (tidak Tercapai), terealisasi 84,31% dari target 80%.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	$= \frac{\sum(a)}{\sum(b)} \times 100\%$ <p>(a) = Jumlah sarana air minum pd rumah tangga yang memenuhi syarat (b) = Jumlah sarana air minum pada rumah tangga yang diuji</p>	$= \frac{44.803}{53.141} \times 100 \% = 84,31\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	92,31	92,16	82,24	40,64	84,31	78%	80%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94.800.000	39.487.450	41.65%





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	77,00%	100%	129,87

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 129,87% (Tercapai), terealisasi 100% dari target 77%.

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	$= \frac{\sum \text{Desa yang melaksanakan STBM}}{\sum \text{seluruh desa di Kab. HSS}} \times 100\%$	$= \frac{148}{148} \times 100 \% = 100\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	52,70%	60,14%	67,57%	91,22%	97,97%	100%	73%	77%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi Keuangan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94.800.000	39.487.450	41.65%





TUJUAN 4	MENGEMBANGKAN POTENSI MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, INDUSTRI KECIL, DAN PARIWISATA.
---------------------	--

Capaian **tujuan 4** yakni **“Mengembangkan Potensi Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, dan Pariwisata.”** pada **Misi II “Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”**, dari realisasi capaian 7 (tujuh) sasaran dengan 12 (duabelas) indikator sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 7 (tujuh) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1; MENINGKATNYA NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERTANIAN

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, dan Pariwisata di Misi II “Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,00%	1,40%	140,00
Rata-rata			140%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran Meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian mencapai kinerja 140%.

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran persentase peningkatan angka konsumsi ikan sebesar 140% (Tercapai), terealisasi 1,00% dari target 1,40%.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,14%	1,69%	0,87%	1,39%	1,40%	0,92%	1%





SASARAN 2; MENJADIKAN KOTA KANDANGAN DAN SEKITARNYA MENJADI KOTA SENI DAN OLAH RAGA

Pencapaian target kinerja sasaran 2 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata** di Misi II **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Pelestarian Budaya Lokal	80,00%	105%	131,25
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,69%	16,70%	131,60
Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	50,00%	51,43%	102,86
Rata-rata			121,90 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator sasaran Menjadikan Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga mencapai kinerja 121,90%.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Pelestarian Budaya Lokal

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Pelestarian Budaya Lokal	80,00%	105%	131,25

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase Pelestarian Budaya Lokal sebesar 131,25% (Tercapai), terealisasi 105% dari target 80%.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	Target RPJMD	
				2017	2018
Persentase Pelestarian Budaya Lokal	87,50%	105%	105%	78%	80%

Keberhasilan sasaran ini dapat dijadikan indikasi bahwa ada peningkatan dalam melestarikan budaya lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat, dan lebih mengenalkan kepada masyarakat terutama kepada





anak muda yang kurang tahu akan kekayaan seni budaya asli daerah. Capaian tersebut didukung dengan Semakin banyaknya kegiatan yang mendukung pelestarian budaya lokal yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mendukung pencapaian indikator persentase pelestarian budaya local seperti tergambar sebagai berikut

Tabel kegiatan yang mendukung pelestarian budaya lokal yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	386.832.500	366.845.000
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	763.911.500	763.114.500

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,69%	16,70%	131,60

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 131,60% (Tercapai), terealisasi 16,70% dari target 12,69%.

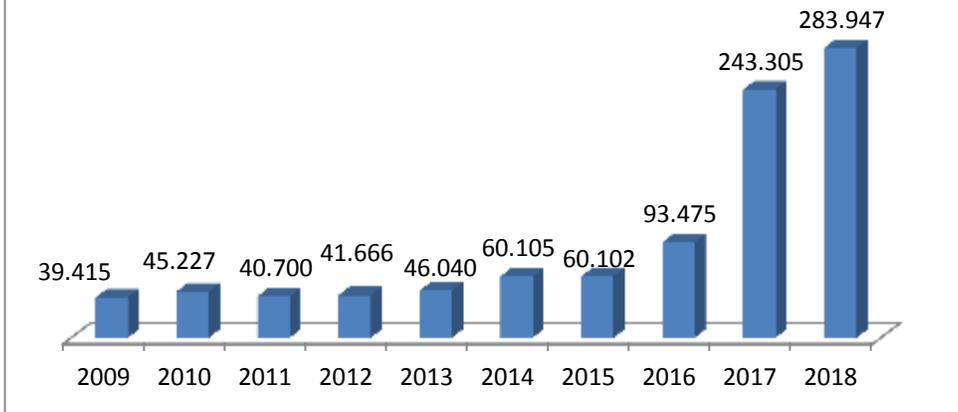
Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	$= \frac{\sum \text{kunjungan Wisatawan th (n)} - \sum \text{kunjungan Wisatawan th (n - 1)}}{\sum \text{kunjungan Wisatawan th (n - 1)}} \times 100\%$	$= \frac{283.947 - 243.305}{243.305} \times 100\% = 16,70\%$





Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kab. HSS Tahun 2009-2018



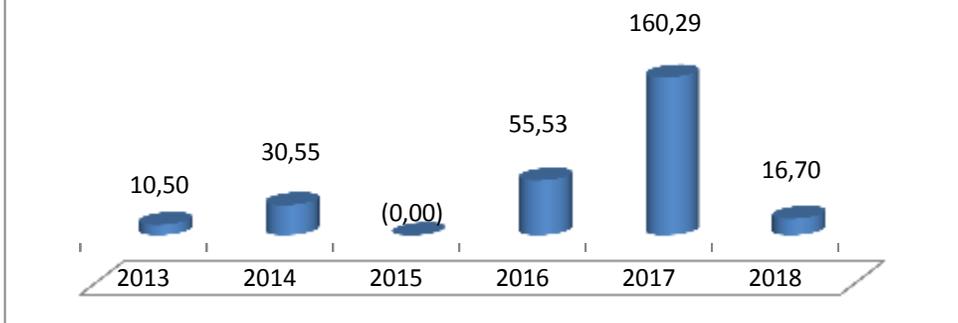
DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KE KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	BULAN	2009			2010			2011			2012			2013		
		WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH
1	JANUARI	0	4.418	4.418	6	5.294	5.300	4	5.696	5.700	8	5.746	5.754	8	6.146	6.154
2	FEBRUARI	5	1.828	1.833	2	2.725	2.727	2	2.798	2.800	4	2.818	2.822	4	3.218	3.222
3	MARET	11	1.989	2.000	12	1.988	2.000	6	2.794	2.800	5	2.821	2.826	5	3.221	3.226
4	APRIL	5	995	1.000	10	3.190	3.200	7	2.393	2.400	9	2.416	2.425	9	2.816	2.825
5	MEI	3	1.163	1.166	4	3.896	3.900	2	4.398	4.400	7	4.441	4.448	7	4.841	4.848
6	JUNI	8	8.058	8.066	27	2.673	2.700	20	2.980	3.000	18	3.009	3.027	18	3.409	3.427
7	JULI	23	3.410	3.433	24	2.276	2.300	18	4.082	4.100	22	4.122	4.144	22	4.522	4.544
8	AGUSTUS	20	1.113	1.133	0	2.000	2.000	2	498	500	6	508	514	6	908	914
9	SEPTEMBER	5	1.028	1.033	3	14.097	14.100	4	8.596	8.600	4	8.681	8.685	4	9.081	9.085
10	OKTOBER	1	7.632	7.633	9	1.291	1.300	5	1.195	1.200	7	1.305	1.312	7	1.705	1.712
11	NOVEMBER	25	1.175	1.200	7	3.293	3.300	3	3.497	3.500	1	3.847	3.848	1	4.247	4.248
12	DESEMBER	10	6.490	6.500	2	2.398	2.400	5	1.695	1.700	6	1.855	1.861	5	1.830	1.835
JUMLAH		116	39.299	39.415	106	45.121	45.227	78	40.622	40.700	97	41.569	41.666	96	45.944	46.040

NO	BULAN	2014			2015			2016			2017			2018		
		WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	WISMAN	WISNUS	JUMLAH
1	JANUARI	8	10.378	10.383	10	10.378	10.380	24	12.290	12.314	18	11.876	11.834	34	12.435	12.489
2	FEBRUARI	2	4.381	4.383	9	4.381	4.380	15	6.344	6.359	26	26.982	26.988	45	27.094	27.139
3	MARET	6	3.145	3.151	14	3.145	3.159	37	5.056	5.083	42	15.613	15.555	68	17.886	17.952
4	APRIL	7	5.227	5.234	12	5.227	5.239	29	6.004	6.063	38	27.105	27.143	49	30.077	30.126
5	MEI	4	3.383	3.387	11	3.383	3.394	16	6.957	6.973	16	26.721	26.737	31	29.500	29.531
6	JUNI	9	3.979	3.988	9	3.979	3.988	35	4.349	4.384	24	11.806	11.830	86	34.753	34.839
7	JULI	12	10.387	10.399	7	10.332	10.339	58	15.054	15.110	45	27.972	28.017	47	28.174	28.221
8	AGUSTUS	5	4.265	4.270	3	4.265	4.268	49	4.677	4.726	55	32.986	33.041	65	33.970	34.035
9	SEPTEMBER	2	2.300	2.302	5	2.300	2.305	75	5.828	5.903	75	11.654	11.729	75	12.775	12.850
10	OKTOBER	1	2.400	2.401	3	2.400	2.403	87	4.837	4.724	84	14.918	15.002	85	15.005	15.090
11	NOVEMBER	3	2.500	2.503	18	2.500	2.518	77	6.177	6.254	46	18.257	18.303	50	19.120	19.170
12	DESEMBER	4	7.700	7.704	11	7.700	7.711	137	15.435	15.572	59	17.367	17.426	55	22.470	22.525
JUMLAH		66	60.045	60.105	112	59.990	60.102	637	92.838	93.475	628	242.777	243.305	688	283.299	283.947

Keterangan:
 - Data dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan dengan tiket dan non-tiket
 - Destinasi yang dikunjungi wisatawan berupa wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata sejarah dan wisata budaya

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Kurun Waktu 2013-2018



Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. HSS





Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	0%	35,70 %	35,70 %	61,58 %	16,70 %	12,50 %	12,69 %

Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

No	Langkah dan Strategi	Foto Kegiatan	Deskripsi kegiatan
1.	Melaksanakan Pembangunan Sarana Kawasan Objek Wisata Air Panas Tanuhi		Pembangunan dan penataan kawasan Objek Wisata Air Panas Tanuhi agar semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Adapun fasilitas yang dibangun adalah jalan kawasan, gazebo, pergola, tempat parkir, pembuatan papan informasi, pembuatan kolam air panas anak, pembangunan gerbang/gapura identitas, dan penunjuk/rambu-rambu kawasan. Dana pembangunan bersumber dari Dana DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2018 yang disalurkan melalui Kementerian Pariwisata.
2.	Melakukan rehabilitasi amenities dan fasilitas Objek Wisata Air Panas Tanuhi		Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Objek Wisata Air Panas Tanuhi sangat diperlukan untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Fasilitas yang direhabilitasi adalah 20 cottage, kamar ganti dan WC, dan kolam air dingin. Adapun anggaran yang digunakan bersumber dari APBD Tahun 2018





No	Langkah dan Strategi	Foto Kegiatan	Deskripsi kegiatan
3.	Melaksanakan pembinaan usaha jasa pariwisata dan Pokdarwis di KSPN Loksado		Pelaku usaha pariwisata yaitu Joki Lanting, Ojek Kawasan, Tour Guide dan Penginapan/Homestay . Perlunya pembinaan pelaku usaha ini agar maksimal dalam pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung sehingga memberikan kesan dan kenangan yang baik. Pelaku usaha pariwisata merupakan mitra kerja masyarakat yang berada di sekitar destinasi pariwisata KSPN Loksado.
4.	Program Aplikasi SI PANDU WISATA (Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata)		SI PANDU WISATA (Sistem Pelayanan Terpadu Pariwisata) merupakan program alternatif yang berasal dari Proyek Perubahan (Proper) Diklatpim II yang digagas oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dihibahkan ke masyarakat
5.	Kerjasama dengan pihak ASITA, PHRI dan stakeholders sektor pariwisata lainnya dalam rangka kemitraan pemasaran pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Kerjasama kemitraan dengan pihak ASITA, PHRI dan stakeholders sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan





No	Langkah dan Strategi	Foto Kegiatan	Deskripsi kegiatan
6.	Pembuatan brosur/leaflet pariwisata Hulu Sungai Selatan		<p>Media brosur/leaflet dibuat sebagai bahan informasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desain full-color dan ditata dengan artistik sehingga menarik wisatawan untuk membacanya. Brosur / leaflet ini disebar melalui instansi pemerintah, BUMN/BUMD, komunitas pariwisata, TIC, dan masyarakat umum. Serta dipostingkan dlm bentuk foto di media sosial dan website Disporapar HSS</p>
7.	Pembuatan branding identity untuk menarik minat wisatawan		<p>Branding Identity pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu “Si Damang” tokoh animasi yang merupakan representatif Kepala Balai Loksado yang menggambarkan orisinalitas budaya dan kearifan lokal. Logo “Pesona Hulu Sungai Selatan” menggambarkan bamboo rafting sebagai wisata unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan background Pegunungan Meratus dan Landmark Tugu Kota Kandangan.</p>

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu :





1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata akan penerapan Sapta Pesona dan pelayanan kepariwisataan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung;
2. Belum terbentuknya ASITA dan PHRI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga menyulitkan kerjasama dan koordinasi, karena harus berhubungan langsung dengan ASITA dan PHRI Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Masih rendahnya SDM pelaku usaha pariwisata dalam hal teknologi informasi sehingga menghambat pengembangan pelayanan kepariwisataan dan tata kelola destinasi secara digital;
4. Masih belum meratanya aksesibilitas dan infrastruktur penunjang destinasi pariwisata.

Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke depan yaitu :

1. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan Sapta Pesona di destinasi wisata;
2. Koordinasi dengan ASITA dan PHRI Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka fasilitasi pembentukan ASITA dan PHRI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi SDM pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kepariwisataan, tata kelola destinasi wisata, dan penerapan teknologi informasi;
4. Koordinasi intens dengan stakeholder terkait pembangunan infrastruktur aksesibilitas pariwisata.

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
- Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	71.375.000	61.767.000
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	88.460.000	88.460.000





Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
- Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	2.171.000.000	2.130.908.000
- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	958.255.000	955.231.840
- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	184.064.000	175.125.000
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Hotel Rakat Mufakat	221.538.000	208.583.521
Program Pengembangan Kemitraan		
- Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	23.525.000	23.525.000

Dokumentasi kunjungan wisatawan nusantara dan luar negeri



Capaian indikator ini karena bertambahnya minat wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Promosi melalui website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin gencar dilakukan dan setiap event pariwisata serta event pagelaran seni budaya selalu di update sehingga minat wisatawan pun bertambah untuk berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Sarana Prasarana Pariwisata semakin di tambah dan di benahi, sehingga masyarakat yang sudah datang berkunjung merasa nyaman, betah dan ingin kembali berkunjung ke tempat Wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Semakin Menjamurnya penginapan, cottage, resort dan home stay dari harga yang murah sampai harga yang lumayan mahal tergantung dari fasilitas yang ditawarkan yang tersebar di daerah





Loksado, membuat wisatawan mudah memilih penginapan yang ingin dipilihnya, sehingga kendala dalam hal susah mencari penginapan sudah tidak ada lagi.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	50,00%	51,43%	102,86

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional sebesar 102,86% (Tercapai), terealisasi 51,43% dari target 50,00%.

Dari jumlah sebanyak 35 sarana dan prasarana cabang olahraga sesuai dengan standar nasional sampai dengan tahun 2018 pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki sebanyak 18 unit.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	Jumlah fasilitas dan prasarana cabang olahraga terbangun dalam kondisi baik dibagi Jumlah fasilitas dan prasarana olahraga yang diperlukan dikali 100	$= \frac{18}{35} \times 100 \% = 51,43\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	33,33 %	36,36 %	45,45 %	48,48 %	51,43 %	46%	50%





Pencapaian realisasi indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan bidang Cipta Karya sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	9.685.900.330	9.664.369.000	99,78

SASARAN 3 ; MENURUNNYA PERSENTASE KEMISKINAN

Pencapaian target kinerja sasaran 3 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata** di Misi II **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	4,50%	1,50%	299,44
Rata-rata			299,44 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran persentase penduduk dibawah garis kemiskinan mencapai kinerja 299,44% dan dikatakan tercapai. Indikator tersebut dari target sebesar 4,50% terealisasi 1,50%.

Persentase penduduk miskin diperoleh dari jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan adalah sebanyak 3.615 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kab. HSS adalah 240.547 jiwa. Sehingga Persentase penduduk miskin Tahun 2018 adalah 1,50%.





Formula Realisasi Capaian Kinerja persentase penduduk dibawah garis kemiskinan

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	$= \frac{\sum \text{Penduduk dibawah garis kemiskinan di HSS}}{\sum \text{Penduduk Kab. HSS}} \times 100\%$	$= \frac{3.615}{240.547} \times 100\%$ $= 1,50\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	5,02%	4,57%	4,28%	2,86%	1,50%	4,81%	4,5%

Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebanyak 24.141 KK terdiri dari :

1. Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) dan mampu melaksanakannya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebanyak 255 KK (Tahun 2014 = 34 KK, Tahun 2015 = 82 KK, Tahun 2016 = 47 KK, Tahun 2017 = 92 KK). Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Pada Triwulan IV Tahun 2018 ini dana Bansos untuk UEP diberikan kepada 92 KK dari yang ditargetkan sebanyak 130 KK. Kurang dari target dikarenakan setelah verifikasi dan validasi terdapat calon penerima bansos yang tidak memenuhi persyaratan. Penerima UEP tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan data sebagai berikut :

Data Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2018

KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN ANGKINANG	7	-	7
KECAMATAN DAHA BARAT	2	-	2
KECAMATAN DAHA UTARA	8	-	8
KECAMATAN DAHA SELATAN	7	-	7
KECAMATAN KALUMPANG	-	-	-
KECAMATAN KANDANGAN	5	2	7
KECAMATAN LOKSADO	14	-	14





KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN SIMPUR	2	3	5
KECAMATAN SUNGAI RAYA	3	3	6
KECAMATAN PADANG BATUNG	6	23	29
KECAMATAN TELAGA LANGSAT	7	-	7
JUMLAH	61	31	92

Dari 92 KK penerima bantuan UEP, yang mampu melakukan usaha ekonomis produktif dengan baik sebanyak 80 KK;

2. Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial pangan (Rastra Pusat dan Bantuan Pangan Non Tunai) sesuai dengan peruntukannya diberikan kepada 13.835 KPM setiap bulannya. Untuk Rastra Daerah diberikan kepada 6.562 KPM.

Rastra Daerah diberikan kepada KPM dari keluarga miskin yang belum terakomodir dalam data penerima Bansos Pangan (Rastra Pusat dan Bantuan Pangan Non Tunai).

3. Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebanyak 3.031 KK (Tahun 2014 = 676 buah, Tahun 2015 = 745 buah, Tahun 2016 = 849 buah, Tahun 2017 = 761 buah). Pendanaan bersumber dari APBD Kab. HSS.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 telah dilaksanakan fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 378 buah terdiri dari 191 buah melalui anggaran murni dan 187 buah melalui anggaran perubahan yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan data sebagai berikut :

Data Bansos Program Rumah Sejahtera Tahun 2018

KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN ANGKINANG	-	14	14
KECAMATAN DAHA BARAT	-	10	10
KECAMATAN DAHA UTARA	2	23	25
KECAMATAN DAHA SELATAN	15	26	41
KECAMATAN KALUMPANG	11	8	19
KECAMATAN KANDANGAN	37	22	59

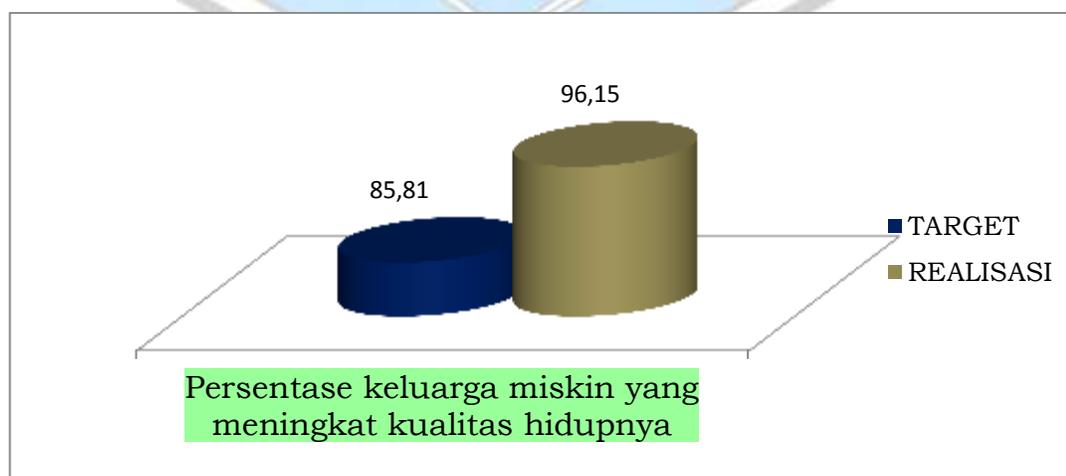




KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN LOKSADO	12	9	21
KECAMATAN SIMPUR	58	15	73
KECAMATAN SUNGAI RAYA	49	22	71
KECAMATAN PADANG BATUNG	-	21	21
KECAMATAN TELAGA LANGSAT	7	17	24
JUMLAH	191	187	378

Jumlah total keluarga miskin berdasarkan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) sebanyak 25.107 Jiwa (Total Anggota Keluarga PKH).

Pemerintah Daerah juga mengupayakan satu terobosan yaitu pemberian bantuan sosial Rastra Daerah kepada KPM dari keluarga miskin yang belum terakomodir dalam data penerima Bansos Pangan (Rastra Pusat dan Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 6.562 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Selain itu juga dikarenakan terlaksananya kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Data kinerja yang tersaji dalam tabel di atas dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Faktor pendukung dalam mencapai pencapaian grafik diatas yaitu:

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa, Relawan Sosial lainnya dan Dunia Usaha yang turut mendukung program pemberdayaan sosial;





- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
- Adanya motivasi dan keinginan masyarakat penerima program/kegiatan untuk berubah menjadi lebih baik.

Faktor penghambat dalam pencapaian grafik diatas yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu atau keluarga yang layak menerima program-program pemberdayaan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Regulasi atau prosedur pemberian program-program pemberdayaan sosial pada skala nasional dan daerah yang berubah-ubah;
- Kemampuan dari penerima manfaat dalam melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial yang diterima masih rendah;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan pemberdayaan sosial dalam mengintervensi pemberdayaan sosial masyarakat miskin.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin penerima program pemberdayaan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56.362.880	53.157.880
Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	6.279.134.900	6.201.669.900
Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153.106.000	151.406.000





SASARAN 4 ; MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Pencapaian target kinerja sasaran 4 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata** di Misi II **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	70,00%	100,00%	142,86
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70,00%	71,91%	102,73
Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70,00%	100,00%	142,86
Rata-rata			129,48 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencapai kinerja 129,48 % dan dikatakan tercapai.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	70,00%	100,00%	142,86

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera sebesar 142,86% (Tercapai), terealisasi 100% dari target 70%.

Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (SaMping DeSa) adalah sarjana kontrak yang diperbantukan untuk melakukan pendampingan terhadap upaya pemberdayaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat, berjiwa sosial tinggi dan telah lulus seleksi yang bertugas memberikan pendampingan dan pemberdayaan terhadap lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam bentuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun perhitungan realiasi tersebut didapatkan dari formulasi Jumlah desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera





(sebanyak 148) dibanding dengan seluruh jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (sebanyak 148desa/kel) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	$= \frac{\sum \text{desa yang tersedia samping desa}}{\sum \text{desa atau kelurahan di Kab. HSS}} \times 100\%$	$= \frac{148}{148} \times 100\% = 100\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	33,78	66,22	100	100	100	66%	70%

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
- Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4.280.840.000	4.262.250.000

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70,00%	71,91%	102,73

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar 102,73% (Tercapai), terealisasi 71,91% dari target 70%.





Partisipasi masyarakat diukur dengan menilai lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif, karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga kemasyarakatan antara lain LPM, Posyandu, RT/RK. Jumlah LKD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1.627 buah, dengan rincian pada masing-masing jenis LKD sebagai berikut :

LPM Desa/Kel	:	148
PKK Desa/Kel	:	148
RT/RK	:	1.030
Posyandu	:	296
Lembaga Adat	:	5

Keaktifan LKD dinilai dari beberapa aspek antara lain memiliki sekretariat, legalitas organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, berpartisipasi pada proses perencanaan pembangunan di desa serta keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui Tim Pelaksana Kegiatan. Instrumen yang digunakan untuk menilai keaktifan LKD melalui evaluasi dan penilaian terhadap semua LKD dengan kriteria penilaian sebagaimana tersebut di atas. Pada akhir tahun 2018 dilakukan penilaian dan diperoleh data bahwa terdapat 1.170 LKD dengan kategori aktif.

Adapun perhitungan realiasi tersebut didapatkan dari formulasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif (sebanyak 1.170) dibanding dengan seluruh Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Kab. HSS (sebanyak 1.627) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	$= \frac{\sum \text{LKD yang aktif}}{\sum \text{LKD yang ada di Kab. HSS}} \times 100\%$ <p>LKD : Lembaga Kemasyarakatan Desa</p>	$= \frac{1.170}{1.627} \times 100\% = 71,91\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	54 %	60,00%	63,77%	65,77%	71,91%	65%	70%





Capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada tahun 2017 yaitu 71,91 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 70 % menunjukkan telah tercapai.

Tingkat partisipasi masyarakat digerakkan oleh lembaga kemasyarakatan desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dan membina kemasyarakatan, khususnya sebagai wadah masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan demikian keaktifan LKD menjadi penentu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan keaktifan LKD dilakukan melalui pembinaan-pembinaan berupa monitoring dan meningkatkan kapasitas pengurus LKD melalui pelatihan pengurus LKD.

Setelah dilakukan pembinaan dan pada akhir tahun dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap LKD, menunjukkan adanya kemajuan antara target jumlah LKD yang aktif dengan realisasi yang dicapai.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Semua kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendorong LKD untuk bisa aktif berperan dalam proses pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa.tercapainya target kinerja ini karena proses pembinaan terhadap LKD dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.Berdasarkan data hasil evaluasi terhadap semua LKD menunjukkan LKD yang aktif mencapai 1.170 LKD.

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	707.345.400	642,972,900
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.482.400	467.958.900





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70,00%	100,00%	142,86

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan sebesar 142,86% (Tercapai), terealisasi 100% dari target 70%.

Lembaga ekonomi di perdesaan diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan pada lingkup kerjasama beberapa desa menjadi kawasan perdesaan, ekonomi masyarakat digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma). Maka pengukuran atas pelayanan lembaga ekonomi diukur melalui ketersediaan BUMDes pada desa yang bersangkutan. Upaya untuk menginisiasi pembentukan BUMDes dilakukan dengan pendampingan kepada aparatur desa, dari upaya tersebut sampai dengan bulan Desember 2018 telah terdapat 144 Desa yang telah membentuk BUMDes.

Adapun perhitungan realisasi tersebut didapatkan dari formulasi Jumlah Desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan (sebanyak 144) dibanding dengan seluruh Jumlah Desa di Kab. HSS (sebanyak 144) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	$= \frac{\sum \text{Desa yg terlayani LEP}}{\sum \text{Desa yang ada di Kab. HSS}} \times 100\%$ <p>LEP : lembaga ekonomi perdesaan</p>	$= \frac{144}{144} \times 100 \% = 100\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	63,88%	65,97%	66,66	98,61	100	66%	70%



Apabila dilihat dari tabel diatas, setiap tahun ada tren kenaikan terhadap realisasi indikator kinerja Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan.

Ekonomi perdesaan banyak digerakkan oleh kelompok-kelompok usaha ekonomi baik usaha yang diusahakan secara perorangan maupun kolektif. Namun sebagai penggerak utama ekonomi perdesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian keberadaan BUMDes di setiap desa sangat penting dalam memberikan pelayanan ekonomi masyarakat desa.

Upaya untuk menginisiasi pembentukan BUMDes dilakukan melalui pendampingan oleh aparatur Dinas PMD dibantu oleh tenaga ahli P3MD.



Pendampingan pembentukan BUMDes



Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melali pelatihan

Pembentukan BUMDes sampai dengan akhir tahun 2018 telah tercapai 144 buah BUMDes atau 100 % semua desa telah membantuk BUMDes.

Jenis lembaga ekonomi perdesaan yaitu berupa BUMDes/BUMDes Bersama, UPK-SPP dan Pasar Desa. UPK Simpan Pinjam dibentuk pada program PNPM mandiri Perdesaan saat ini ada 6 UPK, sedangkan pasar desa terdapat 43 pasar desa.

Pengukurannya dilakukan dengan menghitung jumlah desa yang minimal pada desa tersebut terdapat satu jenis atau lebih lembaga ekonomi perdesaan, baik itu BUMDes, UPK-SPP maupun Pasar Desa. Pada tahun 2017 terdapat 142 Desa yang terdapat lembaga ekonomi perdesaan atau jika dibandingkan dengan jumlah desa di kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 144 Desa berarti mencapai 95,94 %. Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 68 %. Untuk mencapai target kinerja ini dengan melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui kegiatan pemberdayaan perekonomian





masyarakat. Disamping itu melalui dana yang bersumber dari APBDes juga telah dianggarkan untuk pelaksanaan pembentukan BUMDesa, namun belum semua desa membentuk BUMDesa karena masih dalam proses pembentukan. Upaya untuk pembentukan BUMDesa dan pengembangan BUMDesa saat ini masih dalam proses fasilitasi pembentukan bagi Desa yang belum memiliki BUMDesa sedangkan yang sudah terbentuk BUMDesa diberikan pelatihan bagi pengurus BUMDes yang dilaksanakan dalam dua tahap dengan jumlah keseluruhan BUMDes sebanyak 142 BUMDes.

Indikator Kinerja	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan perekonomian masyarakat	88.346.000	87.191.000

SASARAN 5 ; MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pencapaian target kinerja sasaran 5 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata** di Misi II **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
persentase ketersediaan pangan utama (beras)	312,82%	541,59%	173,13
Rata-rata			173,13 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran Meningkatkan ketahanan pangan daerah mencapai kinerja 173,13% dan dikatakan tercapai dengan realisasi tahun 2018 sebesar 541,59% terhadap target 312,82%.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
persentase ketersediaan pangan utama (beras)	394,40	414,39	412,67	415,57	541,59	311,82	312,82





Apabila dilihat dari tabel diatas, setiap tahun ada tren kenaikan terhadap realisasi indikator kinerja persentase ketersediaan pangan utama (beras).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
- Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	328.250.000	308.189.000

SASARAN 6 ; TERWUJUDNYA HULU SUNGAI SELATAN SEBAGAI DAERAH OKSIGEN

Pencapaian target kinerja sasaran 6 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, dan Pariwisata** di Misi II **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB:			
a. RTH Publik	30,00%	39,13%	130,43
b. RTH Privat	11,00%	12,53%	113,91
Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	80,00%	85,71%	107,14
Rata-rata			117,16 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator sasaran Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen mencapai kinerja 117,16 % dan dikatakan tercapai.





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik	30,00%	39,13%	130,43

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik sebesar 130,43% (Tercapai), terealisasi 39,13% dari target 30%.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Adapun perhitungan realisasi tersebut didapatkan dari formulasi luas RTH Publik (sebanyak 8.116) dibanding dengan seluruh Luas Wilayah ber HPL/HGB (sebanyak 20.740) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik	$= \frac{\text{Luas RTH Publik}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\%$	$= \frac{8.116}{20.740} \times 100\% = 39,13\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik	26,03	27,26	33,79	39,13	39,13	29%	30%

Apabila dilihat dari tabel diatas, setiap tahun ada tren kenaikan terhadap realisasi indikator kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Publik.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pengelolaan RTH		
- Pemeliharaan RTH	3.575.706.000	3.386.235.800
- Penataan RTH	3.575.706.000	3.386.235.800

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat	11,00%	12,53%	113,91

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat sebesar 113,91% (Tercapai), terealisasi 12,53% dari target 11%.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik swasta yang ditanami tumbuhan.

Adapun perhitungan realisasi tersebut didapatkan dari formulasi Jumlah luas RTH Privat (sebanyak 6.500) dibanding dengan seluruh Jumlah Desa di Kab. HSS (sebanyak 51.860) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat	$= \frac{\text{Luas RTH Privat}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\%$	$= \frac{6.500}{51.860} \times 100\% = 12,53\%$





Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat	6,93	8,56	8,65	12,53	12,53	10%	11%

Apabila dilihat dari tabel diatas, setiap tahun ada tren kenaikan terhadap realisasi indikator kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: RTH Privat.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	80,00%	85,71%	107,14

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%) sebesar 107,14% (Tercapai), terealisasi 85,71% dari target 80%.

Adapun perhitungan realisasi tersebut didapatkan dari formulasi Jumlah titik pantau yg memenuhi baku mutu (sebanyak 6 buah) dibanding dengan seluruh Jumlah titik pantau pengujian (sebanyak 7 buah) dikali 100.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	$= \frac{\sum \text{titik pantau yg memenuhi baku mutu}}{\sum \text{titik pantau pengujian}} \times 100\%$	$= \frac{6}{7} \times 100\% = 85,71\%$





Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	NA	NA	NA	100	85,71	75%	80%

SASARAN 7 ; TERJAMINNYA KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI LANSIA, ANAK YATIM/ PIATU DAN PENYANDANG CACAT

Pencapaian target kinerja sasaran 7 pada **Tujuan 4 : Mengembangkan Potensi Masyarakat Berbasis Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, dan Pariwisata** di Misi II **“Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah.”** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50% (3630 orang)	85,80%	171,59
Rata-rata			171,59%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai kinerja 171,59%.

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial didapat dari Jumlah PMKS yang telah





memperoleh bantuan sosial dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dikali 100%.

Tabel
Indikator Kinerja dan Formula Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dikali 100%	$\frac{14.280}{16.644} \times 100\%$ = 85,80%

Hambatan dan permasalahan yang dialami dalam memenuhi indikator ini adalah:

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial layak yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar memerlukan waktu yang cukup lama.
- Prosedur pemberian bantuan sosial yang rumit dan selektif.
- Ketergantungan PMKS terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi.
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi lintas sektoral .
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Memberikan pendampingan kepada PMKS yang menerima program bantuan sosial.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,73	66,72	84,88	81,37	85,80	45%	50%





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial		
- Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	67.160.760	61.750.600
- Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	123.203.880	119.421.000
- Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	480.146.880	454.546.880
Program Pembinaan Anak Terlantar		
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	183.360.000	182.780.000
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	154.853.440	61.044.000
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		
Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	113.092.640	59.417.640
Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111.050.000	25.945.000
Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		
Pendukung Program Keluarga Harapan	675.894.200	235.480.000





**MISI
3**

**MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai sasaran-sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut;

**TUJUAN
1**

**MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA
MASYARAKAT KURANG MAMPU**

Capaian **Tujuan I** yakni **“Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.”** Pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** dari realisasi capaian 7 sasaran dengan 13 indikator kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 7 (tujuh) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 1 ; MENINGKATNYA STRUKTUR EKONOMI YANG KUAT DENGAN
TINGKAT PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN MERATA**

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada Tujuan I : **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu** pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6,60%	6,13%	92,88
Rata-rata			92,88%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) pada tahun 2018 belum tercapai dari target. Realiasi di tahun ini mendapat 6,13% dari 6,60% target yang ditentukan.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :





INDIKATOR KINERJA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
							2017	2018
Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,68%	5,79%	6,05%	6,08%	6,08%	6,13%	6,46%	6,6%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) dari tahun ke tahun semakin meningkat.

SASARAN 2 ; MENINGKATNYA PENDAPATAN PER KAPITA

Pencapaian target kinerja sasaran 2 pada Tujuan I : **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu** pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
PDRB perkapita (harga konstan)	17.052	18.108	106,19%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator PDRB perkapita (harga konstan) pada tahun 2018 telah mencapai kinerja angka 106.19%. Realisasi di tahun ini mendapat angka 18.108 terhadap target 17.052 yang ditentukan.

Perbandingan realisasi kinerja PDRB perkapita (harga konstan) dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
PDRB perkapita (harga konstan)	15.714,80	16.468,86	17.262,54	18.108	18.108	16.804	17.052

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator PDRB perkapita (harga konstan) dari tahun ke tahun semakin meningkat.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	21.590.000	21.590.000
- Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	202.848.020	202.817.000
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	98.424.640	84.015.000
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan	51.435.100	53.435.100

SASARAN 3 ; Meningkatnya produksi hasil pertanian

Pencapaian target kinerja sasaran 3 pada Tujuan I : **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu** pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
Peningkatan produksi padi pertahun	16.998 ton (produksi padi 284.117 ton)	14.873 ton (produksi padi 268.526 ton)	87,50
Peningkatan produksi karet	728,17 ton	860 ton	118,10
Peningkatan Produksi Kayu Manis	9,43 ton	15 ton	62,87
Rata-rata			89,49 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya produksi hasil pertanian mencapai kinerja 89,49 % dan dikatakan belum tercapai.





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Peningkatan produksi padi pertahun

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Peningkatan produksi padi pertahun	16.998 ton (produksi padi 284.117 ton)	14.873 ton (produksi padi 268.526 ton)	87,50

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Peningkatan produksi padi pertahun sebesar 87,50% (Tidak Tercapai), terealisasi 14.873 ton dari target Peningkatan produksi padi tahun 2018 sebanyak 16.998 ton. Pada tahun 2018 produksi padi mengalami kenaikan sebesar 14.873 ton gabah kering giling dengan total produksi 268.526 ton dibanding dengan produksi padi pada tahun 2017 sebanyak 253.653 ton gabah kering giling.

Formulasi Indikator Kinerja Peningkatan produksi padi pertahun

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Peningkatan produksi padi pertahun	Jumlah Produksi Padi tahun (n) dikurangi Jumlah Produksi Padi tahun (n-1)	268.526 ton – 253.653 ton = 14.873 ton

Tidak tercapainya peningkatan produksi dibandingkan dengan target disebabkan oleh :

1. Adanya penurunan luas panen, panen tahun 2017 seluas 52.241 Ha sedangkan panen tahun 2018 seluas 51.241 Ha sehingga terjadi penurunan luas panen seluas 820 Ha.
2. Adanya penurunan produktivitas 1,57 Kw/Ha, pada tahun 2017 produktivitas 48,55 Kw/Ha sedangkan tahun 2018 produktivitas 46,98 Kw/Ha.

Penurunan produktivitas ini disebabkan antara lain :

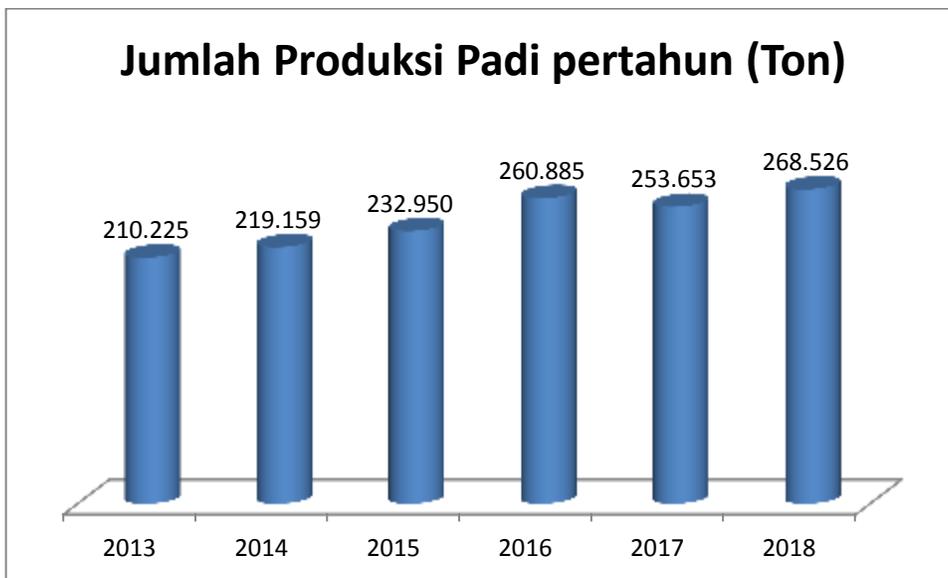
- a. Adanya serangan hama dan penyakit pada pertanaman padi.
 - b. Penggunaan Jenis dan dosis pupuk yang belum berimbang.
 - c. Penggunaan varietas unggul yang tidak berlabel dan varietas local yang produktivitasnya rendah.
 - d. Waktu pengambilan sampel ubinan.
3. Bendungan Amandit belum berfungsi maksimal. Untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura lainnya mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Usaha yang dilaksanakan untuk peningkatan produksi :

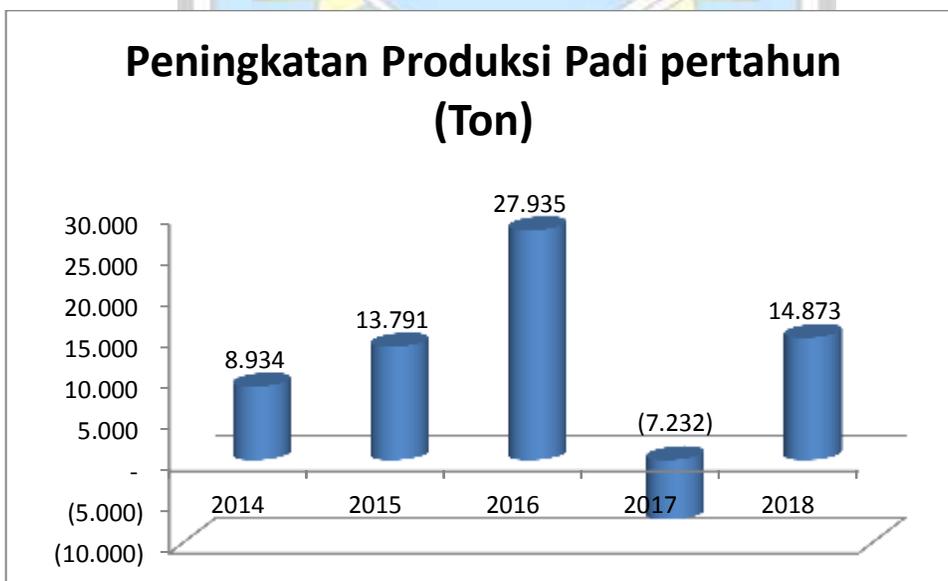




- Adanya perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
- Bantuan dan Penggunaan Alsintan seperti Handtraktor, Pompa Air, Power Thresher dan lain-lain.
- Penyediaan benih dan pupuk bersubsidi
- Kegiatan Optimasi Lahan
- Peningkatan Luas Tanam terutama di daerah lebak sebagai dampak elnino.
- Perbaikan cara bercocok tanam oleh petani.

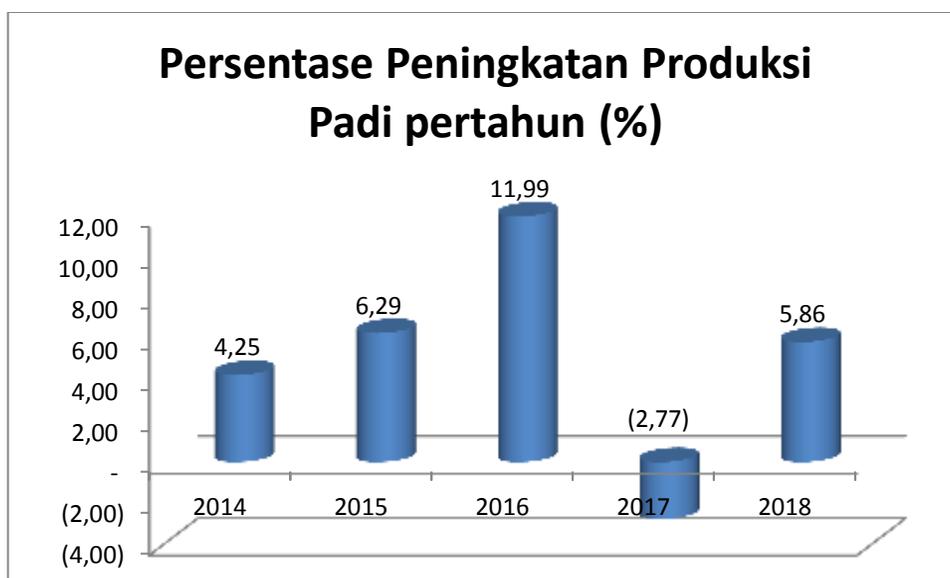


Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018





Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Peningkatan produksi padi pertahun	8.934 ton	13.791 ton	27.935 ton	-7.232 ton	14.873 ton	11.089 ton	16.998 ton

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	248.032.500	250.995.000
- Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	224.370.000	224.370.000
- Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	317.532.000	276.933.250
- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan	254.180.000	216.892.500
- Pengembangan Intensifikasi Jagung dan Umbi	195.740.000	167.110.750





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

PENINGKATAN PRODUKSI KARET PERTAHUN

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Peningkatan produksi karet	728,17 ton	860 ton	118,10

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Peningkatan Produksi Karet” telah tercapai 118,10%, terealisasi 860 ton dari target 728,17 ton tahun 2018.

Formulasi Indikator Kinerja Peningkatan produksi karet pertahun

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Peningkatan produksi karet	Jumlah Produksi Karet tahun (n) dikurangi Jumlah Produksi Karet tahun (n-1)	11.784 ton – 10.924 ton = 860 ton

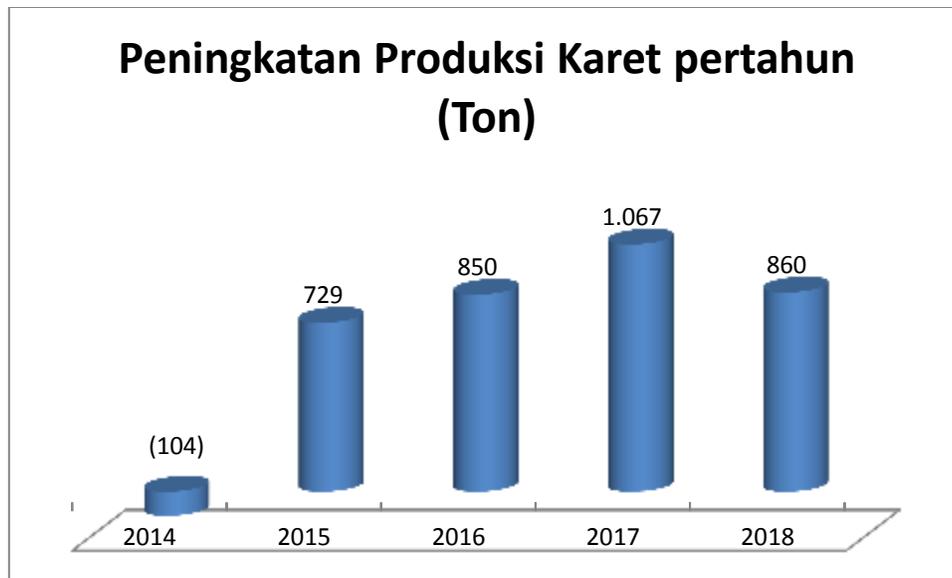
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	
						2017	2018
Peningkatan produksi karet	-104 ton	729 ton	850 ton	1.067 ton	860 ton	728,17 ton	728,17 ton

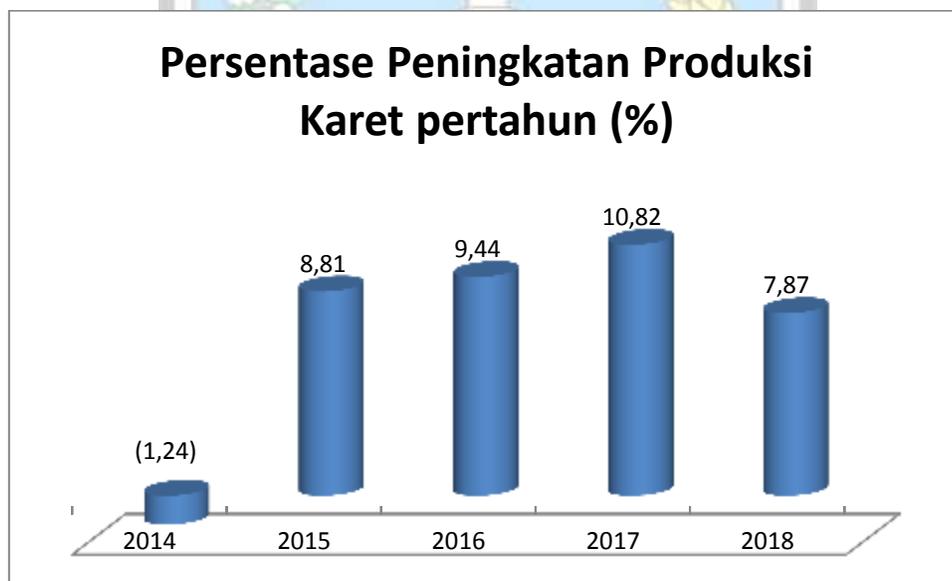


Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018





Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
- Peningkatan Sistem Insentif dan Disentif Bagi Petani/Kelompok Tani	338.738.200	211.721.500
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
- Pengembangan Karet	162.921.400	145.460.000
- Perlindungan Tanaman Perkebunan	71.592.000	67.592.000





Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

PENINGKATAN PRODUKSI KAYU MANIS

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Peningkatan Produksi Kayu Manis	9,43 ton	15 ton	62,87

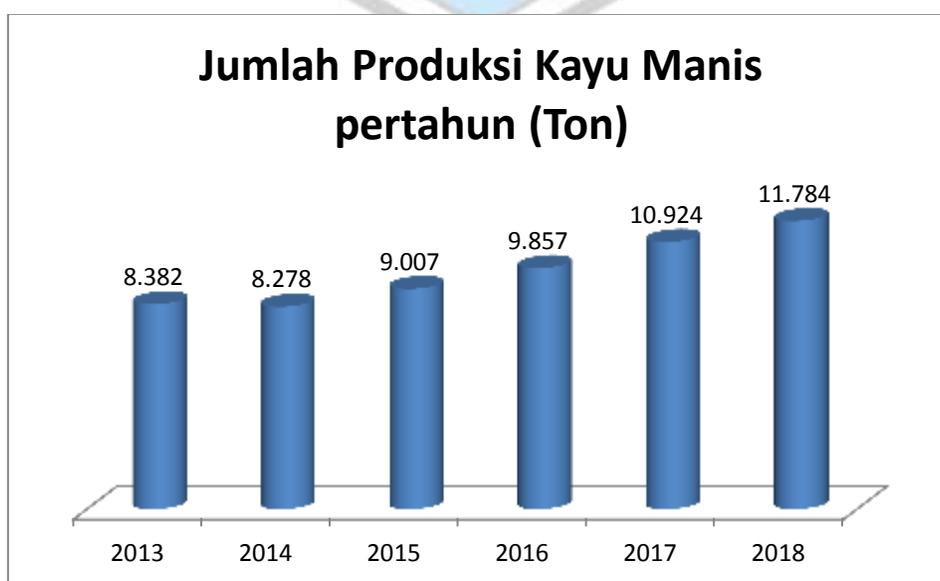
Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Peningkatan Produksi Kayu Manis” telah tercapai 62,87%, terealisasi 15 ton dari target 9,43 ton tahun 2018.

Formulasi Indikator Kinerja Peningkatan produksi karet pertahun

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Peningkatan Produksi Kayu Manis	Jumlah Produksi Kayu Manis tahun (n) dikurangi Jumlah Produksi Kayu Manis tahun (n-1)	1.682 ton – 1.667 ton = 15 ton

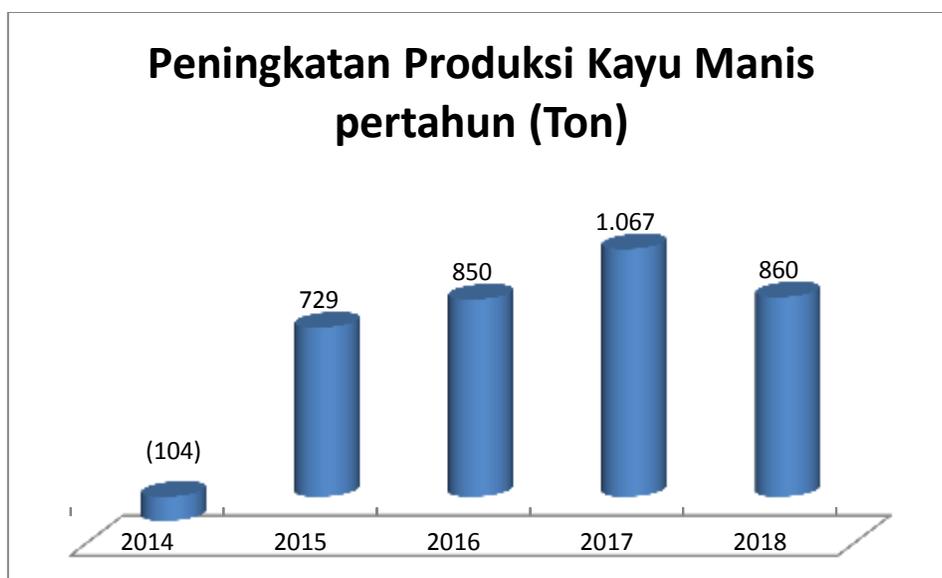
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					Target RPJMD
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Peningkatan Produksi Kayu Manis	6 ton	70 ton	88 ton	43 ton	15 ton	9,43 ton

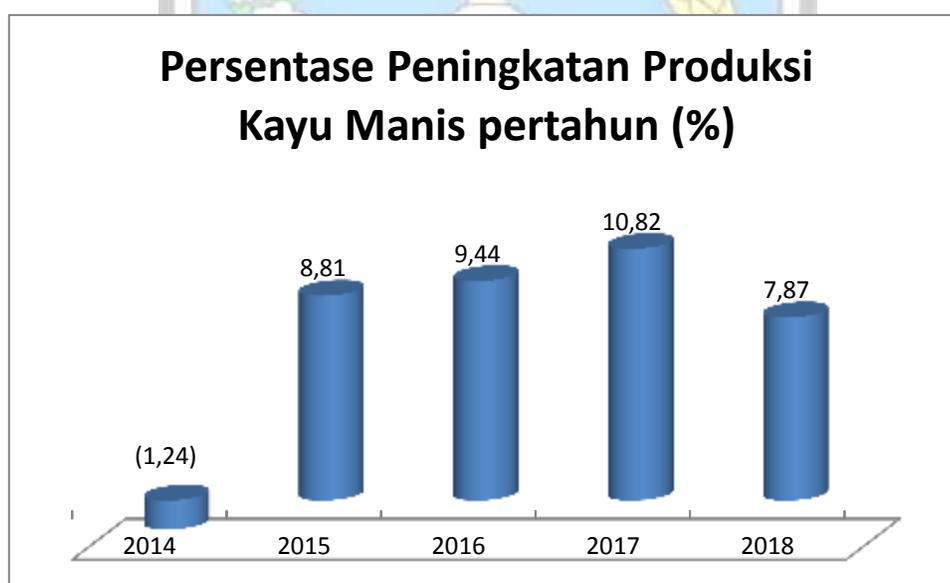


Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018





Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		
- Pengembangan Kayu Manis	28.334.320	28.334.320




**TUJUAN
2**
**MENCIPTAKAN TENAGA KERJA PRODUKTIF YANG MAMPU
DISERAP DUNIA KERJA**

Capaian **Tujuan II** yakni **“Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja”** Pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** dari realisasi capaian 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 3 (tiga) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 1 ; MENINGKATNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA USIA
PRODUKTIF**

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada Tujuan II : **Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja** pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%	41,61%	100,00
Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,10%	2,97%	95,81
Tingkat partisipasi angkatan kerja.	66,72%	66,72%	100,00
Rata-rata			98,60 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja Usia Produktif masih tercapai 98,60%.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%	41,61%	100,00





Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 100% (Tercapai), terealisasi 41,61% dari target Persentase Pencari kerja yang ditempatkan tahun 2018 sebesar 41,61%.

Adapun perhitungan realisasi tersebut didapatkan dari formulasi Jumlah penempatan tenaga kerja (sebanyak 905 orang) dibanding dengan seluruh Jumlah pencari kerja terdaftar (sebanyak 2.175 orang) dikali 100.

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

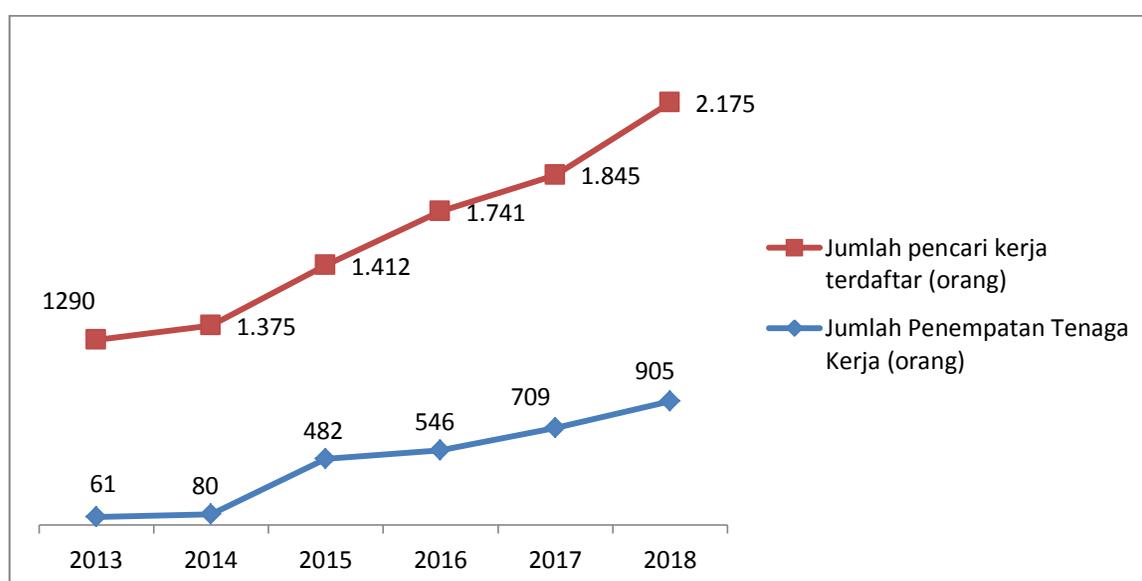
Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	$= \frac{\sum \text{penempatan tenaga kerja}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	$= \frac{905}{2.175} \times 100\% = 41,61\%$

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	5,82%	34,14%	31,36%	38,43%	41,61%	38,42%	41,61%

Apabila dilihat dari tabel diatas, setiap tahun ada tren kenaikan terhadap realisasi indikator kinerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Berbanding Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kurun Waktu 2013-2018





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
- Pelatihan keterampilan service sepeda motor	290.825.500	274.067.500
- Pelatihan Keterampilan Menjahit	255.440.000	274.067.500

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,10%	2,97%	95,81

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Persentase tingkat pengangguran terbuka” tercapai 95,81%. terealisasi 2,97% dari target 3,10% tahun 2018.

Adapun perhitungan capaian kinerja 95,81% tersebut didapatkan dari realiasi tahun 2018 (2,97%) dibanding dengan target tahun 2018 (3,10%) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase tingkat pengangguran terbuka

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase tingkat pengangguran terbuka	Jumlah Penganggur Dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja 17 tahun ke atas dikali 100	$= \frac{3.490}{117.515} \times 100 \% = 2,97\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

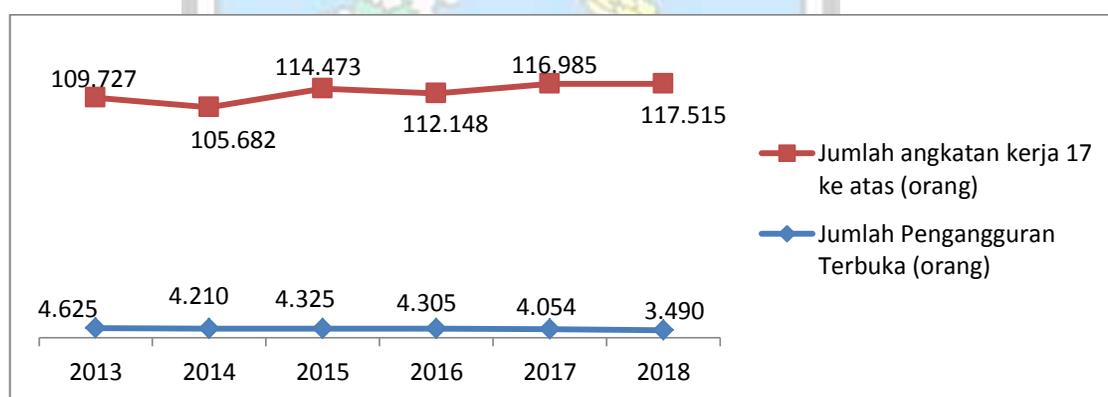




INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,98%	3,78%	3,84%	3,47%	2,97%	3,15%	3,10%

Apabila dilihat dari tabel diatas, dari tahun ke tahun ada tren positif terhadap realisasi indikator kinerja Persentase tingkat pengangguran terbuka dimana pengangguran semakin menurun.

Jumlah Angkatan Kerja 17 Tahun Keatas Berbanding Jumlah Pengangguran Terbuka Kurun Waktu 2013-2018



Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
- Pendayagunaan Tenaga Kerja Berbasis Padat Karya	85.231.000	84.045.000

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,72%	66,72%	100,00





Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Tingkat partisipasi angkatan kerja” telah tercapai 100%. terealisasi 66,72% dari target 66,72% tahun 2018.

Adapun perhitungan capaian kinerja 100 % tersebut didapatkan dari realiasi tahun 2018 (66,72%) dibanding dengan target tahun 2018 (66,72%) dikali 100 persen.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Tingkat partisipasi angkatan kerja

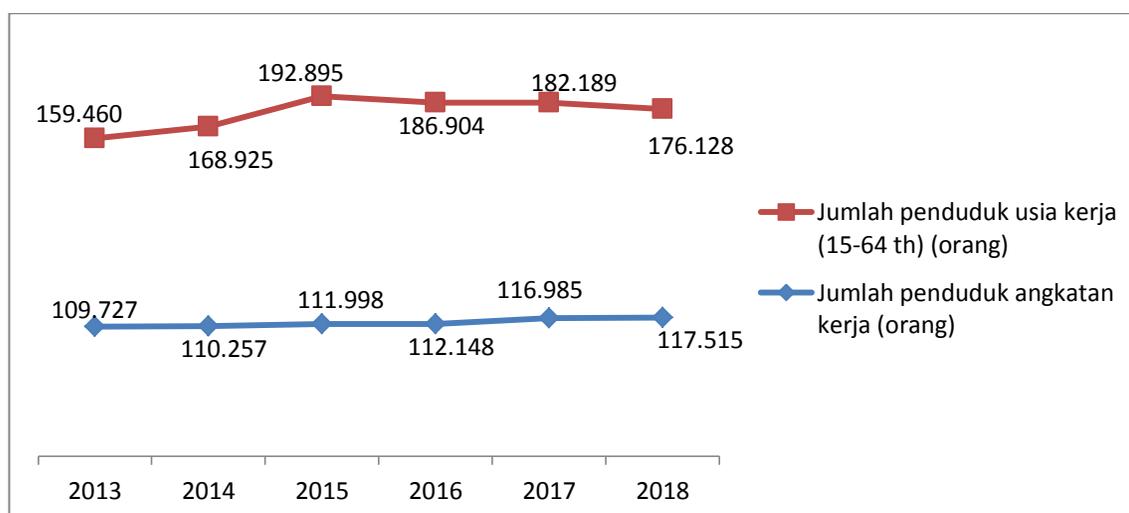
Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64 th)}} \times 100\%$	$= \frac{117.515}{176.128} \times 100\% = 66,72\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,27%	58,06%	60%	64,21%	66,72%	65,62%	66,72%

Apabila dilihat dari tabel diatas, dari tahun ke tahun ada tren positif terhadap realisasi indikator kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja dimana partisipasi angkatan kerja semakin naik.

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berbanding Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 th) Kurun Waktu 2013-2018




SASARAN 2 ; BERKEMBANGNYA PERAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada Tujuan II : **Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja** pada Misi III : **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Persentase peningkatan koperasi aktif	100% (153 KA)	100% (153 KA)	100,00%
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,68%	10,50%	66,96
Rata-rata			83,48 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran Berkembangnya Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah pada tahun 2018 telah mencapai kinerja 83,48 % (tidak tercapai).

**Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran
PERSENTASE PENINGKATAN KOPERASI AKTIF**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase peningkatan koperasi aktif	100% (153 KA)	100% (153 KA)	100,00%

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Persentase peningkatan koperasi aktif” telah tercapai (100%). terealisasi 100% dari target 100% tahun 2018.

**Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja yang
Ditempatkan**

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase peningkatan koperasi aktif	$= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi keseluruhan}} \times 100\%$	$= \frac{153}{153} \times 100 \% = 100,01\%$

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

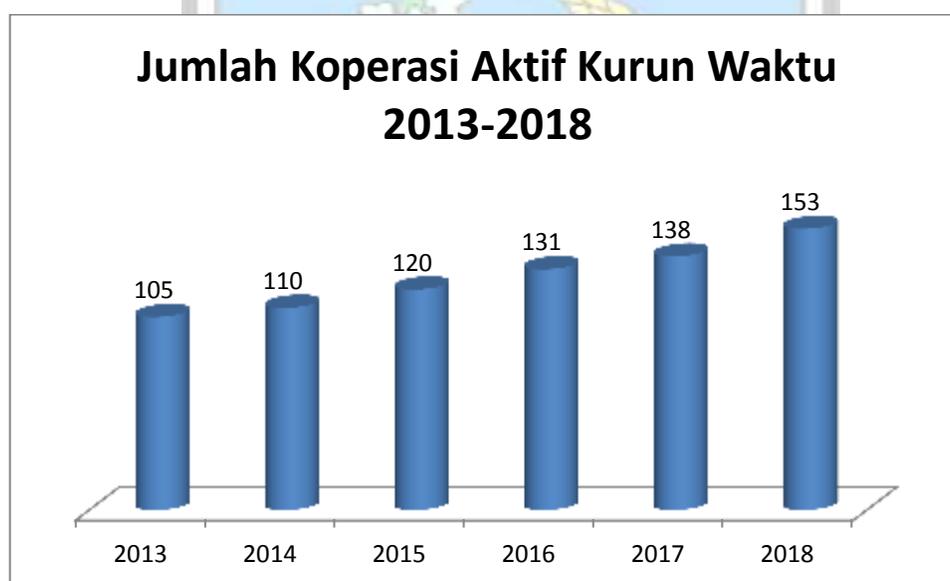




INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase peningkatan koperasi aktif	72,37%	75,47%	85,62%	90,20%	100%	90%	90,91%

Apabila dilihat dari tabel diatas, dari tahun ke tahun ada tren positif terhadap realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan koperasi aktif semakin naik.

Jumlah Koperasi Aktif Kurun Waktu 2013-2018



Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
- Peningkatan Gerakan Kualitas Kelembagaan Koperasi	65.240.000	41.843.000

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,68%	10,50%	66,96



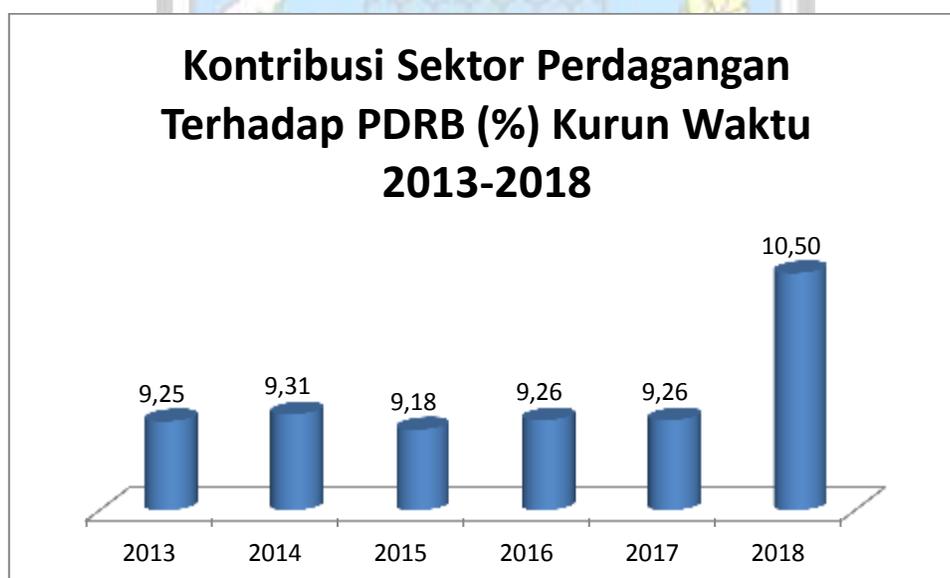


Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator Persentase peningkatan koperasi aktif pada tahun 2018 telah mencapai kinerja 66,96%. (belum tercapai) Realiasi pada tahun ini mendapat angka 10,50% dari target 15,68% yang telah ditentukan.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,31%	9,18%	9,26%	9,26%	10,50%	14,25%	15,68%

Apabila dilihat dari tabel diatas, dari tahun ke tahun ada tren positif terhadap realisasi indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB semakin naik.



SASARAN 3 ; Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif

Pencapaian target kinerja sasaran 3 pada Tujuan II : **Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja** pada Misi III : **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut :





INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Pembinaan UMKM (Wirausaha Baru)	(45.096 UMKM yang dibina)	47.353 orang	105,00 %

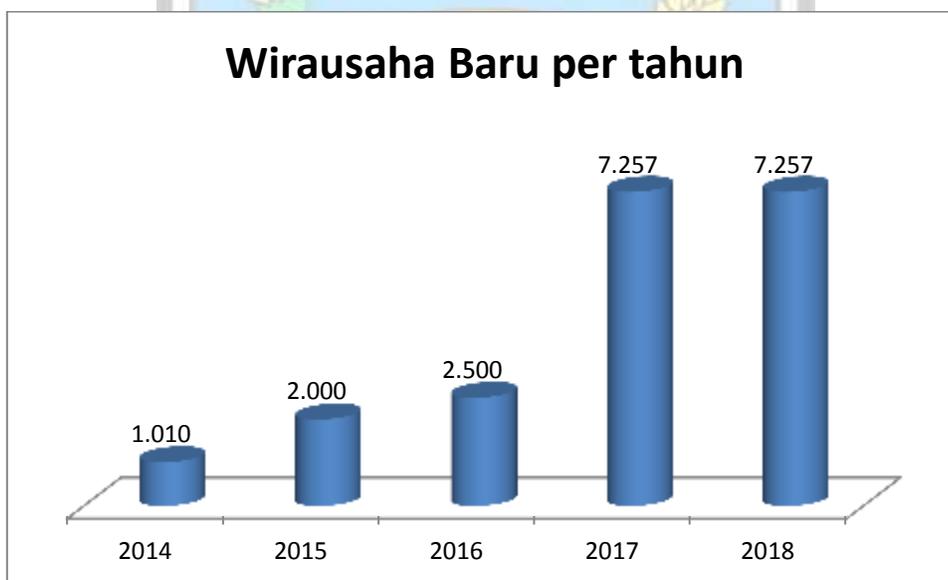
Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator Pembinaan UMKM (Wirausaha Baru) pada tahun 2018 telah mencapai kinerja 105,00%. (tercapai) Realiasi produksi pada tahun ini mendapat angka 47.353 orang dari target 45.096 UMKM yang telah ditentukan.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Pembinaan UMKM (Wirausaha Baru)	41.106	43.106	45.606	47.353	47.353	45.096	45.096

Apabila dilihat dari tabel diatas, dari tahun ke tahun ada tren positif terhadap realisasi indikator kinerja Pembinaan UMKM semakin naik.

Jumlah Wirausaha Baru Kurun Waktu 2014-2018




**TUJUAN
3**
MENINGKATKAN PENDAPATAN SUMBER KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Capaian **Tujuan II** yakni **“Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja”** Pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** dari realisasi capaian 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.

Pencapaian tujuan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 ; PENINGKATAN PAD, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada Tujuan II : **Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja** pada **Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,21%	140,41%	449,89
Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3,00%	2,78%	92,67
Rata-rata			271,28%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya pada tahun 2018 telah mencapai kinerja 271,28% (tercapai).

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran
PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

INDIKATOR	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,21%	140,41%	449,89





Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator Persentase peningkatan koperasi aktif pada tahun 2018 telah mencapai kinerja 449,89%. (tercapai) Realiasi pada tahun ini mendapat angka 140,41% dari target 31,21% yang telah ditentukan.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55,43	65,11	110,70	160,27	140,41	27,86%	31,21%



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

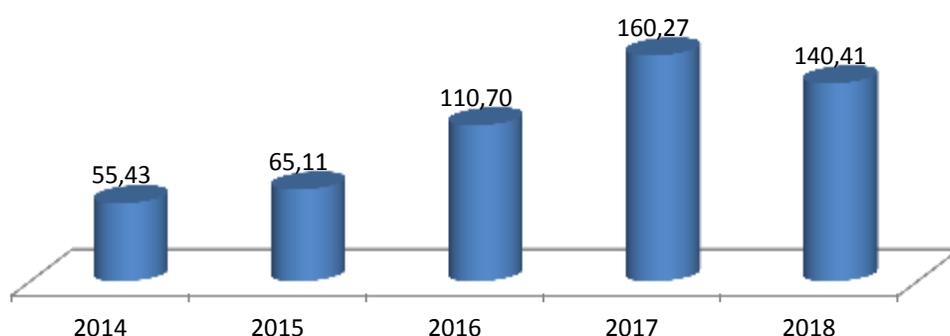


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan





Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

Persentase retribusi pasar terhadap PAD

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3,00%	2,78%	92,67

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Persentase retribusi pasar terhadap PAD” tercapai 92,67%. terealisasi 2,78% dari target 3,00% tahun 2018.

Adapun perhitungan capaian kinerja 92,67% tersebut didapatkan dari realiasi tahun 2018 (2,78%) dibanding dengan target tahun 2018 (3%) dikali 100 persen.

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase retribusi pasar terhadap PAD	2,88%	2,31%	2,62%	3,11%	2,78%	3,00%	3,00%





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan		
- Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar kandang	356.550.000	312.399.000
- Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar kandang	1.188.325.000	2.686.768.914
- pemeliharaan kebersihan pasar kandang	242.695.000	238.442.850
- Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar negara	134.200.000	134.000.000
- Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar negara	410.815.000	398.300.000
- pemeliharaan kebersihan pasar negara	29.410.000	29.410.000



MISI 4	MENINGKATKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
-------------------	---

Untuk melaksanakan misi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai sasaran-sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut;

TUJUAN 1	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.
---------------------	--

Capaian **Tujuan I** yakni **“Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.”** Pada **Misi IV : Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Dan Informatika** dari realisasi capaian 4 sasaran dengan 9 indikator kinerja sasaran secara umum dapat disimpulkan telah Tercapai.





Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 4 (empat) sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 ; Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan

Pencapaian target kinerja sasaran 1 pada Tujuan I : **Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah** pada Misi IV : **Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Dan Informatika** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Persentase kinerja sistem irigasi	85,00%	80,79%	95,05
Persentase penanganan daya rusak air	30,00%	30,00%	100 %
Rata-rata			97,52 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata Pencapaian Sasaran Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan pada tahun 2018 sebesar 97,52%.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran

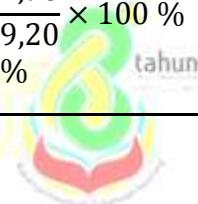
PERSENTASE KINERJA SISTEM IRIGASI

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase kinerja sistem irigasi	85,00%	80,79%	95,05

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja “Persentase kinerja sistem irigasi” telah tercapai (95,05%). terealisasi 80,79% dari target 85% tahun 2018.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase kinerja sistem irigasi

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase kinerja sistem irigasi	$= \frac{\sum \text{total ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam}}{\sum \text{total kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$	$= \frac{11.794,98}{14.599,20} \times 100 \%$ $= 80,79\%$



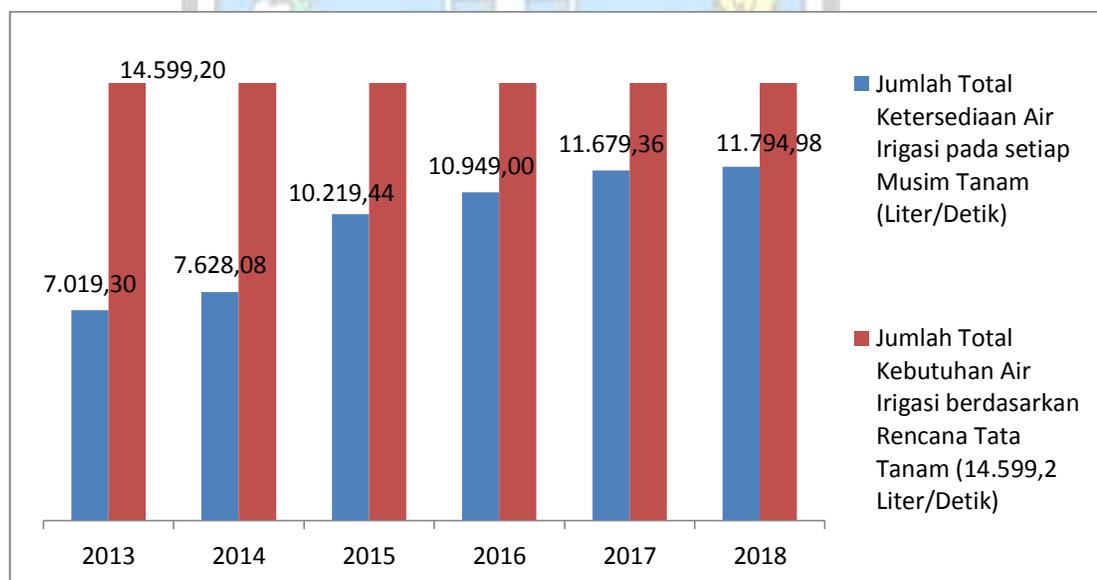


Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase kinerja sistem irigasi	52,25%	70%	75%	80%	80,79%	80%	85%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase kinerja sistem irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun

Jumlah Total Ketersediaan Air Irigasi pada setiap Musim Tanam (Liter/Detik) apabila dibandingkan dengan Jumlah Total Kebutuhan Air Irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam (14.599,2 Liter/Detik) dalam kurun waktu 2013-2018 mengalami trend positif. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Standar Pelayanan Minimum di bidang Sumber Daya Air sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi sistem irigasi baik ditargetkan 70% harus terpenuhi tahun 2019.

Capaian indikator persentase kinerja sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 teralisasi sebesar 80,79 % melebihi dari target SPM sebesar 70%.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya			
	1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	102.500.000	101.265.000	98,80
	2. Kegiatan Normalisasi saluran sungai	379.600.000	368.573.000	97,10
	3. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai	6.585.808.500	6.508.189.000	98,82
	4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	6.654.150.000	6.462.126.000	97,11
	5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1.475.950.000	1.473.509.000	99,83
	6. Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.033.834.000	1.032.184.000	99,84
	7. Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)	6.364.750.000	6.075.980.000	95,46

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Penanganan Daya Rusak Air

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase penanganan daya rusak air	30%	30%	100%

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penanganan daya rusak air sebesar 100% (tercapai), terealisasi 30% dari target 30% tahun 2018.

Adapun perhitungan capaian kinerja tersebut didapatkan dari Jumlah komulatif panjang DAS yang aman (m) dibagi Jumlah panjang DAS se Kab. HSS (m) dikali 100.





Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penanganan daya rusak air

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase penanganan daya rusak air	$= \frac{\text{Jumlah kumulatif panjang DAS yang aman}}{\text{Jumlah panjang DAS se Kab. HSS}} \times 100\%$	$= \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$

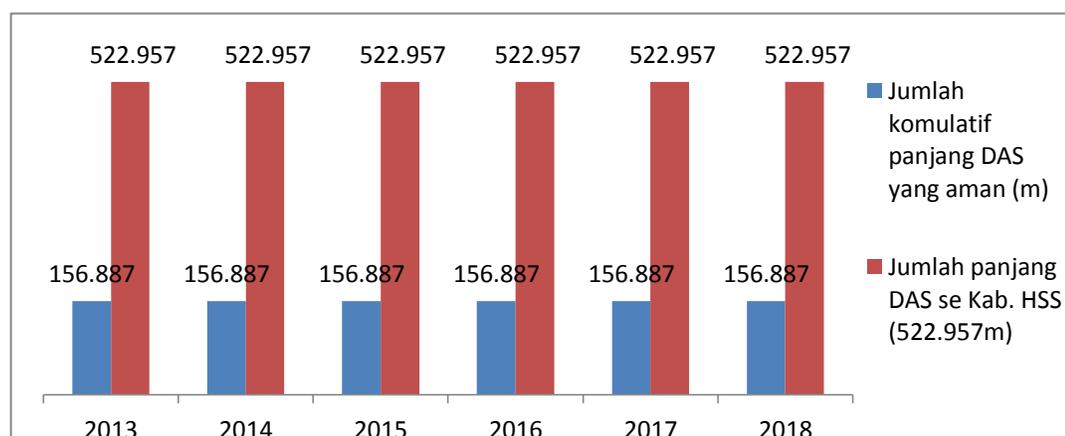
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase penanganan daya rusak air	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase penanganan daya rusak air Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya.

Sedangkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penanganan daya rusak air dilaksanakan secara maksimal dalam arti kerusakan tanggul atau antaran sungai yang tergerus air dilaksanakan secara menyeluruh dengan target penanganan 30% dari panjang DAS rawan bencana.

Jumlah komulatif panjang DAS yang aman (m) apabila dibandingkan dengan Jumlah panjang DAS se Kab. HSS (522.957m) dalam kurun waktu 2013-2018 terus mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya. Perkembangannya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pengendalian Banjir			
1. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.941.780.000	4.857.249.000	98,29
2. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	201.250.000	197.355.000	98,06

SASARAN 2 ; MENINGKATNYA JANGKAUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pencapaian target kinerja sasaran 2 pada Tujuan I : **Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah** pada **Misi IV : Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Dan Informatika** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	100,00%	104,17%	104,17

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi pada tahun 2018 telah tercapai dari target (104,17%). Realisasi pada tahun ini mendapat 104,17% dari 100% target yang ditentukan.

Adapun perhitungan capaian kinerja tersebut didapatkan dari Jumlah Fasum yang sudah terpasang wifi (25 titik) dibagi dengan Jumlah Fasum di Kab.HSS (24 titik) dikali 100.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penanganan daya rusak air

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	$= \frac{\text{Jumlah Fasum yang sudah terpasang wifi}}{\text{Jumlah Fasum di Kab. HSS}} \times 100\%$	$= \frac{25}{24} \times 100\% = 104,17\%$



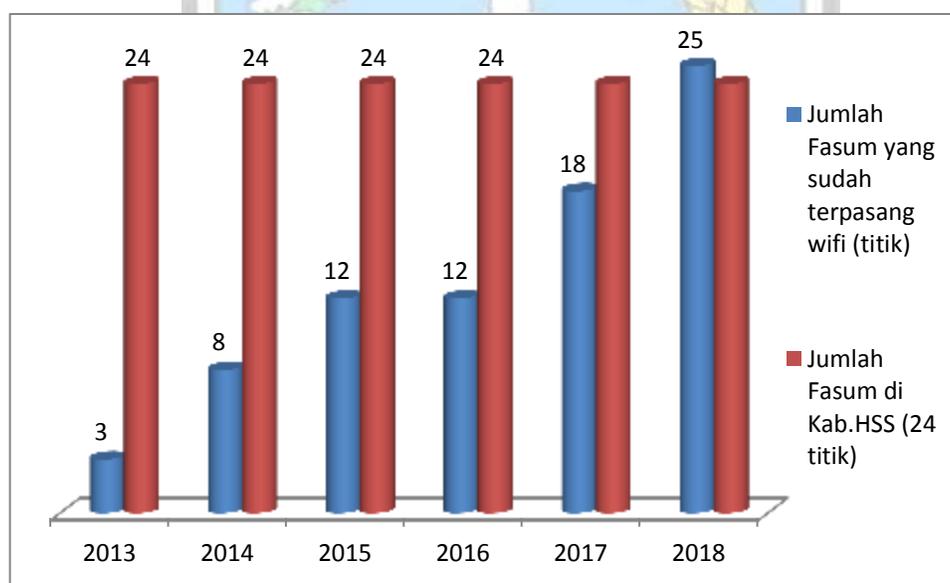


Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	33,33%	50,00%	50,00%	75,00%	104%	83,33%	100%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Jumlah Fasum yang sudah Terpasang WIFI (titik) dibanding dengan Jumlah Fasum di Kab.HSS (24 titik) Kurun Waktu 2013-2018



Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa		
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	3.682.591.250	3.137.520.500





SASARAN 3 ; MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

Pencapaian target kinerja sasaran 3 pada Tujuan I : **Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah** pada Misi IV : **Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Dan Informatika** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75,00%	76,82%	102,43
Persentase konektivitas wilayah	100,00%	100,00%	100
Rata-rata			101,21%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata Pencapaian Sasaran Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan pada tahun 2018 telah tercapai 101,21%.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75,00%	76,82%	102,43

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik sebesar 102,43% (tercapai), terealisasi 76,82% dari target 75,00% tahun 2018.

Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	$= \frac{\text{Jumlah kumulatif panjang jalan kondisi baik dan sedang (km)}}{\text{Jumlah kumulatif panjang jalan kabupaten (km)}} \times 100\%$	$= \frac{660,15}{859,36} \times 100 \%$ $= 76,82\%$



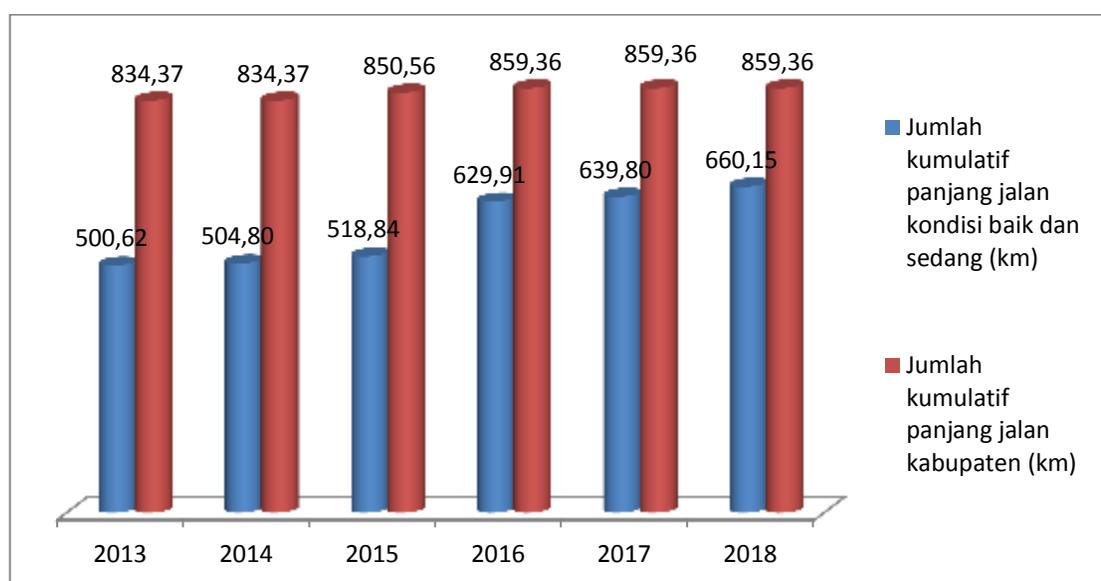


Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan. 2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang (kondisi mantap) ditargetkan 60% harus terpenuhi tahun 2019, dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun harus 100%.

Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sepanjang 660,15 Km dari total 859,36 Km panjang jalan kabupaten atau sebesar 76,82 %. Hal ini dimana lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jumlah Kumulatif Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang (Km)
Dibanding dengan Jumlah Kumulatif Panjang Jalan Kabupaten (Km) Kurun
Waktu 2013-2018





Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	60,50%	61,00%	73,30%	74,45%	76,82%	74,00%	75,00%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
- Kegiatan Pembangunan Jalan	43.734.850.000	42.823.241.000
- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	19.443.950.000	19.199.224.000
- Kegiatan Pembangunan Jembatan	2.606.875.000	2.594.104.000

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase konektivitas wilayah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
Persentase konektivitas wilayah	100,00%	100,00%	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase konektivitas wilayah pada tahun 2018 telah tercapai 100%. Realiasi pada tahun ini mendapat 100% dari 100,00% target yang ditentukan.



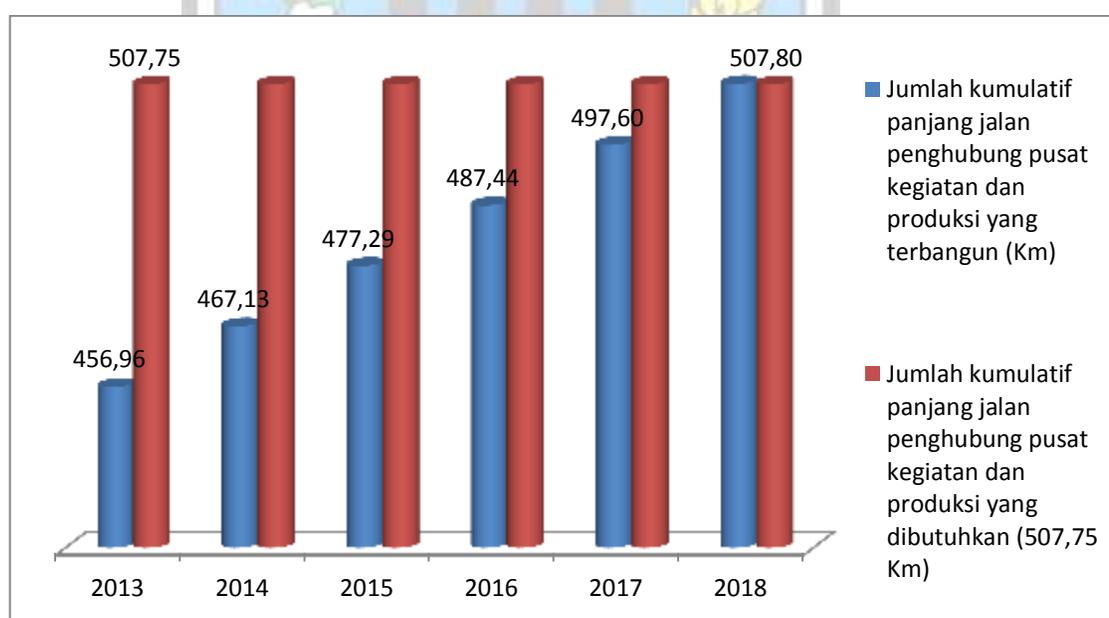


Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase konektivitas wilayah

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase konektivitas wilayah	Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun (Km) dibagi Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang dibutuhkan (Km) dikali 100	$= \frac{507,80}{507,80} \times 100 \% = 100\%$

Untuk kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun 100,01% sementara target SPM sebesar 100%. Dengan terhubungnya semua kota kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun (Km) dibanding dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang dibutuhkan (507,75 Km) Kurun Waktu 2013-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase konektivitas wilayah	92%	94%	96%	98%	100%	96%	100%

Apabila dilihat dari tabel diatas, realisasi indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.





Foto-foto
Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Baik dan Peningkatan
Konektivitas Wilayah TA. 2018

Rehabilitasi Jalan Tajun – Sp.3 Muara Paring Agung Kecamatan
 Sungai Raya



Pekerjaan Siring Bahu Jalan di Ruas Tabihi – Telaga Langsung
 Kecamatan Telaga Langsung



Rehabilitasi Jembatan Buku Anin
 Kecamatan Padang Batung



Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	16.574.873.000	16.396.030.400
- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	19.417.552.150	18.907.773.000





SASARAN 4 ; MENINGKATNYA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

Pencapaian target kinerja sasaran 4 pada Tujuan I : **Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah** pada Misi IV : **Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81%	76,94%	100,17
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	62,00%	79,68%	128,52
Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00%	59,62%	101,05
persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	16,46%	22,25%	73,97
Rata-rata			100,93%

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata Pencapaian Sasaran Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman pada tahun 2018 telah tercapai 100,93%.

Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81%	76,94%	100,17

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 100,17% (tercapai), terealisasi 76,94% dari target 76,81% tahun 2018.

Adapun perhitungan capaian kinerja tersebut didapatkan dari realiasi tahun 2018 (sebanyak 76,94%) dibanding dengan target tahun 2018 (sebanyak 76,81%) dikali 100 persen.

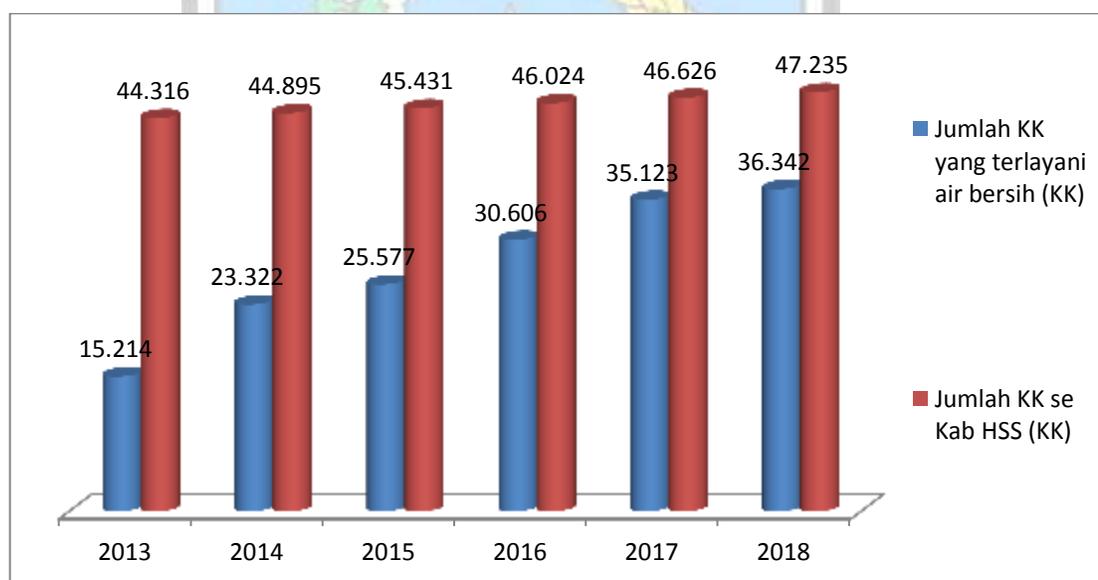




Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	$= \frac{\text{Jumlah KK yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah KK se Kab HSS}} \times 100\%$	$= \frac{36.342}{47.235} \times 100\% = 76,94\%$

Jumlah KK yang terlayani air bersih (KK) dibanding dengan Jumlah KK se Kab HSS (KK) Kurun Waktu 2013-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah



Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	51,95%	56,30%	66,50%	75,33%	76,94%	71,97%	76,81%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.





Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	14.867.870.000	14.757.911.040
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	5.741.000.000	5.568.947.000

Dokumentasi Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan



Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	62,00%	79,68%	128,52

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada tahun 2018 telah tercapai 128,52%. Realiasi pada tahun ini mendapat 79,68% dari 62,00% target yang ditentukan.

Adapun perhitungan capaian kinerja tersebut didapatkan dari realiasi tahun 2018 (sebesar 79,68%) dibanding dengan target tahun 2018 sebesar 62,00% dikali 100 persen.

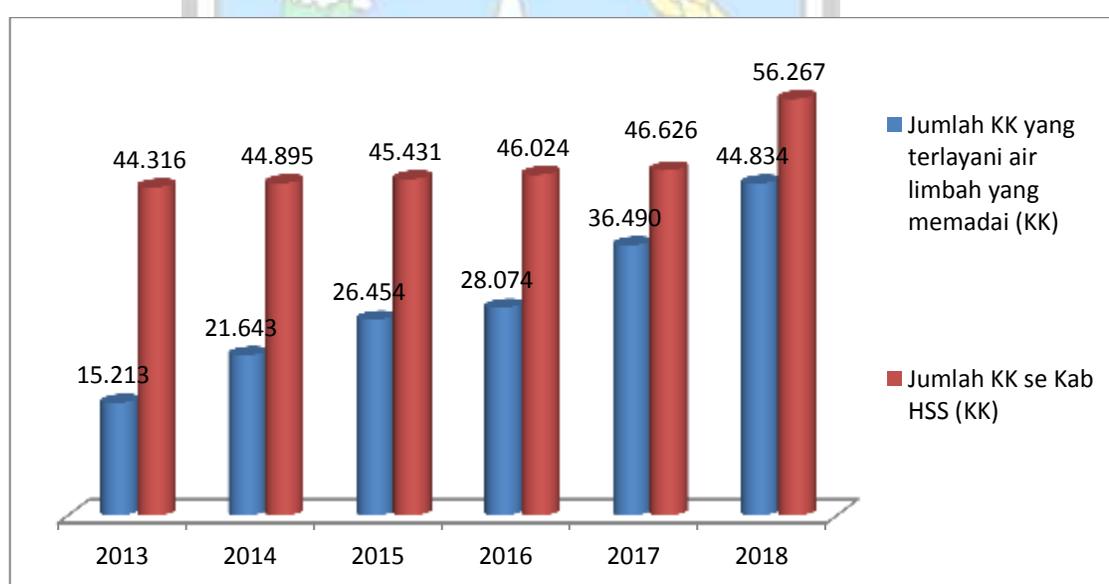




Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	$= \frac{\text{Jumlah KK yang terlayani air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah KK se Kab HSS}} \times 100\%$	$= \frac{44.834}{56.267} \times 100\% = 79,68\%$

Jumlah KK yang terlayani air limbah yang memadai dibanding dengan Jumlah KK se Kab HSS (KK) Kurun Waktu 2013-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	48,21%	58,23%	61,00 %	78,26 %	79,68 %	61,50%	62,00%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.





Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		
- Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	565.020.000	466.150.000
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	729.730.000	603.689.000
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)	8.752.350.000	8.752.350.000

Dokumentasi kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat



Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	%CAPAIAN KINERJA
Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00%	59,62%	101,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik pada tahun 2018 telah tercapai 101,05%. Realiasi pada tahun ini tercapai 59,62% dari 59,00% target yang ditentukan.

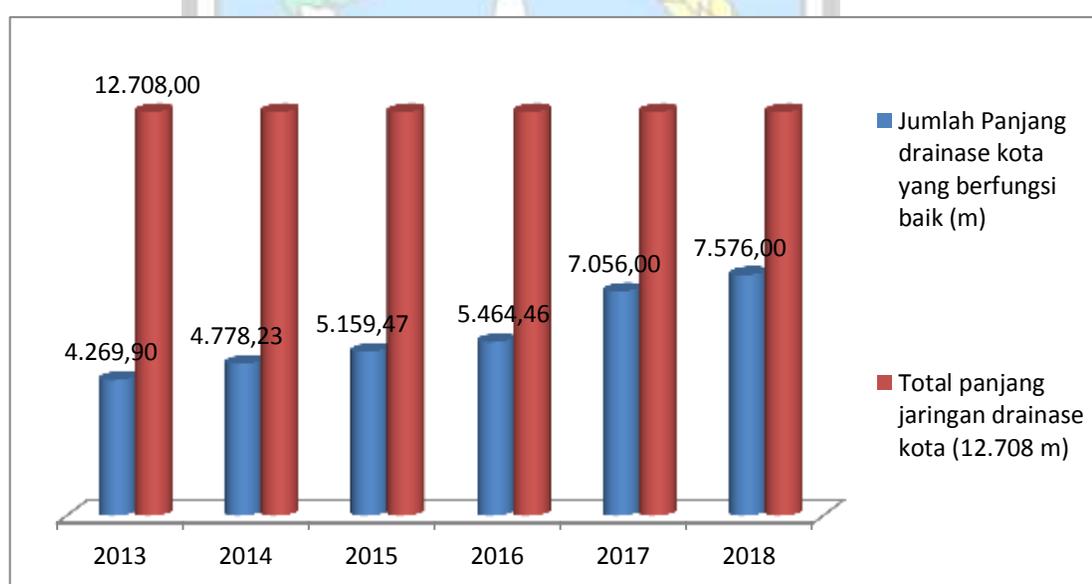




Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Minimal Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	$= \frac{\text{Jumlah Panjang drainase kota yang berfungsi baik}}{\text{Total panjang jaringan drainase kota}} \times 100\%$	$= \frac{7.576}{12.708} \times 100\%$ $= 59,62\%$

Jumlah Panjang drainase kota yang berfungsi baik (m) dibanding dengan Total panjang jaringan drainase kota (m) Kurun Waktu 2013-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	37,60 %	40,60%	43,00%	55,52 %	59,62%	50,00%	59,00%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.





Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong		
- Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	1.134.300.000	1.096.691.000
- Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	672.575.000	660.694.000

Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong



Analisa akuntabilitas kinerja indikator sasaran :

Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN
persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	16,46%	22,25%	73,97

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja sasaran persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 73,97% (tercapai), terealisasi 22,25% dari target 16,46% tahun 2018.

Adapun perhitungan capaian kinerja tersebut didapatkan dari realiasi tahun 2018 (sebesar 22,25%) dibanding dengan target tahun 2018 (sebesar 16,46%) dikali 100.

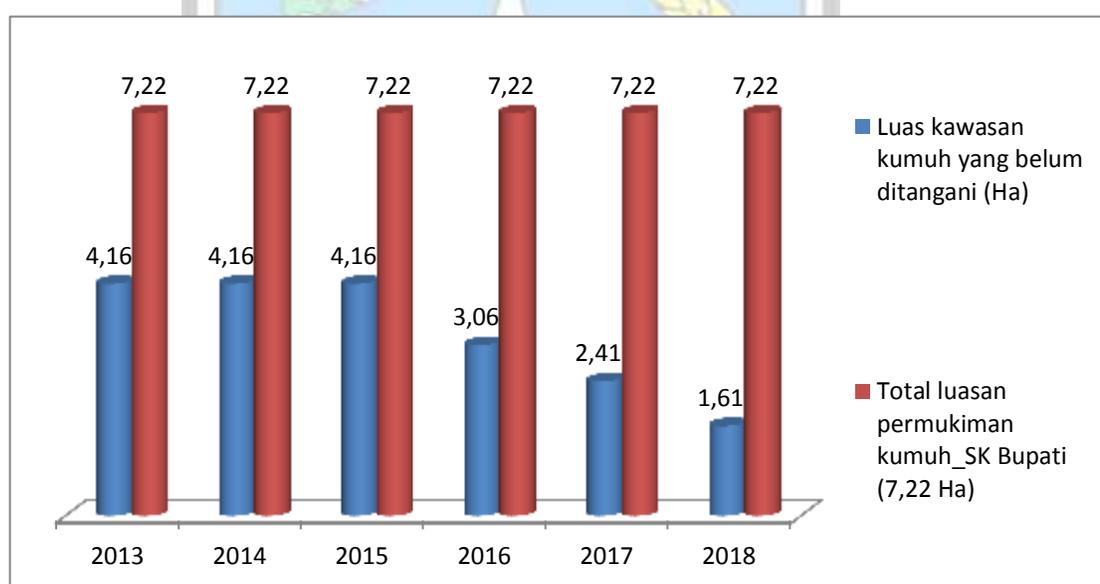




Formula Realisasi Capaian Kinerja Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Perhitungan
persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$= \frac{\text{Luas kawasan kumuh yang belum ditangani (Ha)}}{\text{Total luasan permukiman kumuh (Ha)_{SK Bupati}} \times 100\%$	$= \frac{1,61}{7,22} \times 100 \%$ $= 22,25\%$

Luas kawasan kumuh yang belum ditangani (Ha) dibanding dengan Total luasan permukiman kumuh_SK Bupati (Ha) Kurun Waktu 2013-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2014	2015	2016	2017	2018	Target RPJMD	Target RPJMD
						2017	2018
persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	57,59%	57,59%	42,41%	33,38%	22,25%	20,00%	16,46%

Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkurang dari tahun ke tahun.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diatas.

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Penanganan Kawasan Kumuh		
- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.326.240.000	4.141.717.000





B. REALISASI ANGGARAN



Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bertujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah juga harus mempertimbangkan tata kelola keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yaitu anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih banyak tergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada era otonomi, daerah diharapkan dapat memacu tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi lebih ditujukan pada sumber pendapatan yang sudah ada namun belum optimal pemungutannya, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan, yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi :

- a. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan secara rutin terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.





- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penyesuaian tarif, perluasan subyek, obyek pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah.
- e. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perizinan.
- f. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak Pusat Dan Provinsi (PPh perorangan, PBB, dan PKB-BBNKB). Serta bagi hasil bukan pajak /sumber daya alam (SDA).
- g. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi penerimaan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga perolehan dana perimbangan yang memadai.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diatas, perlu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diimbangi dengan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, serta memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD sehingga berbagai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan alokasi belanja sudah mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.



**REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN DAN YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI**

Misi I : Meningkatkan Kehidupan Beragama

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.	1	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	tidak terjadi	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
					Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Terhadap Terjadi Konflik	119.447.000	112.759.000	94,40%
					Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	154.420.000	153.820.000	99,61%
2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	2	Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%				

Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani.	1	Opini Audit Eksternal	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
					Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	595.550.000	468.325.760	78,64%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
			Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan	148.175.000	107.925.000	72,84%
			Kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	99.620.000	97.436.480	97,81%
	2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (75,18)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
			Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	95.010.000	87.370.000	91,96%
			Kegiatan Penilaian mandiri program reformasi birokrasi(PMPRB)	28.455.000	27.160.000	95,45%
			Kegiatan Penerapan sistem pengendalian interm pemerintah (SPIP)	18.270.000	17.856.250	97,74%
			Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemkab.	28.560.000	28.517.200	99,85%
			Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah			
			Kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	277.024.860	239.077.700	86,30%





SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
		3	Peningkatan kesejahteraan aparaturnya pemerintah	Ada peningkatan				
2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,65	Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah			
					Kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	55.711.120	44.866.800	80,53%
		2	Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	0,2 hari	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			
					Kegiatan Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan	220.522.500	214.370.000	97,21%
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	Prosentase penerbitan KTP	98,75%	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
					Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dlm bid.kependudukan	334.322.800	322.394.800	96,43%
		2	Prosentase penerbitan akta kelahiran	95,02%	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
					Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dlm bid.kependudukan	54.583.000	52.833.000	96,79%
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	1	Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,83%	Program Pendidikan Non Formal			
					Kegiatan Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	192.942.500	180.483.000	93,54%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
			Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	987.799.600	965.669.600	97,76%
			Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU	589.938.720	579.658.720	98,26%
	2	APK PAUD	72,98%	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
			Pembangunan gedung sekolah	402.850.000	401.131.500	99,57%
			Pengadaan mebeluer sekolah	82.985.000	79.025.000	95,23%
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	216.100.000	194.345.000	89,93%
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	676.060.000	675.050.000	99,85%
			Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	22.159.000	22.159.000	100,00%
	3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,91%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
			Penambahan ruang kelas sekolah	658.400.000	631.522.000	95,92%
	4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	94,08%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
			Penambahan ruang kelas sekolah	658.400.000	631.522.000	95,92%
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP	117.950.000	112.560.000	95,43%
	5	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
			Pelaksanaan ujian sekolah (US) SD	694.312.500	672.819.500	96,90%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
	6	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
				Pelaksanaan ujian sekolah (US) SMP	1.184.941.000	1.167.904.000
	7	Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,29%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
				Penyediaan beasiswa siswa berprestasi/kurang mampu SD	180.432.000	175.548.000
	8	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	76,28%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
				Penyediaan beasiswa siswa berprestasi/kurang mampu SD	74.828.000	74.828.000
			Program Pendidikan Non Formal			
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	987.799.600	965.669.600	97,76%
2	1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	100% (609 RT)	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		
				Pengendalian keamanan lingkungan	57.425.000	31.604.500
	2	Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
				Patroli dan Pengawasan Penegakan Perda	42.000.000	42.000.000
			Penindakan Dan Penyelesaian Pelanggaran PERDA			



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
		3	Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100%	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
					Patroli dan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	363.740.000	363.730.000	100,00%
		4	Tidak terjadi konflik sosial	tidak terjadi	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			
					Peningkatan kerjasama komunitas intelijen daerah (KOMINDA)	171.000.000	166.250.000	97,22%
		5	Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	52 ormas				
		6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	68,89%	Program pendidikan politik masyarakat			
					Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat	164.990.000	163.115.000	98,86%
3	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	1	Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	57,78%				
		2	Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	82,73%				
		3	Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	91,14%				
1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Angka Kematian Ibu	138	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			
					Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Reproduksi	57.804.000	56.694.000	98,08%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
	2	Angka Kematian Bayi	21	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
			Jaminan Persalinan (DAK)	2.929.701.850	1.365.349.147	46,60%
	3	Angka kematian neonatal	59	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
			Penyuluhan kesehatan anak balita (29.01)	72.708.000	44.140.000	60,71%
	4	Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,00%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pemberian makanan tambahan, vitamin, dan peningkatan program penimbangan balita	242.950.000	158.775.000	65,35%
	5	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	21,06%	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
		Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	7.818.647.750	7.379.987.169	94,39%	
6	Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%				
7	Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	-488%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD	244.317.500	186.804.200	76,46%	





SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
	8	Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	100,00%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
				Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Penanganan Penyakit Berpotensi KLB	8.375.000	6.850.000
	9	Persentase puskesmas yang terakreditasi	61,90%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
				Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	308.310.000	259.064.758
	10	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
				Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	7.818.647.750	7.379.987.169
	11	Persentase desa dengan kategori siaga aktif	100,00%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
				Pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat	260.252.200	86.202.765
	12	Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	84,31%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94.800.000	39.487.450
	13	Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94.800.000	39.487.450



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN		
		14	Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100%						
1	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	1	persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,40%						
2	Menjadikan Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga	1	Persentase Pelestarian Budaya Lokal	105%	Program Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah					
					Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	386.832.500	366.845.000	94,83%		
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
				2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	16,70%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	71.375.000				61.767.000	86,54%		
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	88.460.000				88.460.000	100,00%		
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	2.171.000.000	2.130.908.000	98,15%							
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	958.255.000	955.231.840	99,68%							



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
					Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	184.064.000	175.125.000	95,14%
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Hotel Rakat Mufakat	221.538.000	208.583.521	94,15%
					Program Pengembangan Kemitraan			
					Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	23.525.000	23.525.000	100,00%
					3	Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	51,43%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	9.685.900.330	9.664.369.000	99,78%	
3	Menurunnya persentase kemiskinan	1	persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	1,50%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
				Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56.362.880	53.157.880	94,31%	
				Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	6.279.134.900	6.201.669.900	98,77%	
				Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153.106.000	151.406.000	98,89%	





SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
4	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	100,00%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			
					Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4.280.840.000	4.262.250.000	99,57%
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	71,91%	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			
					Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	707.345.400	642.972.900	90,90%
					Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.482.400	467.958.900	94,64%
		3	Prosentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	100,00%	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			
Pemberdayaan perekonomian masyarakat	88.346.000				87.191.000	98,69%		
5	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	541,59%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
					Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	328.250.000	308.189.000	93,89%
6	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB: a. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Publik (5,185 Ha)	39,13%	Program Pengelolaan RTH			
					Pemeliharaan RTH	3.575.706.000	3.386.235.800	94,70%





SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
	b. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Private (2,593 Ha)	12,53%	Penataan RTH	3.575.706.000	3.386.235.800	94,70%
	2 Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	85,71%				
7	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/ piatu dan penyandang cacat	85,80%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial			
	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	67.160.760	61.750.600	91,94%
			Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	123.203.880	119.421.000	96,93%
			Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	480.146.880	454.546.880	94,67%
			Program Pembinaan Anak Terlantar			
			Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	183.360.000	182.780.000	99,68%
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
			Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	154.853.440	61.044.000	39,42%
			Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			
			Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	113.092.640	59.417.640	52,54%



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
					Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111.050.000	25.945.000	23,36%
					Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			
					Pendukung Program Keluarga Harapan	675.894.200	235.480.000	34,84%

Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	1	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6,13%				
2	Meningkatnya pendapatan per kapita	1	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	18.108	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
					Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	21.590.000	21.590.000	100,00%
					Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	202.848.020	202.817.000	99,98%



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
					Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	98.424.640	84.015.000	85,36%
					Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan	51.435.100	53.435.100	103,89%
3	Meningkatnya produksi hasil pertanian	1	Peningkatan produksi padi pertahun	14.873 ton (produksi padi 268.526 ton)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)			
					Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	248.032.500	250.995.000	101,19%
					Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	224.370.000	224.370.000	100,00%
					Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	317.532.000	276.933.250	87,21%
					Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan	254.180.000	216.892.500	85,33%
					Pengembangan Intensifikasi Jagung dan Umbi	195.740.000	167.110.750	85,37%
		2	Peningkatan produksi karet	860 ton	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
					Peningkatan Sistem Insentif dan Disentif Bagi Petani/Kelompok Tani	338.738.200	211.721.500	62,50%
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
Pengembangan Karet	162.921.400	145.460.000	89,28%					
Perlindungan Tanaman Perkebunan	71.592.000	67.592.000	94,41%					



SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
		3	Peningkatan Produksi Kayu Manis	15 ton	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
					Pengembangan Kayu Manis	28.334.320	28.334.320	100,00%
1	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
					Pelatihan keterampilan service sepeda motor	290.825.500	274.067.500	94,24%
					Pelatihan Keterampilan Menjahit	255.440.000	243.762.000	95,43%
		2	Persentase tingkat pengangguran terbuka	2,97%	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja			
					Pendayagunaan Tenaga Kerja Berbasis Padat Karya	85.231.000	84.045.000	98,61%
		3	Tingkat partisipasi angkatan kerja.	66,72%				
2	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	1	Persentase peningkatan koperasi aktif	100,00%	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			
				(153 koperasi aktif)	Peningkatan Gerakan Kualitas Kelembagaan Koperasi	65.240.000	41.843.000	64,14%
		2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,50%				
3	Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif	1	Pembinaan UMKM (Jumlah Wirausaha Baru (Orang))	(47.353 orang)				
1	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	1	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	140,41%				





SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
	2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	2,78%	Program Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan		
			Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar kandang	356.550.000	312.399.000	87,62%
			Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar kandang	1.188.325.000	2.686.768.914	226,10%
			pemeliharaan kebersihan pasar kandang	242.695.000	238.442.850	98,25%
			Penertiban pedagang/pedagang kaki lima pasar nagara	134.200.000	134.000.000	99,85%
			Pelayanan dan penanggulangan kerusakan bangunan pasar nagara	410.815.000	398.300.000	96,95%
			pemeliharaan kebersihan pasar nagara	29.410.000	29.410.000	100,00%





Misi IV : Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	1	Persentase kinerja sistem irigasi	80,79%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
					Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	102.500.000	101.265.000	98,80%
					Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	379.600.000	368.573.000	97,10%
					Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai DAK	6.585.808.500	6.508.189.000	98,82%
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	6.654.150.000	6.462.126.000	97,11%
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1.475.950.000	1.473.509.000	99,83%
					Pegembangan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun	1.033.834.000	1.032.184.000	99,84%
					Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)	6.364.750.000	6.075.980.000	95,46%
		2	Persentase penanganan daya rusak air	30%	Program Pengendalian Banjir			
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	4.941.780.000	4.857.249.000	98,29%
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	201.250.000				197.355.000	98,06%		





SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
2	Meningkatnya jangkauan penggunaan teknologi informasi	1	Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	104,17%	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa			
					Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	3.682.591.250	3.137.520.500	85,20%
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	1	persentase jalan dalam kondisi baik	76,82%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
					Kegiatan Pembangunan Jalan	43.734.850.000	42.823.241.000	97,92%
					Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	19.443.950.000	19.199.224.000	98,74%
					Kegiatan Pembangunan Jembatan	2.606.875.000	2.594.104.000	99,51%
		2	persentase Peningkatan konektivitas wilayah	100,00%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
					Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	16.574.873.000	16.396.030.400	98,92%
			Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	19.417.552.150	18.907.773.000	97,37%		
4	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,94%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah			
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	14.867.870.000	14.757.911.040	99,26%





SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2018	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	5.741.000.000	5.568.947.000	97,00%
	2	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	79,68%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	565.020.000	466.150.000	82,50%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	729.730.000	603.689.000	82,73%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)	8.752.350.000	8.752.350.000	100,00%
	3	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,62%	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong		
			Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	1.134.300.000	1.096.691.000	96,68%
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	672.575.000	660.694.000	98,23%
	4	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	22,25%	Program Penanganan Kawasan Kumuh		
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.326.240.000	4.141.717.000	95,73%





C. DAFTAR PRESTASI SKPD TINGKAT NASIONAL/PROVINSI

Berkat kerja keras bersama antara Eksekutif dan Legislatif serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada Tahun 2018 telah banyak prestasi yang diraih sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas kinerja yang telah dicapai. Adapun prestasi yang diperoleh tersebut adalah sebagai berikut :

A. TINGKAT NASIONAL

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Predikat “ BB “ (baik);
2. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan nilai 92,53 (Hijau).
3. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Katagori Baik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Katagori Baik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Katagori Baik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada BLUD RSUD Brigjend. H. Hasan basry Kandangan;
6. Penghargaan Kepatuhan tinggi terhadap Standart Pelayanan Publik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Ombudsman dengan nilai 92,53.
7. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerinah Daerah (LKPD) TA 2017;
8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Laporan





~~Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan opini WTP~~
untuk yang kelima kalinya;

9. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2017 dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 5 Desember 2018 di Jakarta;
10. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Pratama oleh Kementerian PPPA;
11. Pelopor Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) “Taman Palidangan Sehati” Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
12. Penghargaan Sekolah Ramah Anak oleh Kementerian PPPA;
13. Juara IV Lomba Sekolah Sehat TK NASIONAL kategori Best Achievement MTsN 1 Hulu Sungai Selatan;
14. Penghargaan Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK diserahkan kepada SMAN 2 Kandangan;
15. Predikat Pasar Tertib Ukur dari Dirjend. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan bagi 11 Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Penghargaan sebagai Tokoh Adat Pendidikan Keaksaraan Pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Kemendikbud;
17. Penghargaan sebagai Penulis Terbaik Pada Kegiatan Jelajah Literasi Bangkok Bagi Penggiat Literasi dari Kemendikbud;

B. TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. *Public Service of The Year* Provinsi Kalimantan Selatan pada Penyelenggaraan Indonesia Marketeers Festival 2018;
2. juara III Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dicapai oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kegiatan Lomba Cipta menu (LCM);
3. Kategori Utama Lomba Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kategori Madya Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Terbaik III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diraih Kelurahan Kandangan Utara;





6. Juara III dasawiswa ber-PHBS Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Juara I tingkat Provinsi Kalimantan Selatan LBS (Lingkungan Bersih Sehat) Desa Lokbinuang ;
8. Juara III Lomba Dasawisma Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yang diraih oleh Desa Telaga Bidadari;
9. Penghargaan Adiwiyata Provinsi diberikan oleh Dinas LH Provinsi Kalimantan Selatan kepada 2 SMAN, 3 SMPN atau sederajat dan 5 SD atau sederajat.
10. Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat SLTP diraiholeh SMPN 1 Kandangan;
11. Juara II Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tingkatan TK, yang diraih oleh TK Munggu Raya Desa Hariti
12. Terbaik III Lomba Sekolah Sehat Tingkat SLTA diraih oleh SMAN 1 Kandangan;
13. Terbaik III Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD diraih oleh SDN Kandangan Kota 1;
14. Juara II PIK Remaja Jalur Pendidikan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
15. Juara III Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tenaga Gizi Teladan ;
16. Juara II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tenaga Bidan Teladan;
17. Juara III Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tenaga Perawat Teladan;
18. Juara I Pentas Seni Terbaik pada Jambore Anak Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Juara III Forum Anak Teraktif pada Jambore Anak Provinsi Kalimantan Selatan
20. Juara Harapan I Film Pendek pada Jambore Forum Anak Daerah Prov. Kalsel
21. Juara II Lomba Poskamling Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Poskamling Jambu Hilir Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan
22. Juara I Hose Laying Competesion Paman Birin Cup 2 Tahun 2018, atas nama BPK HIPTA Kecamatan Angkinang Kab. HSS;
23. Juara III Lomba LKS Berprestasi diserahkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak “Tarbiyatul Furqan” Desa Jambu Hilir;





24. Juara III Lomba Bola Volly Campuran diserahkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel kepada Kemah Bakti Karang Taruna Prov.Kalsel “Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
25. Juara I Lomba Keindahan dan Kenbersihan Kemah diserahkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel kepada Karang Taruna Newang Sakarti (Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan) dalam kegiatan Kemah Bakti Karang Taruna Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Juara I Lomba Catur diserahkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel kepada Safrudin (PSM) Desa Angkinang pada kegiatan Temu Karya Pekerja Sosial Masyarakat;
27. Juara III Mars Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diserahkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dalam kegiatan Temu Karya Pekerja Sosial Masyarakat;
28. Juara Umum Lomba IMTAQ Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18-21 Juli 2017 di Banjarmasin;
29. Juara II Napak Tilas Jejak Pahlawan (NTJP) yang dilaksanakan tanggal 11-13 Nopember 2017 di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
30. Juara I Kategori Pengelola/Kepala SKB pada Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
31. Juara I Kategori Instruktur Kursus Tata Kecantikan Rambut pada Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
32. Juara I Kategori Instruktur Kursus Tata Kecantikan Rambut pada Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
33. Penyaji terbaik II dan penata music terbaik pada festival tari melayu pesisir III se Kal-Sel-Teng di Barito Kuala;
34. Juara I dan II, Penata Tari Terbaik dan Penata Busana Terbaik pada Festival Tari Anak se Kalimantan Selatan di Kota Baru;
35. Juara I pada Festival Pesona Budaya Borneo di Banjarmasin;
36. Group tari terbaik, penyaji terbaik, penata music terbaik, penata artistic terbaik dan penari laki-laki terbaik pada Festival Tari Penyambutan dan Persembahan Kreasi se Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
37. Juara I Pawai Budaya Sarabakawa, penyaji terbaik dan penata tari terbaik pada festival tari dayak pedalaman se Kal-Sel di Tabalong;
38. Penyaji terbaik III pada festival karya tari daerah di Banjarmasin;
39. Penyaji terbaik III pada festival mamanda rangkaian aruh sastra Kalimantan Selatan XV di Kotabaru;





40. Terbaik III berpasangan kelompok umur 26 sampai dengan 55 tahun pada festival pencak silat budaya/kuntau tingkat provinsi Kalimantan Selatan;
41. Juara II dan Juara III pada lomba permainan rakyat balogo dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT ke-73 Kemerdekaan RI Tahun 2018.





BAB 4

PENUTUP

A. SIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2018 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini adalah tahun Kelima pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dan 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja kinerja.

Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis, 18 (delapan belas) sasaran strategis yang tercapai dengan pencapaian $\geq 100\%$, sedangkan 9 (sembilan) sasaran strategis tidak tercapai dengan pencapaian $\leq 100\%$.

Dan dari 75 (tujuh puluh lima) indikator kinerja kinerja, sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang pencapaian kinerjanya $\leq 100\%$, sedangkan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$.

Sedangkan dari Hasil capaian pengukuran terhadap 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang pencapaian kinerjanya $\leq 100\%$ dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang pencapaian kinerjanya $\geq 100\%$.





Terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, kekurangan yang terjadi dalam periode 2014-2018 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun-tahun mendatang. Sasaran organisasi yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran organisasi pada masa selanjutnya dapat dicapai dengan lebih baik.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sampai saat ini adalah mekanisme pengumpulan data kinerja belum maksimal sehingga dukungan data faktual kurang lengkap guna memenuhi target indikator sasaran organisasi yang pada gilirannya berakibat pengukuran kinerja serta analisa kinerja tidak maksimal.

Dengan telah dilaksanakannya seluruh kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai aplikasi agar terciptanya sistem fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur daerah yang pada akhirnya akan memperlihatkan bahwa tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai langkah yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, yaitu dengan memperbaiki sistem kerja, memantapkan *team work* dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.





B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai langkah yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan serta strategi peningkatan kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan;
2. Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja sasaran RPJMD dengan indikator kinerja berdasarkan sasaran Renstra SKPD, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja serta memformat kembali kondisi kinerja awal sampai dengan kondisi kinerja akhir dengan akurasi target kinerja yang terukur dari waktu ke waktu.
3. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD.
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/ pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.



LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Misi I : Meningkatkan Kehidupan Beragama

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN		% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA
1	Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari- hari.	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	tidak terjadi	1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.	100%	1 Tidak terjadi konflik antar umat beragama	tidak terjadi	tidak terjadi	tercapai (100%)
		Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	100%	2 Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	100%	100%

LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.	1	Opini Audit Eksternal	WTP	1	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani.	97,99	1	Opini Audit Eksternal	WTP	WTP	tercapai (100%)
		2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A (80,01)				2	Predikat Akuntabilitas Kinerja	A (80,01)	BB (75,18)	93,96
		3	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	Ada peningkatan				3	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	Ada peningkatan	Ada peningkatan	100
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	300,40	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81,65	100,80
		4	Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari				2	Rata-rata Lama proses perijinan (hari)	2 hari	0,2 hari	500,00
		5	Prosentase penerbitan KTP	100,00%	3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	102,16	1	Prosentase penerbitan KTP	100,00%	98,75%	98,75
6	Prosentase penerbitan akta kelahiran	90,00%	2	Prosentase penerbitan akta kelahiran				90,00%	95,02%	105,58		
2	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	1	Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00%	1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	97,62	1	Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100,00%	98,83%	98,83
		2	APK PAUD	75,30%				2	APK PAUD	75,30%	72,98%	96,92
		3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00%				3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00%	100,91%	100,91
		4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,00%				4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,00%	94,08%	95,03
		5	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%				5	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00
		6	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%				6	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00
		7	Angka Partisipasi Murni SD/MI	100,00%				7	Angka Partisipasi Murni SD/MI	100,00%	94,29%	94,29
		8	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,29%				8	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	80,29%	76,28%	95,01
		1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	100% (609 RT)	2	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	104,49	1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	100% (609 RT)	100% (609 RT)	100
		2	Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%				2	Cakupan rasio penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100,00%	100%	100
		3	Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100,00%				3	Persentase kawasan yang bebas reklame yang tertib	100,00%	100%	100
		4	Tidak terjadi konflik sosial	Tidak terjadi				4	Tidak terjadi konflik sosial	Tidak terjadi	tidak terjadi	100
		5	Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas				5	Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	52 ormas	130
		6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	71,05%				6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	71,05%	68,89%	96,96
		1	Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	3	Meningkatnya fasilitas sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	77,22	1	Persentase Guru PAUD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	57,78%	57,78
		2	Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%				2	Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	82,73%	82,73
		3	Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%				3	Persentase Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	100,00%	91,14%	91,14

LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA		
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Ibu	100	1 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	1	Angka Kematian Ibu	54,54	138	-53,03	
		2	Angka Kematian Bayi	10			2	Angka Kematian Bayi	10	21	48,14
		3	Angka kematian neonatal	30			3	Angka kematian neonatal	30	59	50,85
		4	Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,03%			4	Persentase balita gizi buruk tanpa penyakit penyerta	0,03%	0,00%	100,00
		5	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%			5	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	21,06%	21,06
		6	Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%			6	Persentase pasien miskin yang dirujuk oleh PPK II (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II)	100,00%	100,00%	100
		7	Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	16,95%			7	Persentase penurunan angka kesakitan akibat DBD per 100.000 penduduk	16,95%	-488%	-2879,06
		8	Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	28,57%			8	Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	28,57%	100,00%	350,02
		9	Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100,00%			9	Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100,00%	100%	100,00
		10	Persentase puskesmas yang terakreditasi	19,05%			10	Persentase puskesmas yang terakreditasi	19,05%	61,90%	324,93
		11	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%			11	Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100,00%	100,00%	100,00
		12	Persentase desa dengan kategori siaga aktif	72,00%			12	Persentase desa dengan kategori siaga aktif	72,00%	100,00%	138,89
		13	Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	80,00%			13	Persentase rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	80,00%	84,31%	105,39
		14	Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	77,00%			14	Persentase desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	77,00%	100%	129,87

LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Misi II : Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA			
4	Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata.	1	persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,00%	1	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	140,00	1	persentase peningkatan angka konsumsi ikan	1,00%	1,40%	140,00
		1	Persentase Pelestarian Budaya Lokal	80,00%	2	Menjadikan Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga	121,90	1	Persentase Pelestarian Budaya Lokal	80,00%	105%	131,25
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,69%				2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	12,69%	16,70%	131,60
		3	Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	50,00%				3	Persentase fasilitas sarana dan prasarana semua cabang olah raga yang sesuai standar nasional	50,00%	51,43%	102,86
		1	persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	4,50%	3	Menurunnya persentase kemiskinan	299,44	1	persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	4,50%	1,50%	299,44
		1	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	70,00%	4	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	129,48	1	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	70,00%	100,00%	142,86
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70,00%				2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70,00%	71,91%	102,73
		3	Prosentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70,00%				3	Prosentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70,00%	100,00%	142,86
		1	persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	312,82%	5	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	173,13	1	persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	312,82%	541,59%	173,13
		1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB:	30,00%	6	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	117,16	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB:	30,00%	39,13%	130,43
		a. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Publik (5,185 Ha)	b. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB untuk RTH Private (2,593 Ha)					11,00%	12,53%			
		2	Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	80,00%				2	Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau yang memenuhi Baku Mutu (%)	80,00%	85,71%	107,14
		1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50% (3630 orang)	7	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat	171,59	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50% (3630 orang)	85,80%	171,59

LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Misi III : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA				
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.	1	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6,60%	1	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	92,88	1	Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6,60%	6,13%	92,88	
		1	PDRB perkapita (harga konstan)	1705200,00%		2	Meningkatnya pendapatan per kapita	106,19	1	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	17.052	18.108	106,19
		1	Peningkatan produksi padi pertahun	284.117 ton	3	Meningkatnya produksi hasil pertanian	89,49	1	Peningkatan produksi padi pertahun	16.998 ton (produksi padi 284.117 ton)	14.873 ton (produksi padi 268.526 ton)	87,50	
		2	Peningkatan produksi karet	728,17 ton				2	Peningkatan produksi karet	728,17 ton	860 ton	118,10	
		3	Peningkatan Produksi Kayu Manis	9,43 ton				3	Peningkatan Produksi Kayu Manis	9,43 ton	15 ton	62,87	
2	Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%	1	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	98,60	1	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	41,61%	41,61%	100,00	
		2	Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,10%				2	Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,10%	2,97%	95,81	
		3	Tingkat partisipasi angkatan kerja.	66,72%				3	Tingkat partisipasi angkatan kerja.	66,72%	66,72%	100,00	
		1	Persentase peningkatan koperasi aktif	90,19% (138 KA)	2	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	83,48	1	Persentase peningkatan koperasi aktif	100% (153 KA)	100,00%	(153 koperasi aktif)	100,00
		2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,68%				2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,68%	10,50%	66,96	
		1	Pembinaan UMKM (Jumlah Wirausaha Baru (Orang))	(45.096 orang)	3	Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif	105,00	1	Pembinaan UMKM (Jumlah Wirausaha Baru (Orang))	(45.096 orang)	(47.353 orang)	105,00	
3	Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat	1	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	31,21%	1	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	271,28	1	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,21%	140,41%	449,89	
		2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3,00%				2	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3,00%	2,78%	92,67	

LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
Misi IV : Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN	% CAPAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% CAPAIAN KINERJA			
1	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah.	1	Persentase kinerja sistem irigasi	85,00%	1	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	97,52	1	Persentase kinerja sistem irigasi	85,00%	80,79%	95,05
		2	Persentase penanganan daya rusak air	30,00%				2	Persentase penanganan daya rusak air	30,00%	30%	100,00
		1	Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	100,00%	2	Meningkatnya jangkauan penggunaan teknologi informasi	104,17	1	Persentase Fasum yang memiliki Fasilitas Wifi	100,00%	104,17%	104,17
		1	persentase jalan dalam kondisi baik	75,00%	3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	101,21	1	persentase jalan dalam kondisi baik	75,00%	76,82%	102,43
		2	Peningkatan persentase konektivitas wilayah	100,00%				2	persentase Peningkatan konektivitas wilayah	100,00%	100,00%	100
		1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81%	4	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	100,93	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	76,81%	76,94%	100,17
		2	Persentase KK yang mendapat akses air limbah yang layak	62,00%				2	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	62,00%	79,68%	128,52
		3	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00%				3	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	59,00%	59,62%	101,05
4	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	16,46%	4	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan				16,46%	22,25%	73,97		

LAMPIRAN

Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA
1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.	100,00
2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	100,00
3	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani.	97,99
4	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	300,40
5	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	102,16
6	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	97,62
7	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	104,49
8	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	77,22
9	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	-97,35
10	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	140,00
11	Menjadikan Kota Kandungan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olah raga	121,90
12	Menurunnya persentase kemiskinan	299,44
13	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	129,48
14	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	173,13
15	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	117,16
16	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/ piatu dan penyandang cacat	171,59
17	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	92,88
18	Meningkatnya pendapatan per kapita	106,19
19	Meningkatnya produksi hasil pertanian	89,49
20	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	98,60
21	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	83,48
22	Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif	105,00
23	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	271,28
24	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	97,52
25	Meningkatnya jangkauan penggunaan teknologi informasi	104,17
26	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	101,21
27	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	100,93
	RATA-RATA % CAPAIAN SASARAN	121,70